

REVISI

**Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah**

RPJMD

**Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021**



*Visi 2016-2021:
Terwujudnya Kabupaten Balangan
yang Maju dan Sejahtera
Melalui Pembangunan
Sumber Daya Manusia*

**Pemerintah Kabupaten Balangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Tahun Anggaran 2017**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Bupati Balangan yang terinci dan terukur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih terukur, perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4

7

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.

f 8

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Balangan, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tertentu.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Kabupaten Balangan tahun 2016-2021.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Balangan adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembanguna Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terusmenerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

f

g

22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan :

1. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021; dan
2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strtegis Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (2) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Kabupaten Balangan.
- (4) Perubahan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- BAB IX : Penutup

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat RPJMD Tahun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD ini serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2018

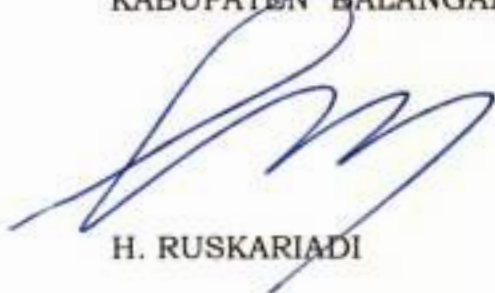
BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 3

NO. 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 162 TAHUN 2018



SAMBUTAN BUPATI BALANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji - syukur kehadirat Allah SWT serta atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan dan tindaklanjut atas terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah yang ketiga setelah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2005-2010 dan 2011-2015, yang saling berkaitan secara *inherent* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam naungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD telah berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Balangan 2005-2025, RTRW Kabupaten Balangan dan mengacu kepada Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, serta RPJM Nasional tahun 2015-2019.

Dengan telah tersusunnya RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini maka **Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan serta Indikator Capaian Kinerja** dapat ditetapkan secara lebih *objective* dan *integrative* mencakup seluruh SKPD di Kabupaten Balangan. Pengerahan semua *resources* dengan melibatkan semua *stakeholders* akan dapat lebih mewujudkan keterpaduan guna menciptakan **sinergi**.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat mendukung tersusunnya RPJMD ini, Semoga segala daya upaya kita dapat bermanfaat bagi bangsa, negara, daerah maupun masyarakat Balangan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paringin, Januari 2018

BUPATI BALANGAN

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NO. 12 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021	
SAMBUTAN BUPATI BALANGAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
2.1.3 Struktur dan Pola Ruang.....	II-12
2.1.4 Rencana Kawasan Lindung	II-16
2.1.5 Rencana Kawasan Budidaya	II-16
2.1.6 Wilayah Rawan Bencana	II-17
2.1.7 Demografi.....	II-17
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-18
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-30
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-34
2.3.1 Pendidikan.....	II-34
2.3.2 Kesehatan	II-38
2.3.3 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-41
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-42
2.4.1 Perhubungan.....	II-42
2.4.2 Pos dan Telekomunikasi.....	II-43



2.4.3	Air Minum	II-44
2.4.4	Listrik	II-45
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III-2
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-3
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-3
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-4
3.3	Kerangka Pendanaan	III-5
3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-5
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-6
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1.	Pemersalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Isu Strategis	IV-3
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1.	Visi	V-2
5.2.	Misi.....	V-3
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	V-3
BAB VI	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEBANGUNAN DAERAH ..	VI-1
6.1.	Strategi	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan.....	VI-8
6.3.	Program Pembangunan Daerah	VI-16
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VII-1
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2.	Program Prioritas Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1.	Indikator Makro Daerah	VIII-1
8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah	VIII-2
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan II-2
Tabel 2.3	Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan II-8
Tabel 2.4	Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan II-9
Tabel 2.5	Data Luas Areal dan Produksi Peternakan II-10
Tabel 2.6	Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan II-11
Tabel 2.7	Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan II-15
Tabel 2.8	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2016 II-18
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014 - 2015 II-18
Tabel 2.10	PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2012 - 2014 II-19
Tabel 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 II-22
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013 - 2014 II-23
Tabel 2.13	Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014 II-24
Tabel 2.14	Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 - 2014 II-26
Tabel 2.15	Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010 - 2015 II-30
Tabel 2.16	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015.. II-31
Tabel 2.17	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 II-31
Tabel 2.18	Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 II-32
Tabel 2.19	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 II-33
Tabel 2.20	Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 II-33
Tabel 2.21	Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 - 2015 II-34
Tabel 2.22	Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 - 2015 II-35
Tabel 2.23	Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015 II-35
Tabel 2.24	Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015 II-38
Tabel 2.25	Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2010 - 2015 II-39



Tabel 2.26	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015.....	II-39
Tabel 2.27	Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2009 - 2015	II-40
Tabel 2.28	Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat.....	II-40
Tabel 2.29	Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2010 - 2014	II-41
Tabel 2.30	Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015.....	II-41
Tabel 2.31	Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2014	II-43
Tabel 2.32	Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan.....	II-44
Tabel 2.32	Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran	II-44
Tabel 2.33	Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2007 - 2014	II-45
Tabel 2.34	Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif Tahun 2014.....	II-45
Tabel 3.1	Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014 – 2015.....	III-3
Tabel 3.2	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Balangan Tahun 2013 – 2015	III-4
Tabel 3.3	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015.....	III-4
Tabel 3.4	Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2015.....	III-5
Tabel 3.5	Proyeksi Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021	III-7
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	V-4
Tabel 5.2	Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	V-7
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	VI-9
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Makro Daerah Dalam Kabupaten Balangan Tahun 2016–2021.....	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	VIII-3
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021	VIII-6



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan.....	I-5
Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan.....	II-1
Gambar 2.2. Luas masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan.....	II-2
Gambar 2.3 Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm) 2015.....	II-6
Gambar 2.4 Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan.....	II-7
Gambar 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (dalam triliun rupiah) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.....	II-20
Gambar 2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2014.....	II-21
Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2014.....	II-22
Gambar 2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014.....	II-27
Gambar 2.9 Pengelompokan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2014.....	II-29
Gambar 2.10 Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2014.....	II-31
Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2014.....	II-31
Gambar 2.12 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015.....	II-46
Gambar 2.13 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2015.....	II-46
Gambar 3.1 APBD Kabupaten Balangan.....	III-1
Gambar 3.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015	III-2
Gambar 3.3 Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Balangan.....	III-2
Grafik 4.1 Perkembangan Kemiskinan dan G Gini Ratio Balangan.....	IV-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Perencanaan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan nasional dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan dokumen perencanaan, dalam Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan agenda pembangunan serta prioritas program pembangunan Bupati/Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan untuk jangka waktu lima tahun dan satu tahun transisi ke depan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain (swasta) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025.



Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021 dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
Musrenbang RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah dan masyarakat, dengan materi Rancangan Awal RPJMD.
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD, Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

1.3. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 1.6. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1. Strategi
- 6.2. Arah Kebijakan
- 6.3. Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1. Indikator Makro Daerah
- 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah



BAB IX PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

9.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun RKP Daerah.
2. Menjadikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 sebagai bahan acuan penyusunan Renstra SKPD dan bahan evaluasi kinerja SKPD.
3. Membantu jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyelaraskan program kegiatan pembangunan secara terpadu dan terarah serta untuk mengevaluasi pencapaian kegiatan operasional dalam lima tahun ke depan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

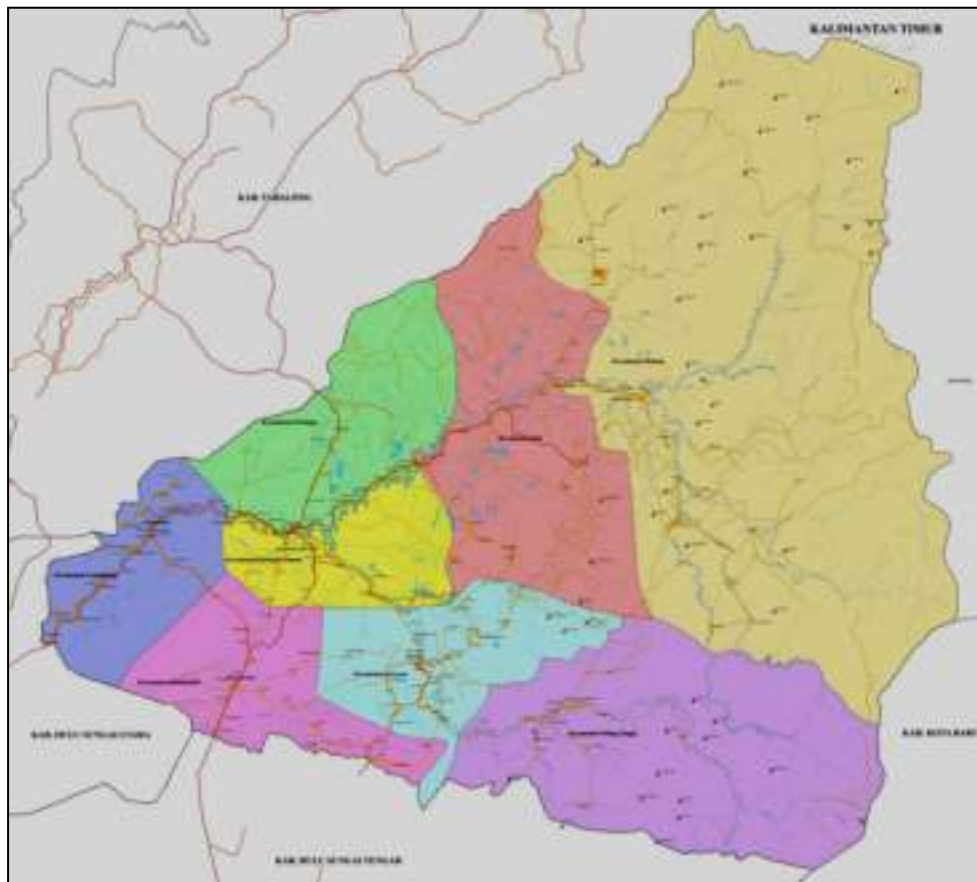
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 182.611 ha secara geografis terletak pada 2° 01' 37" sampai dengan 2° 35' 58" Lintang Selatan dan 114° 50' 24" sampai dengan 115° 50' 24" Bujur Timur, dengan batas administratif sebagai berikut:

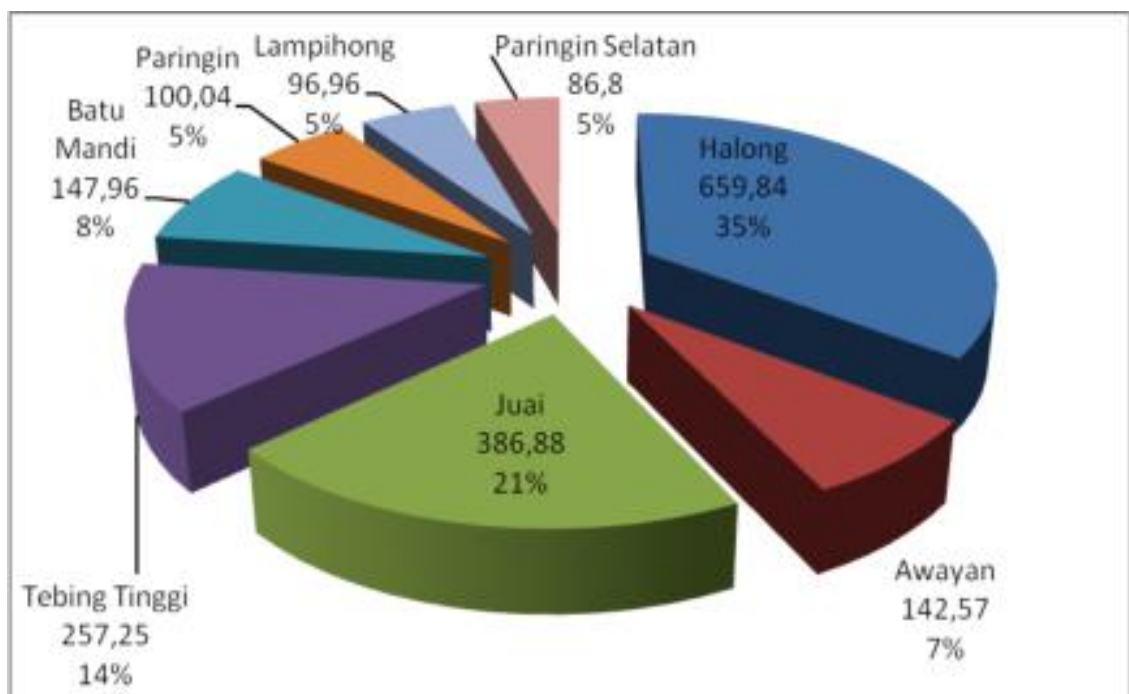
- Sebelah Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur



Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Balangan

Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Halong yaitu 659,84 km² (35,13 persen), Kecamatan Juai 386,88 km² (20,59 persen), Kecamatan Tebing Tinggi 257,25 km² (13,70 persen), Kecamatan Batumandi 147,96 km² (7,88 persen), Kecamatan Awayan 142,57 km² (7,59 persen), Kecamatan Paringin 100,04 km² (5,33 persen), Kecamatan Lampihong 96,96 km² (5,16 persen), dan Kecamatan Paringin Selatan 86,80 km² (4,62 persen). Kabupaten Balangan terdiri atas 149 desadan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.1. berikut ini

Gambar 2.2. Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²



Sumber: BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
Lampihong	Simpang Tiga	96,96	-	27
Paringin	Paringin	100,04	2	14
Juai	Mungkur Uyam	386,88	-	21
Halong	Halong	659,84	-	24
Batu Mandi	Batu Mandi	147,96	-	18
Paringin Selatan	Batu Piring	86,80	1	15
Awayan	Putat Basiun	142,57	-	23
Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	257,25	-	12
Jumlah		1.878,30	3	154

Sumber : BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2015



b. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah kabupaten Balangan terletak antara 2° 02'25,99" sampai dengan 2° 31'57,96" Lintang Selatan dan 115°18'45,03" sampai dengan 115°50'11,70" Bujur Timur. Kabupaten Balangan terbagi menjadi 8 kecamatan, dengan 157 desa/kelurahan.

1) Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 persen). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 persen. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketinggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 persen, 2-8 persen, 8-15 persen, 15-25 persen, 25-40 persen dan lebih besar dari 40 persen. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2persenyaitu mencapai 69 persendari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, dimana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40m yaitu hanya 2 persen, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 persen dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).



2) Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup Kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas.

Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 persen) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, kompleks podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial untuk budidaya pertanian karena disamping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 persen), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 persen). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 persen). Tanah alluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awaran dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 persen dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 persen dan 1,26 persen dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

3) Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya kondisi sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir di daerah Kabupaten Balangan adalah sungai Pitap,



sungai Balangan, sungai Mantuyan, sungai Tabuan, sungai Galumbang, sungai Halong, sungai Uren, sungai Ninian, sungai Jauk, sungai Batumandi, sungai Lokbatu dan sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengaliran dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdendritik.

a) Pola Pengaliran Anastomatik

Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Pitap, sungai Muning, sungai Lok Batu, sungai Juuh, sungai Batumandi, sungai Jauk, sungai Pelasan serta sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

b) Pola Pengaliran Dendritik

Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 persen. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

c) Pola Pengaliran Rektangular

Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola.

Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 persen. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Balong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya

d) Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten balangan sekitar 20 persen. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

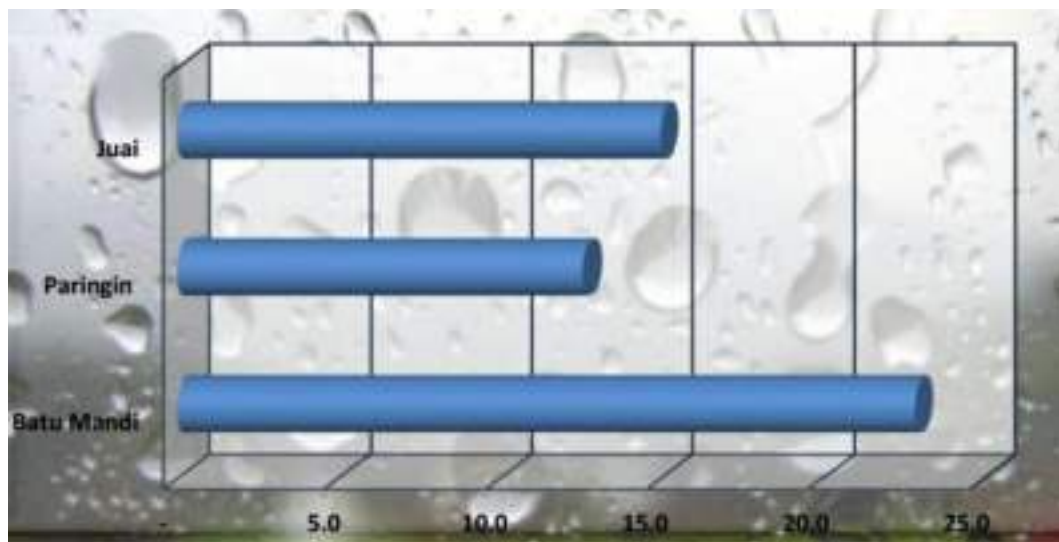
4) Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan kedalam iklim hutan tropika humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm, curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus dan September, sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari dan Maret.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan. Hari hujan terbanyak selamatahun 2014 interantau di stasiun pengamatan Juai yaitu pada bulan Desember dengan 25 hari hujan dalam sebulan.

Gambar 2.3

Rata-Rata Curah Hujan/hari Menurut Stasiun Pengamatan (mm), 2015



5) Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29persen, tanah bukan sawah 25 persen, hutan negara 21 persen, dan tanah sawah 18persen. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara

dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Luas Wilayah Balangan Menurut Penggunaan



Sumber : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki beberapa sektor unggulan daerah yaitu di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor pariwisata.

a. Sektor Pertanian

1) Tanaman Pangan:

- *Padi Gogo* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong dan Kecamatan Awayan.
- *Pisang Talas* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Halong & Kecamatan Awayan

2) Sayuran:

- *Labu/Waluh* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Juai dan Kecamatan Awayan.
- *Cabe Rawit* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan dan Kecamatan Halong.



- 3) Buah-buahan:
 - *Cempedak* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Halong.
 - *Maritam* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Juai dan Kecamatan Batumandi.
- 4) Perkebunan:
 - *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan.
 - *Sawit* dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi
 - *Gula Arendeng* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
- 5) Peternakan:
 - *Ayam Buras* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
 - *Sapi Potong* dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.

Untuk lebih jelasnya data mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten Balangan dari Tahun 2013 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa tabel berikut.

Tabel 2.3. Data Luas Areal dan Produksi Pertanian Tanaman Pangan

Jenis Data Pertanian	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
a. Padi				
- Luas areal produksi	32.743	32.930	34.914	Ha
- Jumlah Produksi	135.265,34	136.331,16	157.116	Ton
-				
b. Jagung				
- Luas areal produksi	448	472	1.121	Ha
- Jumlah Produksi	1.570,29	1.703,60	5.044,7	Ton
-				
c. Kedelai				
- Luas areal produksi	560	502	799	Ha
- Jumlah Produksi	728,18	657,62	959	Ton
-				
d. Singkong dan Umbi-umbian				
- Luas areal produksi	263	325	300	Ha
- Jumlah Produksi	3.529,64	4.254,59	4.070	Ton
-				

Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016



Tabel 2.4. Data Luas Areal dan Produksi Perkebunan

Jenis Data Perkebunan	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5
a. Karet				
- Luas areal	37.345	37.495	37.495	Ha
- Jumlah Produksi	25.107	25,268	24,959	Ton
b. Kelapa				
- Luas areal	891	816	816	Ha
- Jumlah Produksi	322	231	244	Ton
c. Kopi				
- Luas areal	652	630	630	Ha
- Jumlah Produksi	32	29	51	Ton
d. Sawit / Perkebunan Rakyat				
- Luas areal	200	200	356	Ha
- Jumlah Produksi	233	244	258	Ton
e. Sawit / Perkebunan Besar Swasta				
- Luas areal	1700	1700	1700	Ha
- Jumlah Produksi	5048	5950	6399	Ton
f. Kapuk				
- Luas areal	20	20	20	Ha
- Jumlah Produksi	1	2	3	Ton
g. Kemiri				
- Luas areal	208	208	204	Ha
- Jumlah Produksi	70	71	72	Ton
h. Lada				
- Luas areal	10	10	10	Ha
- Jumlah Produksi	4	2	2	Ton
i. Pinang				
- Luas areal	41	41	41	Ha
- Jumlah Produksi	3	4	5	Ton
j. Asen/Enau				
- Luas areal	733	734	727	Ha
- Jumlah Produksi	391	360	422	Kg
k. Jahe				
- Luas areal	-	-	-	Ha
- Jumlah Produksi	-	-	-	Ton
l. Sagu				
- Luas areal	426	426	426	Ha
- Jumlah Produksi	51	49	76	Ton

Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016



Tabel 2.5. Data Luas Areal dan Produksi Peternakan

Jenis Data Peternakan	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5
a. Ternak Sapi Potong				
- Jumlah populasi	2.334	1.766	2.017	Ekor
- Jumlah Produksi (daging)	192.563	215.799	216.673	Kg
- Jumlah pemotongan/th	975	988	988	Ekor
- Jumlah pertumbuhan populasi per tahun				%
- Harga produsen (kg bh)		105.000	105.000	Rp.
- Harga konsumen (kg)		115.000	115.000	Rp.
b. Ternak kecil				
- Jumlah populasi kambing	2.028	655	675	Ekor
▣ Jumlah Produksi (daging)	8.475	10.789	10.889	Kg
▣ Harga produsen (kg bh)		70.000	70.000	Rp.
▣ Harga konsumen (kg)		90.000	90.000	Rp.
- Jumlah populasi domba	14			Ekor
▣ Jumlah Produksi (daging)	363	153	153	Kg
▣ Harga produsen (kg bh)		70.000	70.000	Rp.
▣ Harga konsumen (kg)		90.000	90.000	Rp.
c. Unggas				
- Ayam buras				
▣ Jumlah populasi	20.554	57.815	71.128	Ekor
▣ Jumlah produksi (daging)	558.264	296.176	343	Kg
▣ Jumlah produksi (telur)	67.955	47.303	58.196	Kg
▣ Harga produsen (kg bh)		38.000	38.000	Rp.
▣ Harga konsumen (kg)		45.000	45.000	Rp.
- Ayam pedaging				
▣ Jumlah populasi	279.600	1.094.842	1.094.842	Ekor/th
▣ Jumlah produksi (daging)			560.896	Kg
▣ Harga produsen (kg bh)		29.000	29.000	Rp.
▣ Harga konsumen (kg)		35.000	35.000	Rp.
- Itik				
▣ Jumlah populasi	70.833	626.801	30.194	Ekor/th
▣ Jumlah produksi (daging)	47.368	49.481	67.235	Ton
▣ Jumlah produksi (telur)	502.793	183.778	207.045	Butir/th
▣ Harga produsen (kg bh)		40.000	40.000	Rp.
▣ Harga konsumen (kg)		50.000	50.000	Rp.
d. Jumlah rumah potong hewan (RPH)	1	1	1	Bh

Sumber: DisPTPHPP Balangan Tahun 2016



Tabel 2.6. Data Luas Areal dan Produksi Kehutanan

Jenis Data Kehutanan	Tahun			Ket
	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5
a. Hasil hutan non HPH				
- Kayu bulat	-	-	-	M ³
- Kayu penggergajian	-	-	-	M ³
- Kayu olahan				M ³
b. Luas lahan kritis	41.920,5	18.892,3	-	Ha
c. Luas lahan reboisasi	1.812	24.840,2	-	Ha
d. Luas lahan penghijauan				Ha
e. Luas kebakaran hutan			37	Titik Hotspot
f. Industri pengolahan hasil hutan	2	1	1	Bh

Sumber: Dishutbun Balangan Tahun 2016

b. Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan, sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi.

c. Sektor Pariwisata

Di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Awayan
 - Benteng Tundakan
- 2) Kecamatan Paringin Selatan
 - Danau Baruh Bahinu Dalam, dimana lokasi objek wisata ini pernah ditayangkan melalui acara Jejak Petulangan yang dilaksanakan oleh Trans TV.
- 3) Kecamatan Halong
 - Air Terjun Manyandar
 - Goa Berangin Gunung Belawan
- 4) Kecamatan Juai
 - Makam Datu Kandang Haji

Objek Wisata ini merupakan Objek Wisata Religius, dimana Datu Kandang Haji merupakan tokoh penyebar Agama Islam di Kabupaten Balangan
- 5) Kecamatan Tebing Tinggi
 - Gunung Hantanung Permai



2.1.3. Struktur dan Pola Ruang

1) Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan di Indonesia umumnya memiliki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir.

Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukakan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

a). Kawasan Perdesaan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian.

Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

b). Kawasan Perkotaan

Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.



- Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.
- IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.
- Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

2) Sistem Perdesaan

Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam *subcluster of services*, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (*network system*), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer.

Arahan pengembangan struktur ruang perdesaan melalui:

- Pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).
- Pembentukan Pusat Desa.
- Pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan.

Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada:

- Desa pertanian.
- Desa industri.
- Desa wisata.



Desa-desanya pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*). Maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu.

Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni.

Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Desa pusat pertumbuhan dimungkinkan mempunyai konsentrasi penduduk dan kegiatan budaya non pertanian yang lebih intensif dari sistem permukiman di desa pertanian. Pola pengembangan pusat permukiman desa pertanian dengan pusat permukiman diupayakan sinergi dan berimbang dengan pola pemanfaatan lahan.

Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

3). Sistem Perkotaan

Dalam Sistem Perkotaan, didalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.



- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu Piring di Kelurahan Paringin Selatan.

Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan

Peran	Perkotaan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan)
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Batumandi (Kecamatan Batumandi)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kab. Balangan Tahun 2014



2.1.4. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kab. Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44persen dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 persen); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 persen); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 persen); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 persen); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 persen); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 persen); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 persen); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 persen).

2.1.5. Rencana Kawasan Budidaya

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 persen, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 persen); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 persen); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 persen); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 persen); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 persen); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 persen); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 persen) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 persen).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.



2.1.6. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsor mendatar dan jatuhnya batuan.

Potensi rawan bencana lainnya adalah banjir yang berada pada areal sektor sungai Balangan dan sungai Pitap yakni sekitar kecamatan Lampihong, Paringin dan kecamatan Juai. Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sedimentasi.

2.1.7. Demografi

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan jumlah penduduk Kabupaten Balangan pada tahun 2012 adalah sebesar 151.875 jiwa. Angka ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 114.009 jiwa, yang terdiri dari 31.587 rumah tangga yang tersebar di 152 Desa/Kelurahan. Kabupaten dengan luas wilayah 1.878,30 km² ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 62 jiwa per km². Dari total penduduk yang ada, sebanyak 76.502 laki-laki dan 75.373 perempuan, dengan sebarannya hampir merata di masing-masing kecamatan, terbanyak terdapat di Kecamatan Halong yaitu 26.339 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 9.056 jiwa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. dan Tabel 2.9.



Tabel 2.8. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah/total		
		Desa/Kel.	Rumah tangga	Penduduk
1. Lampihong	96,96	27	5.130	16.944
2. Batumandi	147,96	18	5.363	17.418
3. Awayan	142,57	23	4.245	13.939
4. Tebing Tinggi	257,25	12	1.881	6.280
5. Paringin	100,04	16	5.349	17.614
6. Paringin Selatan	86,80	16	3.822	12.515
7. Juai	386,88	21	5.209	17.392
8. Halong	659,84	24	6.433	21.393
Jumlah	1.878,30	157	37.432	123.495

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2014-2015

Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-laki		Perempuan				Kelamin	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1. Lampihong	9.013	8,568	8,896	8,376	17,927	16,944	102	102
2. Batumandi	9.148	8,877	8,836	8,541	17,984	17,418	104	104
3. Awayan	6.706	6,944	6,743	6,995	13,449	13,939	99	99
4. Tebing Tinggi	3.462	3,206	3,348	3,074	6,810	6,280	103	104
5. Paringin	8.956	8,790	8,998	8,824	17,954	17,614	100	100
6. Paringin Selatan	6.467	6,294	6,399	6,221	12,866	12,515	101	101
7. Juai	8.448	8,815	8,261	8,577	16,709	17,392	102	103
8. Halong	9.394	10,985	8,951	10,408	18,345	21,393	105	106
Jumlah	76.502	62.479	60,432	61,016	122,044	123,495	102	102

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2016

2.2. Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Makro Ekonomi Balangan

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk



struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan salah satunya di bidang ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi, dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam membersayakan sumber-sumber alam dan manusia di daerah.

Salah satu kegunaan angka nominal PDRB adalah untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai PDRB yang cukup tinggi menunjukkan kinerja perekonomian daerah tersebut cukup berhasil serta memiliki potensi sumber daya yang cukup tinggi karena ketersediaan faktor produksi yang melimpah atau karena efisiensi pengelolaan faktor produksi. Untuk melihat kinerja perekonomian masing-masing kabupaten /kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Tahun 2012-2014^(*) (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2012	2013 ^(*)	2014 ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah laut	8.728,97	9.408,81	10.468,87
Kotabaru	14.219,69	15.413,64	17.568,54
Banjar	9.518,02	10.303,11	11.773,47
Barito Kuala	4.534,37	4.909,48	5.663,51
Tapin	5.051,45	5.469,08	6.235,04
Hulu Sungai Selatan	3.446,19	3.804,87	4.381,22
Hulu Sungai Tengah	3.627,37	3.996,40	4.580,30
Hulu Sungai Utara	2.526,36	2.784,05	3.246,59
Tabalong	12.921,94	13.851,64	15.246,18
Tanah Bumbu	13.422,18	14.262,07	15.767,82
Balangan	7.887,84	8.713,74	9.702,66
Banjarmasin	16.177,22	17.954,96	20.943,74
Banjarbaru	4.366,55	4.951,50	5.822,75
Kalimantan Selatan	106.725,43	115.876,46	131.592,89

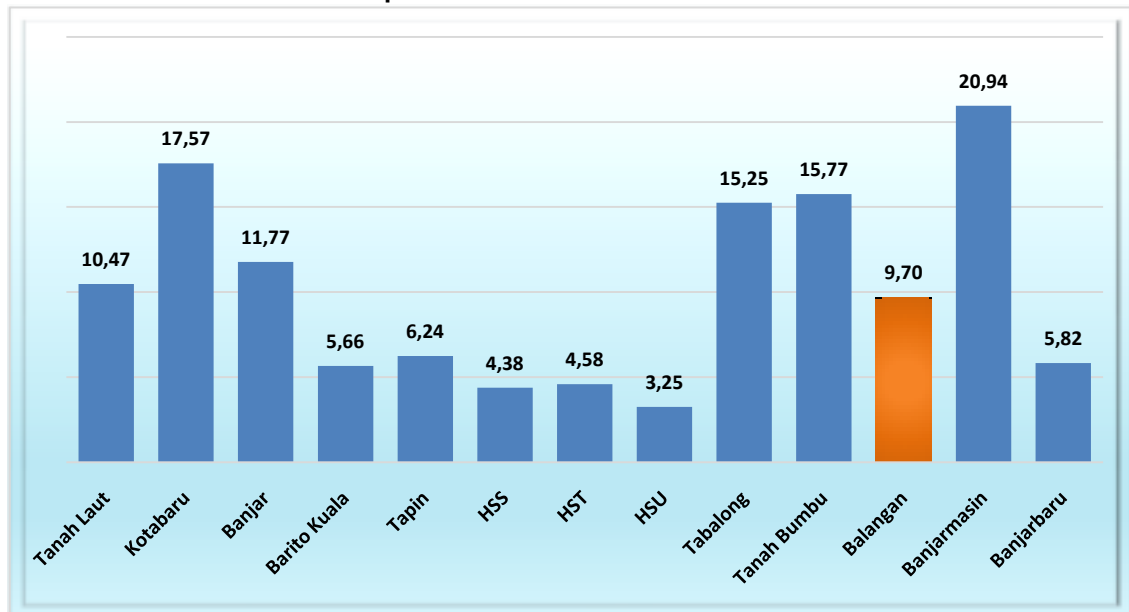
Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

^(*)Angka Sementara

^(**)Angka Sangat Sementara

Dari beberapa faktor produksi yang tersedia, modal luas wilayah (lahan) dan ketersediaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor penentu dalam penciptaan nilai tambah. Oleh karenanya, kabupaten/kota yang memilikinya mampu menghasilkan PDRB yang relatif besar. Selain faktor produksi tersebut, ketersediaan prasarana juga turut mempengaruhi pembentukan nilai tambah.

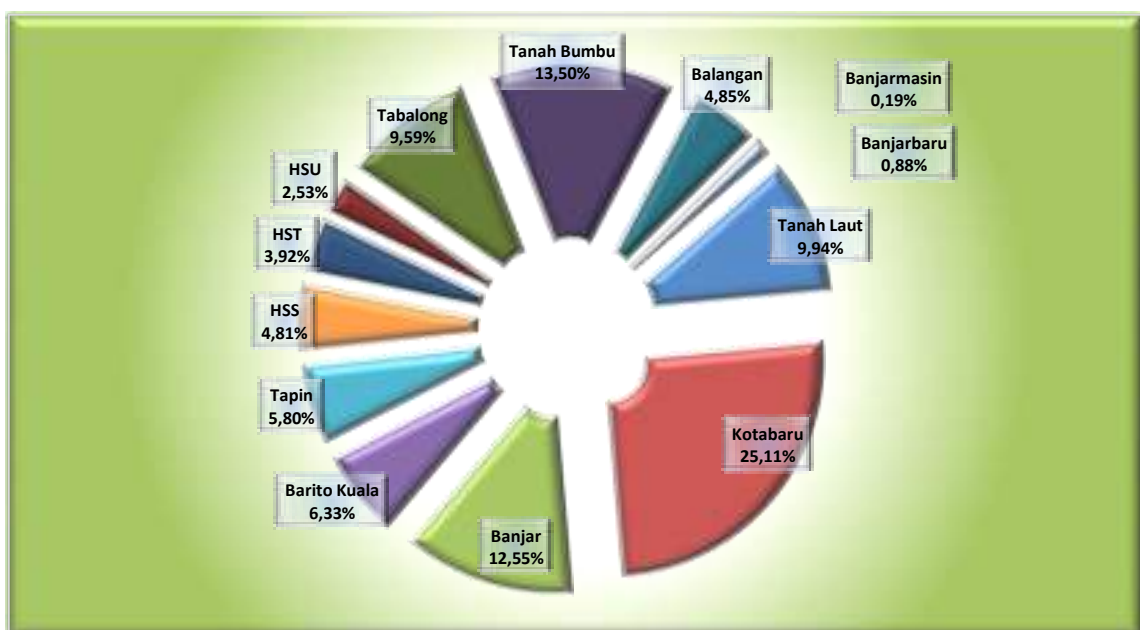
**Gambar 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (dalam triliun rupiah)
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Nilai PDRB Kabupaten Balangan pada tahun 2014 berada di urutan ketujuh jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Nilai PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Banjarmasin kemudian diikuti oleh Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

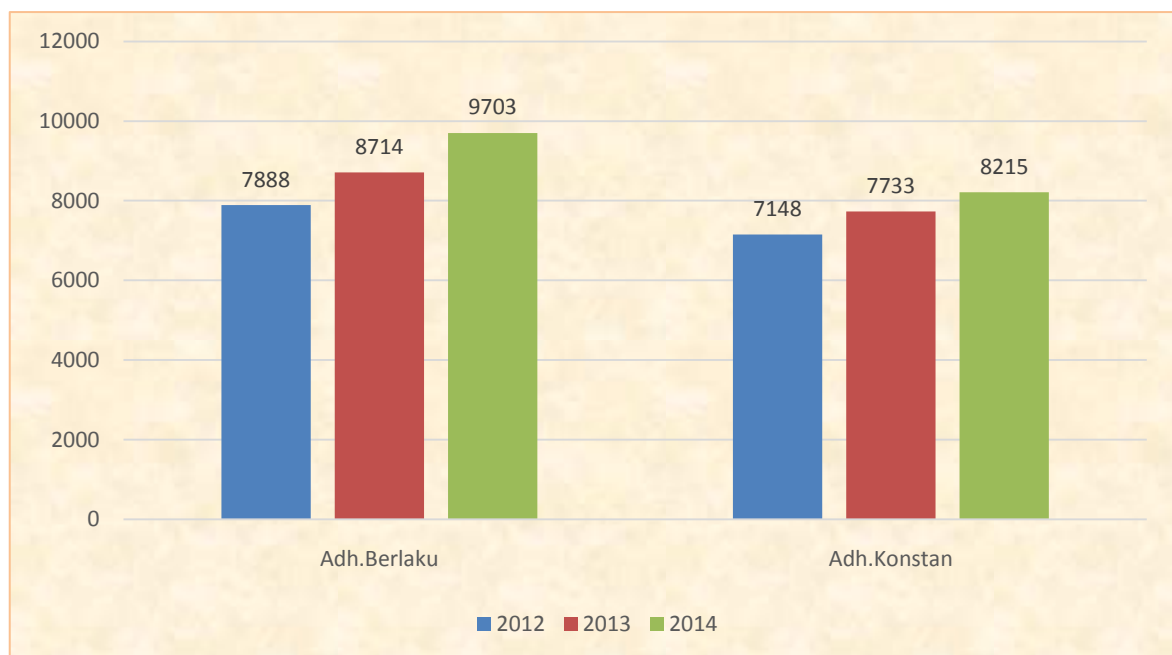
Gambar 2.6 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2015

Dengan wilayah yang relatif luas, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tanah Laut, dan Tabalong mampu mencapai PDRB diatas 10 triliun rupiah. Selain itu, daerah-daerah tersebut juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan daerah lain. Sedangkan Kota Banjarmasin yang memiliki luas wilayah yang relatif kecil mampu menghasilkan PDRB yang cukup besar karena didukung oleh kekuatan sektor sekunder dan tersier, yakni dengan cukup banyaknya prasarana untuk kegiatan ekonomi seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi makan dan minum, komunikasi, keuangan, real estate, dan jasa-jasa.

Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (dalam miliar rupiah),2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 (2010=100)

PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun tahun 2012-2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010=100 memperlihatkan kecenderungan terus meningkat. Pada Gambar 2.7 terlihat PDRB atas dasar harga berlaku Balangan mampu mencapai nilai 9.703 miliar rupiah pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 7.888miliar rupiah di 2012 dan 8.714miliar rupiah pada tahun 2013. Sementara atas dasar harga konstan, nominal PDRB juga menunjukkan peningkatan yakni pada tahun 2012 mencapai nilai 7.148miliar rupiah menjadi sebesar 8.215miliar rupiah di tahun 2014.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Perkembangan di sektor ekonomi yang terbentuk dari laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomui yang terjadi. Pergerakan dari laju pertumbuhan merupakan indikator



penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan selanjutnya.

Angka pertumbuhan ekonomi dapat pula memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi penduduknya. Hal ini mampu dijelaskan karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output).

PDRB atas dasar harga konstan secara berkala digunakan untuk melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya aktivitas perekonomian, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan penurunan dalam kegiatan ekonomi. Laju pertumbuhan daerah dapat dicerminkan dari indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2013 dan 2014, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Secara umum pertumbuhan positif tersebut terjadi pada semua kategori lapangan usaha. Pada tabel 3.2 dapat dilihat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 berkisar dari 2,73 sampai 9,10 persen.

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi di kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2013. Pertumbuhan cukup tinggi di tahun 2014 ada pada kategori lapangan usaha jasa lainnya dan kategori real estate.

Tabel 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2013^{*)}-2014^{)} (dalam Persen)**

Kategori Lapangan Usaha	2013 ^{*)}	2014 ^{**)}
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,97	3,96
2. Pertambangan dan Penggalian	9,34	6,64
3. Industri Pengolahan	5,20	4,74
4. Pengadaan Listrik, Gas	2,73	3,03
5. Pengadaan Air	3,73	6,48
6. Konstruksi	6,01	6,05
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Kendaraan	8,29	6,17
8. Transportasi dan Pergudangan	8,43	6,54
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,46	5,12
10. Informasi dan Komunikasi	6,64	6,12
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9,10	3,92
12. Real Estate	5,50	7,06
13. Jasa Perusahaan	5,69	4,82
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jam. Sosial Wajib	6,07	5,54
15. Jasa Pendidikan	7,24	6,21
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,46	5,74
17. Jasa lainnya		7,07
PDRB	8,19	6,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

^{*)}Angka Sementara

^{**)}Angka Sangat Sementara



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan berada pada posisi yang cukup tinggi diantara kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan baik pada tahun 2013, maupun pada tahun 2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.12 di bawah.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Dengan Migas Tahun 2013^{*)} -2014^{)} (dalam persen)**

Kabupaten/Kota (1)	2013 ^{*)} (3)	2014 ^{**)} (4)
1. Tanah laut	5,49	3,05
2. Kotabaru	5,20	4,34
3. Banjar	4,61	5,08
4. Barito Kuala	4,15	4,46
5. Tapin	5,74	5,48
6. Hulu Sungai Selatan	5,68	5,80
7. Hulu Sungai Tengah	5,91	5,58
8. Hulu Sungai Utara	5,29	6,00
9. Tabalong	4,36	3,98
10. Tanah Bumbu	3,81	3,63
11. Balangan	8,19	6,23
12. Banjarmasin	7,18	6,25
13. Banjarbaru	6,58	6,65
Kalimantan Selatan	5,36	4,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

^{*)}Angka Sementara

^{**)}Angka Sangat Sementara

c. Struktur Ekonomi

Pada dasarnya struktur ekonomi di suatu wilayah tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, seperti misalnya penanaman modal yang besar pada suatu kategori lapangan usaha tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru. Kategori lapangan usaha yang memiliki daya tahan yang tinggi tentunya akan mampu berkembang sehingga nantinya dapat meningkatkan peranan/kontribusi kategori lapangan usaha yang bersangkutan dalam struktur ekonomi di wilayahnya.

Secara umum, struktur ekonomi dalam PDRB Kabupaten Balangan dalam kurun waktu 2012-2014 menunjukkan komposisi kontribusi kategori lapangan usaha yang relatif stabil setiap tahunnya. Penurunan



kontribusi kategori lapangan usaha di tahun 2014 terjadi pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Sementara kategori lapangan usaha lainnya ada yang tetap kontribusinya dan adapula yang meningkat. Peranan/kontribusi untuk masing-masing kategori lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2010 -2014^{}) (dalam Persen)**

Kategori Lapangan Usaha	2012	2013 ^{*)}	2014 ^{**})
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,83	10,55	10,59
Pertambangan dan Penggalian	69,82	70,05	68,98
Industri Pengolahan	1,50	1,47	1,54
Pengadaan Listrik, Gas	0,02	0,01	0,01
Pengadaan Air	0,18	0,18	0,19
Konstruksi	3,33	3,25	3,50
Perdag. Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil, Sepeda Motor	3,94	3,98	4,20
Transportasi dan Pergudangan	1,39	1,43	1,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,24	0,24
Informasi dan Komunikasi	1,13	1,07	1,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,23	0,23	0,23
Real Estate	0,73	0,74	0,76
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05
Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,32	3,50	3,79
Jasa Pendidikan	2,30	2,26	2,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,61	0,63
Jasa lainnya	0,38	0,37	0,39
PDRB	100,00	100,00	100,00

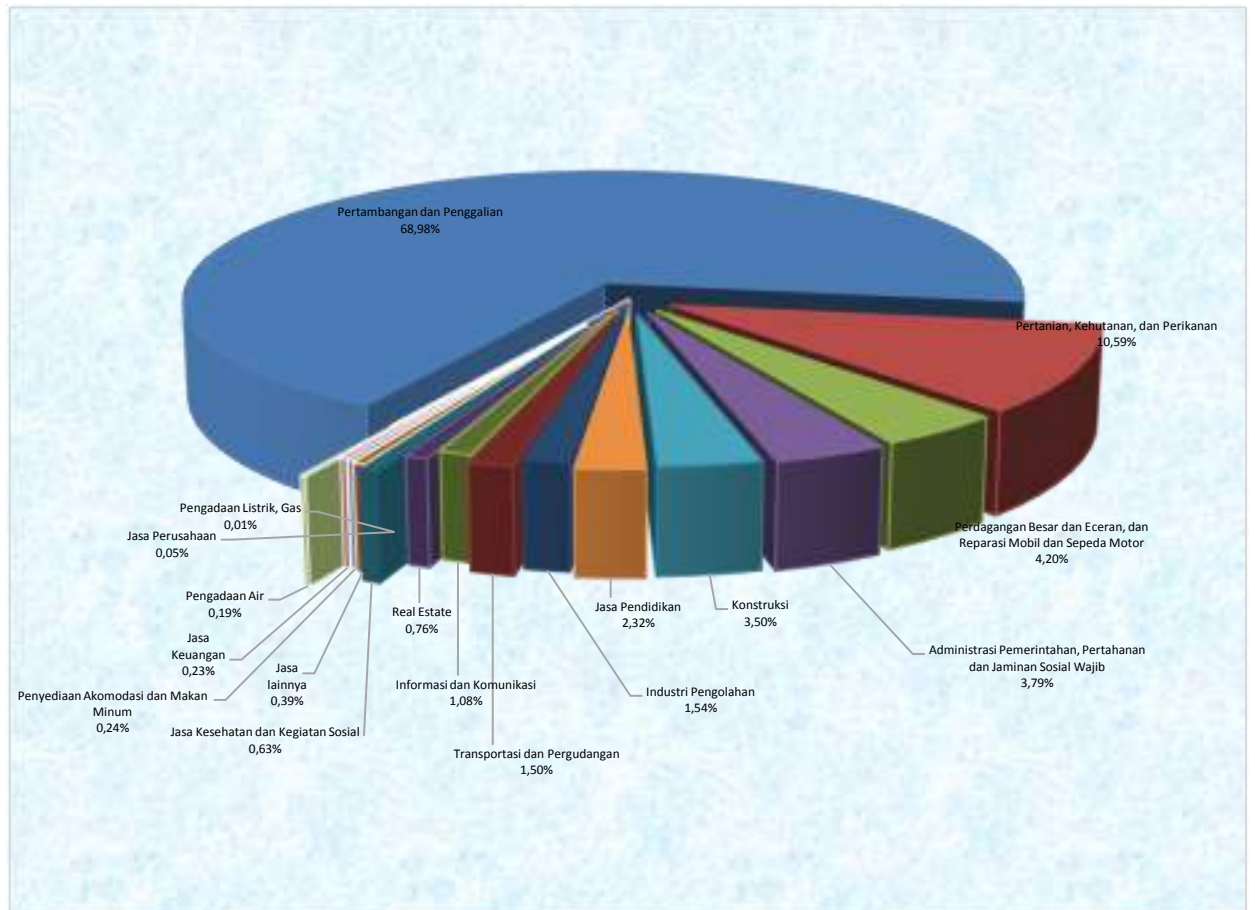
Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB tahun 2010-2014

^{*)}Angka Sementara

^{**})Angka Sangat Sementara

Pada tabel 2.13 terlihat bahwa peranan terbesar dalam PDRB Balangan tahun 2014 berada pada kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dalam kategori ini, mengingat Kabupaten Balangan sebagai salah satu kabupaten penghasil batubara, maka subkategori pertambangan batubara memiliki pengaruh yang relatif besar. Sementara kategori lapangan usaha lainnya selain pertambangan dan penggalian, hanya mampu mencapai akumulasi total sekitar 31,02 persen, dimana peranan terbesarnya berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Gambar2.8 Distribusi PDRB Kabupaten Balangan Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014

Pada tahun 2014, kategori lapangan usaha yang memiliki peranan yang tinggi dalam struktur ekonomi Balangan adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian (68,98 persen), kategori pertanian, kehutanan dan perikanan (10,59 persen), kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (4,20 persen), kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,79 persen), dan kategori konstruksi (3,50 persen). Dari kelima kategori ini, hanya kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan dalam kontribusinya di sektor perekonomian yakni dari sebesar 69,82 pada tahun 2012, menjadi 68,98 persen pada tahun 2014.

Setelah melihat gambaran struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama kurun waktu 2012-2014, maka pemerintah Kabupaten Balangan perlu membuat prioritas kebijakan berkaitan dengan hal tersebut. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta mampu berjalan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan keterbatasan sumber daya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan khususnya di bidang ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini analisis yang dapat digunakan adalah analisis Tipologi Klassen. Teknik analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan kategori lapangan usaha di



daerah. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengelompokkan daerah kabupaten/kota dalam provinsi menurut struktur pertumbuhannya.

Tipologi Klassen dengan pendekatan kategori lapangan usaha mendasarkan pengelompokan suatu kategori dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah (ri) dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan (r) dan membandingkan kontribusi kategori lapangan usaha suatu daerah (ki) dengan nilai rata-ratanya di tingkat yang lebih tinggi (k). Dimana kategori pengelompokannya adalah jika $(ri) \geq (r)$ dan $(ki) \geq (k)$ maka sektor digolongkan sektor maju dan tumbuh pesat, jika $(ri) \geq (r)$ dan $(ki) < (k)$ maka sektor digolongkan sektor berkembang, jika $(ri) < (r)$ dan $(ki) \geq (k)$ maka sektor digolongkan sektor maju tapi tertekan dan jika $(ri) < (r)$ dan $(ki) < (k)$ maka sektor digolongkan sektor relatif tertinggal.

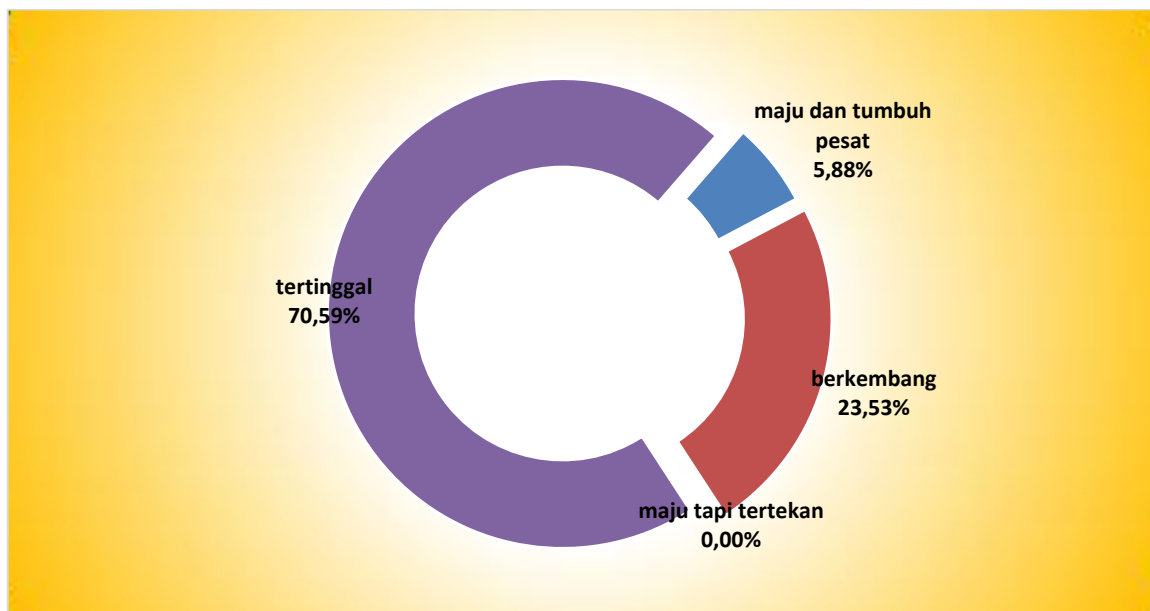
Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata Selama Tahun 2012 -2014^{*)} (dalam Persen)

Kategori Lapangan Usaha	Balangan		Kalimantan Selatan	
	Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi)	Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,37	10,66	3,27	14,53
Pertambangan dan Penggalian	7,99	69,62	3,47	28,56
Industri Pengolahan	4,97	1,51	3,63	13,06
Pengadaan Listrik, Gas	2,88	0,01	10,52	0,06
Pengadaan Air	5,10	0,18	5,91	0,36
Konstruksi	6,03	3,36	6,14	7,00
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,23	4,04	8,23	8,14
Transportasi dan Pergudangan	6,66	1,44	6,84	5,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,77	0,24	7,07	1,76
Informasi dan Komunikasi	4,79	1,10	8,38	3,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	0,23	10,68	3,16
Real Estate	8,08	0,75	6,38	2,07
Jasa Perusahaan	5,16	0,05	7,42	0,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	3,53	5,62	5,61
Jasa Pendidikan	6,14	2,29	8,11	3,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,49	0,62	7,76	1,59
Jasa lainnya	6,26	0,38	5,93	1,00
PDRB	7,21	100,00	5,10	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014 diolah

Berdasarkan hasil pengelompokan kategori lapangan usaha Kabupaten Balangan bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa kategori-kategori lapangan usaha yang masuk dalam kelompok maju dan tumbuh pesat adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kemudian, untuk kelompok kategori berkembang terdiri dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, kategori real estat, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori Jasa lainnya. Sementara itu, tidak ada kategori lapangan usaha di Kabupaten Balangan yang masuk dalam kelompok kategori maju tapi tertekan. Terakhir adalah kelompok kategori tertinggal, yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, kategori konstruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori jasa perusahaan, kategori jasa pendidikan, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Gambar 2.9 Pengelompokan Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Balangan Berdasarkan Tipologi Kelas Tahun 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

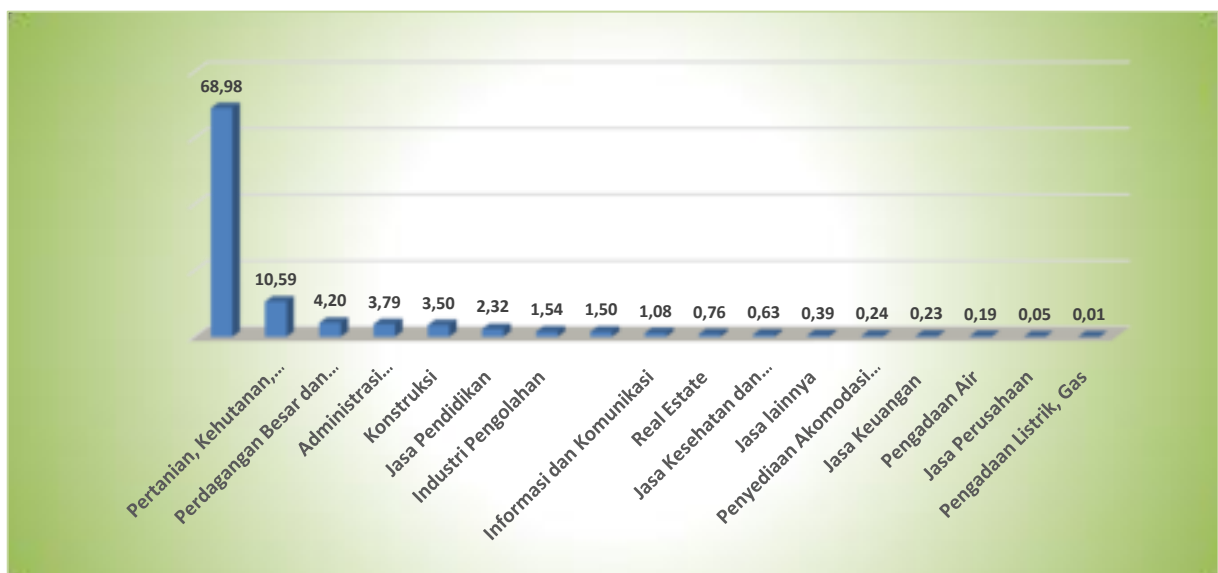
Dari hasil analisis di atas, dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Balangan di masa mendatang antara lain dapat dilakukan strategi pengembangan secara bertahap yang dibagi dalam beberapa periode dan skala prioritas dari ketujuh belas kategori lapangan usaha tersebut. Menurut periode waktunya, misalnya dapat dilakukan pengembangan dalam tiga tahap yakni prioritas pengembangan ekonomi untuk jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun), dan jangka panjang (10-25 tahun).

Untuk periode jangka pendek, pemerintah Kabupaten Balangan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kelompok kategori lapangan usaha yang sudah maju menjadi lebih maju lagi. Jangka menengah, pemerintah perlu mengupayakan kelompok kategori lapangan usaha berkembang menjadi sektor maju dengan memperbesar porsi outputnya pada perekonomian Kabupaten Balangan. Kemudian, menjadikan kelompok kategori lapangan usaha tertinggal menjadi kelompok kategori lapangan usaha berkembang. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok kategori lapangan usaha tertinggal, sehingga ditemukan solusi yang tepat untuk kebijakan pengembangan kelompok kategori lapangan usaha tersebut.

Identifikasi potensi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan kategori lapangan usaha dalam perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya. Meskipun begitu, secara spesifik struktur perekonomian yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing kategori lapangan usaha tadi mempunyai korelasi dan ketergantungan yang komprehensif dalam berproduksi. Secara umum, struktur perekonomian menggambarkan besarnya kontribusi/peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur perekonomian juga dapat mencerminkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah.

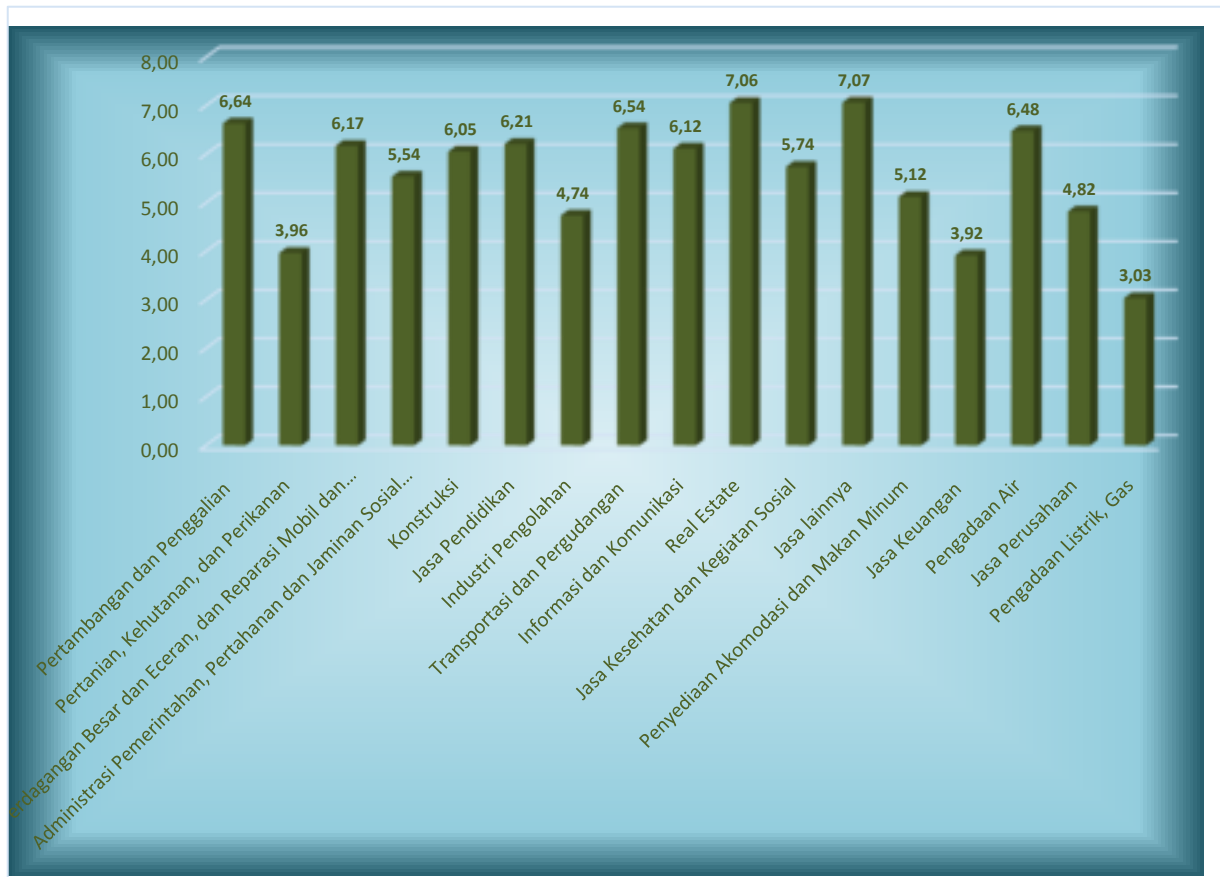
Selama periode tahun 2012-2014, dari ketujuh belas kategori lapangan usaha yang terangkum dalam PDRB, terdapat beberapa kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Kabupaten Balangan. Lima diantaranya adalah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori lapangan usaha konstruksi. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah.

Gambar2.10 Peranan Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kab. Balangan, 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Gambar 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Lapangan Usaha dalam Perekonomian Kab. Balangan, 2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB 2010-2014, diolah

Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi yang terbesar diantara kategori-kategori lapangan usaha lainnya dalam perekonomian di Kabupaten Balangan. Selama kurun 2012-2014, kategori ini secara rata-rata berkontribusi sebesar 69,62 persen per tahun. Walaupun sangat dominan dalam perekonomian di Kabupaten Balangan, kategori lapangan usaha ini cenderung berkonsentrasi pada usaha yang berskala besar sehingga peningkatan ekonomi pada kategori ini kurang banyak dirasakan oleh masyarakat. Kategori ini dalam kurun waktu 2012-2013 mampu tumbuh secara rata-rata sebesar 7,99 persen per tahunnya.

Kontribusi terbesar kedua berasal dari kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 10,66 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 3,97 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar ketiga berasal dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 4,04 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 7,23 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.



Kontribusi terbesar keempat berasal dari kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,53 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 5,62 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Kontribusi terbesar kelima dalam PDRB Kabupaten Balangan berasal dari kategori lapangan usaha konstruksi. Selama kurun waktu 2012-2014, kategori ini yang mampu menyumbang secara rata-rata sebesar 3,36 persen per tahunnya. Pertumbuhan kategori ini secara rata-rata mencapai 6,03 persen per tahun dalam kurun waktu 2012-2014.

Selama periode tahun 2012-2014, kategori lapangan usaha yang menjadi andalan di Kabupaten Balangan mulai mengalami pergeseran secara perlahan dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 2.15. Data Kemiskinan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2010	112.430	8.702	7,74
2	2011	114.009	8.334	7,31
3	2012	117.248	8.003	6,86
4	2013	119.171	7.383	6,17
5	2014	122.044	7.660	6.29

Sumber Data : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2008 sampai tahun 2013, persentase angka kemiskinan menurun cukup signifikan. Namun pada 2014 terjadi kenaikan persentase angka kemiskinan yaitu dari 6,17% ditahun 2013 menjadi 6,29%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin relatif disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Balangan yang cukup tinggi dan ditambah dengan migrasi penduduk dari luar Kabupaten Balangan yang tinggi, serta adanya inflasi dan menurunnya harga jual batubara dan karet yang menjadi tumpuan penghasilan masyarakat Kabupaten Balangan.



Beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda), Pamsimas, PNPM Mandiri Perdesaan, Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan untuk Lahan dan Air, Bantuan Alat dan mesin serta sarana produksi pertanian/perkebunan dan lain-lain yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Balangan perlu lebih dipertajam dan dikoordinasikan agar lebih tepat sasaran.

b. Angkatan Kerja dan Produktivitas

**Tabel 2.16. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	37.262	37.865	36.226
SMTP	13.630	12.943	7.840
SMTA Umum	8.184	9.341	10.728
SMTA Kejuruan	1.447	2.245	3.893
Diploma	901	1.109	1.090
Universitas	2.583	2.607	5.216
Jumlah	64.007	66.110	64.993

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015 (Agustus)

Ditinjau dari sektor ketenagakerjaan, tiga perempat penduduk bekerja di Balangan memiliki lapangan pekerjaan utama di sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 75,35 persen. Sementara sektor tersier dan sekunder menyerap tenaga kerja masing-masing 20,71 dan 3,95 persen.

**Tabel 2.17 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Lapangan Usaha	2013	2014	2015
Pertanian	45.953	46.801	33.129
Pertambangan	963	1.143	2.452
Industri	1.499	655	1.895
Listrik, Gas & Air		236	279
Bangunan	958	1.360	2.053
Perdagangan	5.905	8.532	10.498
Angkutan	781	658	1.194
Keuangan	390	254	861
Jasa	5.818	5.588	9.831
Jumlah	62.267	65.227	62.192

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015 (Agustus)



**Tabel 2.18 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jam Kerja
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Jam Kerja	2013	2014	2015
0	2.121	1.084	2.162
1-9	3.886	3.177	3.717
10-14	6.395	5.315	4.253
15-24	27.403	21.744	12.702
25-34	11.202	13.805	19.570
35-44	5.872	8.769	7.393
45-59	3.738	6.743	6.155
>60	1.650	4.590	6.240
Jumlah	62.267	65.227	62.192

Sumber : BPS, SakernasTahun2013-2015 (Agustus)

Dilihat dari optimalisasi jam kerja, sebagian besar pekerja (78,51 persen) memiliki jam kerja kurang dari 35 jam setiap minggunya dan sebagian besar pekerja dengan jam kerja dibawah 35 jam/minggu ini adalah pekerja perempuan. Sementara 18,08 persen memiliki jam kerja 35 jam atau lebih selama seminggu dan di dominasi oleh pekerja laki-laki

Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2015 adalah 4,31 persen, terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2014 yang berkisar 1,34 persen. Kenaikan TPT ini diduga disebabkan oleh kelesuan di sektor pertambangan yang ditandai dengan banyaknya pemutusan kerja (PHK) pada perusahaan tambang di Kabupaten Balangan, serta rendahnya harga jual hasil kebun seperti karet. Selain itu banyaknya lulusan perguruan tinggi yang baru menyelesaikan pendidikannya yang belum mendapatkan peluang kerja yang sesuai.

Dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Selatan, angka pengangguran Balangan termasuk yang paling kecil. Kecilnya TPT tersebut tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal.

Rendahnya tingkat pengangguran juga tidak terlepas dari karakteristik Balangan sebagai wilayah agraris yang sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Selain itu juga terkait dengan mayoritas pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yang memiliki tingkat keluwesan relatif lebih dibandingkan pekerja formal.



**Tabel 2.19 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015**

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015
Maksimum SD	2,32	0,33	1,42
SMTP	4,67	1,82	5,43
SMTA Umum	2,93	2,79	10,22
SMTA Kejuruan			8,73
Diploma		23,53	18,81
Universitas			4,18
Total	2,72	1,34	4,31

Sumber : BPS, (Agustus) data diolah

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan tahun 2015 adalah 4,31 persen ditinjau dari angkatan kerja, persentase terbanyak penganggur terbuka adalah penduduk dengan pendidikan tertinggi SMTA baik Umum maupun Kejuruan yaitu berkisar 18,95 persen dan Diploma yaitu berkisar 18,81 persen. Sementara yang berpendidikan SD ke bawah sekitar 1,42 persen dan sebanyak 4,18 persen adalah berpendidikan Universitas (S1), serta pendidikan SMPT sebanyak 5,43 persen. Kemudian jika ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran masih didominasi oleh laki-laki yaitu sekitar 5,05 persen sedang perempuan Cuma 3,28 persen.

**Tabel 2.20 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015 (%)**

JenisKelamin	2013	2014	2015
Laki-Laki	3,47	0,99	5,05
Perempuan	1,74	1,77	3,28
Jumlah	2,72	1,34	4,31

Sumber : BPS, data diolah

c. Agama

Agama dan sosial budaya menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam mendukung pelaksanaan pembangunan fisik/material. Setiap individu, keluarga dan masyarakat bebas mengekspresikan kehidupan beragamanya ataupun kepercayaannya. Sebagai makhluk sosial warga masyarakat bebas untuk berserikat atau berkumpul. Hal ini sudah dijamin oleh undang-undang.

Masyarakat di Kabupaten Balangan merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Tercatat sebanyak 114.027 orang beragama Islam. Sedangkan tempat peribadatan berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Agama, jumlah sarana peribadatan tahun 2013 terdiri dari 128 mesjid, 360 langgar/musholla, 10 gereja, 1 pura, 5 wihara dan 17 balai adat.



2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pengembangan sarana pendidikan dilakukan sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh penduduk seoptimal mungkin dan pemerataan penyebaran jumlah penduduk yang akan dilayani dan perkiraan tingkat kebutuhan yang telah ditetapkan. Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Kabupaten Balangan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum.

a. Perkembangan Sarana Pendidikan

Jumlah dan kualitas serta sebaran sekolah di Kabupaten Balangan sangat menentukan kualitas dari proses belajar mengajar, karena hal tersebut berpengaruh terhadap komposisi siswa di tiap sekolah.

**Tabel 2.21 Perkembangan Sarana Pendidikan di Kabupaten Balangan
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015 (buah)**

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TK	76	76	76	106	113	121
SD	159	159	167	169	172	174
SLTP	23	23	23	23	23	24
SMU	9	9	9	10	14	14

Sumber : Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015

Jika dilihat pada Tabel 2.21. perkembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitas meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Untuk Taman Kanak-kanak dari 76 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 121 buah pada tahun 2015, Sekolah Dasar 159 buah pada tahun 2010 menjadi 174 buah tahun 2015. Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) pada tahun 2010 berjumlah 23 buah meningkat menjadi 24 buah pada tahun 2015, dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari 9 buah pada tahun 2010 meningkat menjadi 14 buah pada tahun 2015.



Tabel 2.22. Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Balangan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010-2015

Jenjang	Tahun (buah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TK	2.683	2.683	2.683	3.863	4.560	4.736
SD	15.968	16.373	16.261	15.577	12.891	12.447
SLTP	2.723	5.322	5.321	4.893	2.960	3.029
SMU	2.209	3.336	3.683	3.676	2.855	3.103

Sumber : Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Balangan, IPM Tahun 2015

Tabel 2.23 Rasio Murid-Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid-Kelas	Rasio Murid-Guru
Taman Kanan-Kanan (TK)	39	19	15
SD / Sederajat	67	12	8
SLTP / Sederajat	137	26	9
SMU / Sederajat	202	26	9

Sumber : Dinas Pendidikan & Kemeag Kab. Balangan, IPM Tahun 2015

Berdasarkan tabel 2.17 dan 2.18 di atas menunjukkan bahwa pada peningkatan jumlah murid terjadi hanya pada tingkatan TK yaitu dari 2.683 murid tahun 2012 menjadi 3.863 pada tahun 2013, yang berarti ada peningkatan jumlah murid sebesar 1.180 orang. Peningkatan jumlah murid yang cukup banyak ini jika dilihat berdasarkan data sementara juga diikuti oleh penambahan jumlah TK dan ruang kelas.

Jika dilihat berdasarkan rasionya, untuk rasio murid-sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, terbanyak adalah SMU/Sederajat yaitu 1:229,8 artinya 1 sekolah terdapat \pm 230 murid sedangkan rasio yang paling sedikit adalah di Taman Kanak-Kananyaitu 1:37,5 (1 sekolah menampung \pm 36 murid).

Sedangkan untuk rasio murid-kelas menunjukkan bahwa SMU/Sederajat mempunyai rasio yang tertinggi yaitu 1:26,07 yang berarti satu kelas dapat menampung \pm 26 orang murid. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sedangkan rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar, terbanyak adalah di tingkat TK yaitu 1:11,85 (1 guru mengajar \pm 12 murid).



b. Indeks Pendidikan

1) Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Kemampuan ini dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu, agar paling tidak memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada tahun 2013, secara rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Balangan yang dapat membaca dan menulis sebesar 96,73 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sekitar 69 persen penduduk Balangan yang berusia 15 tahun keatas, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Balangan sudah dapat menikmati pendidikan dengan baik, hanya 3,27 persen penduduk yang diindikasikan buta huruf.

Angka melek huruf Balangan jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan tergolong cukup baik walaupun masih lebih rendah. Pada tahun 2013, pencapaian angka melek huruf provinsi Kalimantan Selatan adalah 97,18 persen. Angka melek huruf terendah adalah kabupaten Barito Kuala dengan 94,19 persen. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) yaitu pada angka 95,66 persen di tahun 2012 menjadi 96,73 persen pada tahun 2013 yang sangat signifikan berpengaruh terhadap angka IPM kab. Balangan.

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk suatu daerah di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalaninya. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan tahun 2013 masih berkisar sebesar 7,05 tahun. Dengan kata lain rata-rata penduduk di Kabupaten Balangan baru mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Sama kondisinya dengan capaian angka harapan hidup dan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Balangan masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah provinsi sebesar 8,01 tahun, bahkan angka rata-rata lama sekolah Balangan merupakan yang terendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di Kabupaten Balangan perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama di era otonomi sekarang ini.



c. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan

Pendidikan diharapkan dapat mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam membangun daerah. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM, agar SDM dari daerah Balangan dapat menjadi manusia seutuhnya, sehat jasmani-rohani, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas SDM yang demikian ini menjadi sasaran pembangunan di bidang pendidikan. SDM Kabupaten Balangan diharapkan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain di bursa kerja dan dalam kancah dunia usaha. Adapun Indikator capaian pembangunan bidang pendidikan kabupaten Balangan terdiri dari: angka partisipasi Kasar/APK, Angka partisipasi murni/APM, Nilai rerata UN, Angka mengulang, dan Angka putus sekolah, serta Angka kelulusan.

Angka Partisipasi Kasar/APK merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2013, APK SD mencapai 105,79. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjang SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun bahkan lebih atau kurang. Jika dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA. dibandingkan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa APK perempuan sedikit lebih rendah dibanding APK laki-laki kecuali pada tingkat SMA.. Semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat bahwa APK cenderung menurun. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA nilai APK di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan bahwanya sebagian dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut dan kemungkinan sisanya sedang sekolah pada jenjang pendidikan di bawahnya/di atasnya atau bahkan putus sekolah. Oleh karena itu, untuk memperjelas lagi arti APK diperlukan indikator APM dan APS

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut teori, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK-nya dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APK mencapai 105,79 persen sementara APM 92,67 persen. Selisih 13,12 persen memiliki arti bahwa diantara murid SD/ sederajat sebanyak 13,12 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APM SMP pada 2013 mencapai angka 61,67 persen sedangkan APKnya mencapai 79,87 persen. Ini artinya hanya 61,67 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sisanya bisa terserap pada jenjang pendidikan SD, SMU, atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih 18



persen dapat diartikan sebagai jumlah murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun. Begitu pula untuk jenjang SMU (16-18 tahun), terdapat selisih sebesar 21 persen siswa SMU yang berusia diatas 18 tahun atau dibawah 15 tahun. Hal ini dimungkinkan karena banyak anak yang bersekolah lebih dini dari anak lain, atau sebaliknya.

Tabel 2.24. Indikator Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

No	Indikator	Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1	Angka Partisipasi Kasar/APK (%)	116,99	90,78	78,33	112,80	90,78	81,58	115,55	97,60	82,66
2	Angka Partisipasi Murni/APM (%)	96,27	64,13	40,44	96,27	64,13	43,88	87,47	60,60	47,71
3	Nilai rerata UN	6,45	6,24	7,07	6,06	6,50	6,28	6,26	6,45	6,24
4	Angka mengulang (%)	6,48	0,24	0,52	6,48	0,24	0,24	0,24	0,28	0,25
5	Angka putus sekolah (%)	0,43	0,64	0,33	0,43	0,64	0,64	0,09	0,85	0,25
6	Angka kelulusan (%)	98,93	92,63	91,81	100	99,88	98,06	100	98,99	96,76

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Balangan Tahun 2016, BDA tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.24 terlihat angka angka putus sekolah pada SLTA mengalami peningkatan yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2013 menjadi 0,57 persen di tahun 2014. Namun pada tingkatan SD angka putus sekolah justru mengalami penurunan yang signifikan dari 0,43 pada tahun 2013 menjadi 0,10 pada tahun 2014. Di sisi lain untuk APK, APM, dan rata-rata nilai UN secara umum mengalami peningkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari data yang ada seharusnya dikaji lebih mendalam sehingga kondisi data lebih stabil dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

2.3.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai.



Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat. Jika dilihat pada Tabel 2.25. menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012.

Tabel 2.25 Perkembangan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2010-2015(Orang)

Tenaga Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter	30	30	32	31	36	30
Perawat	161	129	245	238	227	246
Bidan	117	128	215	200	199	215
Jumlah	308	287	492	469	462	491

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.25, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 30 orang dokter. Dengan jumlah penduduk Balangan sebanyak 119.171 jiwa, maka berarti terdapat sekitar 1 dokter untuk melayani setiap 3.310 penduduk. Angka ini masih relatif tinggi, sehingga hal ini harus menjadi salah satu prioritas untuk peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Selain tenaga dokter, terdapat pula tenaga kesehatan lainnya seperti bidan dan perawat. Jumlah perawat mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 238 orang menjadi 227 orang perawat pada tahun 2014. Secara rata-rata dari jumlah tenaga kesehatan tersebut dapat melayani 524 jiwa per satu orang tenaga kesehatan pada tahun 2014.

Berdasarkan penolong kelahiran pertama dan penolong terakhir bayi, pada tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan pada penggunaan jasa tenaga medis dibandingkan tahun 2012. Hal ini ternyata tidak berkorelasi nyata dengan menurunnya jumlah tenaga kesehatan di tahun 2014. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut ini.

Tabel 2.26. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Tahun 2014 dan 2015

Penolong Kelahiran	Kelahiran 2014		Kelahiran 2015	
	Pertama	Pertama	Pertama	Terakhir
Tenaga Medis	87,63	87,63	95,9	95,9
Dukun Bersalin	12,37	12,37	4,09	4,09
Famili/Keluarga	-	-	-	-
Total	100,00	100,00	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan Tahun 2016



Tabel 2.27. Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Balangan Tahun 2009-2015 (buah)

Fasilitas Kesehatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	1
Puskesmas	10	11	11	11	11	11	12
Pustu	27	26	22	23	24	24	23
Poskesdes	15	93	93	94	99	105	107
Polindes	49	-	-	-	-	-	-
Jumlah	102	131	136	137	138	141	143

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2016

Untuk fasilitas kesehatan pada saat ini di setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pada Tahun 2008 telah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balangan yang telah didukung dengan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif kepada masyarakat Balangan khususnya dan masyarakat luar Kabupaten Balangan pada umumnya. Jumlah fasilitas pada tahun 2015 terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2014, peningkatan yang cukup menonjol adalah pada Poskesdes dari 99 buah menjadi 105 buah.

Penambahan fasilitas kesehatan dan tenaga medis ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan derajat kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Data Demografi	Tahun						Ket.
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah Kematian Bayi	49	32	20	41	46	36	orang
2	Jumlah Kematian Ibu	6	2	5	2	7	6	orang
3	Rata-rata Angka Harapan Hidup	-	62,02	62,32	62,50	66,65		tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Balangan, BDA tahun 2016

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi pada tahun 2014 berjumlah 46 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang berjumlah 41 orang. Jumlah kematian ibu meningkat pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Sedangkan angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Balangan tahun 2013 sebesar 62,50 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 sebesar 62,32 tahun.

Secara perlahan terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa angka ini masih sangat jauh dari angka ideal harapan hidup waktu lahir seseorang di mana nilai tertinggi adalah 85 tahun. Angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan angka harapan hidup provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 66,37 tahun.



Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten/kota, maka Kabupaten Balangan menempati urutan terendah dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan AHH tersebut dapat dihitung indeks kesehatan Balangan, dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan, pada tahun 2013, indeks kesehatan Kabupaten Balangan berkisar pada angka 62,50 persen. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24 berikut.

Tabel. 2.29 Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2010-2014

No	Tahun	Balangan	Kalimantan Selatan
1	2010	71,31	71,77
2	2011	71,46	72,12
3	2012	71,61	72,48
4	2013	71,72	72,85
5	2014	71,77	73,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, indeks kesehatan Kabupaten Balangan termasuk dalam kategori sedang yang tidak terpaut terlalu jauh dari indeks kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan pembangunan pada program ini selain melalui peningkatan jumlah prasarana juga dengan memperluas jumlah akseptor terhadap program KB telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tercapainya masyarakat yang sejahtera melalui perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran adalah tujuan dari pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Jumlah akseptor KB Baru di Kabupaten Balangan relatif merata di setiap kecamatan, terbanyak terdapat pada kecamatan Lampihong yaitu sebanyak 1.234 orang, kemudian Kecamatan Juai sebanyak 682 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Awayan yang hanya 288 orang.

Tabel. 2.30. Banyaknya Akseptor KB Baru Menurut Pemakaian Jenis Alat Kontrasepsi Per Kecamatan Tahun 2015

DAERAH	Jenis Alat Kontrasepsi							Jumlah
	IUD	Pil	Kondom	Suntikan	Implant	MOP	MOW	
Lampihong	-	697	-	78	16	-	2	238
Batumandi	-	180	-	80	22	-	1	283
Awayan	4	159	-	46	12	-	-	221
Tebing Tinggi	-	71	-	29	25	175	43	343
Paringin	10	283	7	128	13	-	-	441
Paringin selatan	4	108	-	48	23	3	6	192
Juai	-	154	1	55	17	-	-	227
Halong	1	205	-	85	28	-	5	324
JUMLAH	19	1.302	8	549	156	178	57	2.269

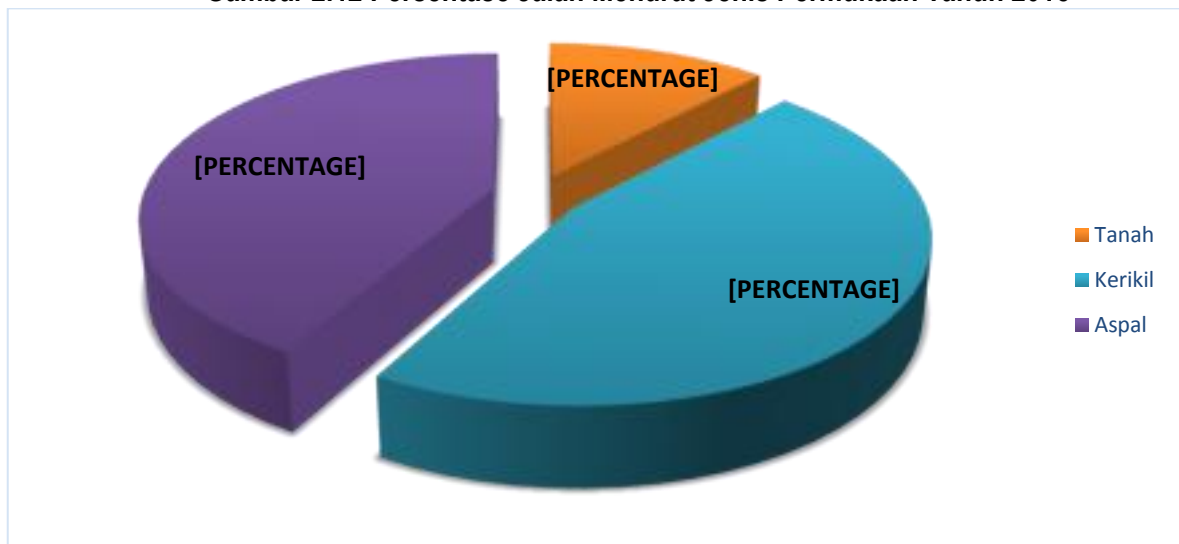
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2015

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Perhubungan

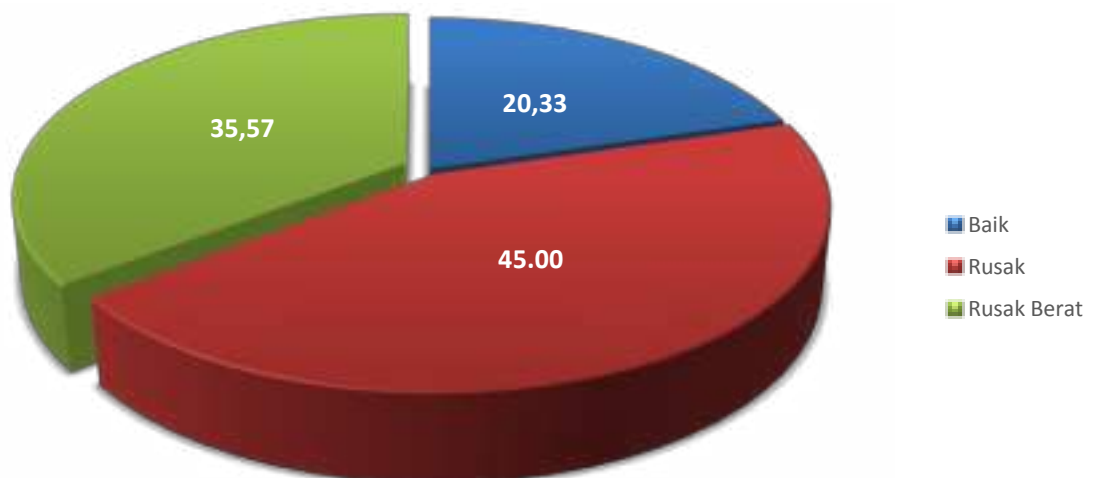
Aktivitas masyarakat sehari-hari memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah jalan sebagai sarana mobilitas daerah masyarakat dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai salah satu kabupaten yang sedang giat melakukan pembangunan, Kabupaten Balangan terus membangun jalan dan jembatan baru dan meningkatkan kualitas jalan jembatan yang telah ada. Pada tahun 2013, total panjang jalan di wilayah kabupaten Balangan yang merupakan wewenang kabupaten sepanjang 601,500 km. Dari panjang tersebut, sebesar 42,00 persen memiliki permukaan aspal, sedangkan 43,41 persen masih merupakan permukaan kerikil. Sedangkan sisanya yakni sebesar 14,59 persen adalah permukaan tanah. Secara umum kondisi jalan di Balangan adalah rusak ringan yaitu sebesar 55,95 persen. Hanya sekitar 20,82 persen dari total panjang jalan yang berkondisi baik (BPS, 2014).

Gambar 2.12 Persentase Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2015



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016

Gambar 2.13 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2015



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2016



Sebagai daerah pegunungan yang topografinya bergelombang disertai banyaknya Daerah Aliran Sungai, menyebabkan diperlukannya banyak jembatan sebagai sarana penghubung transportasi darat. Diantaranya telah dibangun jembatan baru di jalan lingkar timur yang menghubungkan Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan dengan Gunung Pandau Kecamatan Paringin.

Tabel 2.31. Jumlah Jembatan berdasarkan Jenis dan Kondisi di Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2014 (dalam buah)

Jenis	Tahun 2014				Tahun 2015			
	Jumlah	Kondisi			Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat		Baik	Rusak Ringan	Rusak berat
Beton	15	13	2	-	16	15	1	-
Baja	28	23	4	1	28	21	5	2
Box Culvert	82	64	15	3	191	138	53	-
Kayun Ulin	347	75	195	77	286	72	72	142
Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	472	175	216	81	521	246	131	144

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2015

Untuk memperlancar arus distribusi barang, dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Balangan, selain meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, telah dibangun juga sarana angkutan, yaitu terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Mulai tahun 2016 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin. Tahun 2017 nanti akan disusun Perencanaan untuk rencana pembangunan terminal baru Balangan.

2.4.2 Pos dan Telekomunikasi

Dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat berupa kegiatan pengiriman dan penerimaan benda-benda pos, seperti surat menyurat, paket pos, wesel, giro, dan tabungan, telah didukung dengan keberadaan 1 buah Kantor Pos Kabupaten, 4 buah Kantor Pos Pembantu dan 3 buah rumah Pos. Kantor Pos berlokasi di Kecamatan Paringin sedangkan kantor pos pembantu tersedia di Kecamatan Lampihong, Juai, Batu Mandi dan Awayan sedangkan rumah pos berlokasi di Kecamatan Halong, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Tebing Tinggi. Pada saat ini selain kantor pos, juga sudah tersedia fasilitas sambungan telepon (*fixed telephone*) dari Telkom beserta layanan jaringan dari PT. Telkomsel, Indosat, dan Exelindo.



Tabel 2.32. Fasilitas Pelayanan Pos Dirinci Menurut Kecamatan

Kecamatan	Kantor Pos	Rumah Pos
Lampihong	1	-
Paringin	1	-
Juai	1	-
Halong	-	1
Batu Mandi	1	-
Paringin Selatan	-	1
Awayan	1	-
Tebing Tinggi	-	1
Jumlah	5	3

Sumber : Balangan dalam Angka 2015

2.4.3. Air Minum

Dalam pemenuhan kebutuhan Air penduduk Kabupaten Balangan tercukupi dari air sumur, sungai dan PDAM. Air sungai merupakan sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Kabupaten Balangan terdapat dua sungai utama, yaitu Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Padahal sungai-sungai tersebut merupakan sungai tadah hujan sehingga debitnya sangat tergantung pada musim. Pada musim kemarau debit sungai kecil, sungai menjadi dangkal bahkan sampai terlihat dasar sungainya. Sebaliknya di musim hujan debit sungai itu menjadi besar, arusnya menjadi deras, dan air sungai menjadi sangat keruh akibat pengerosian dari tebing-tebing sungai. Tabel 2.30. dan 2.31. menunjukkan data air minum yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.32. Banyaknya Produksi Air, Distribusi, Terjual dan Hilang/Susut dalam Penyaluran

Kecamatan	IKK/IPA	Produksi (m ³)	Distribusi (m ³)	Terjual (m ³)	Susut/Hilang (m ³)
Lampihong	IKK	277.865	277.865	232.820	45.045
Batumandi	IKK	162.780	162.780	139.494	23.286
Awayan	IKK	106.671	106.671	91.698	14.973
Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
Paringin	IPA	1.658.863	1.658.863	1.383.706	275.157
Paringin Selatan	IKK	33.636	33.636	30.090	3.546
Juai	IKK	285.762	285.762	254.047	31.715
Halong	IKK	127.190	127.190	105.758	21.432
Jumlah		2.652.767	2.652.767	2.237.613	415.154

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan, BDA Tahun 2014



**Tabel 2.33. Kapasitas Produksi Terpasang PDAM Kabupaten Balangan
Tahun 2007-2014 Tahun (Ltr/dtr)**

No.	Unit PDAM	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Paringin								
	a. Paringin I	10.0	10.0	10.0	10.0	10	10	10	10
	b. Paringin II	30.0	30.0	80.0	80.0	150	150	150	150
	c. Paringin III	15.0	15.0	15.0	15.0	45	45	45	45
2.	Halong	10.0	10.0	10.0	10.0	30	30	30	30
3.	Juai	5.0	5.0	5.0	5.0	60	60	60	60
4.	Lampihong	5.0	5.0	5.0	5.0	40	40	40	40
5.	Batu Mandi	10.0	10.0	10.0	10.0	15	15	15	15
6.	Awayan	12.5	12.5	12.5	12.5	30	30	30	30
7.	Paringin Selatan	-	-	-	-	20	40	40	40
8.	Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	20	20
Jumlah		97.5	97.5	187.5	187.5	400	420	440	440

Sumber : PDAM Kabupaten Balangan Tahun 2014

2.1.15. Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan setiap tahunnya meningkat, hingga pada Tahun 2013 jumlah pelanggan listrik sudah mencapai 23.453 pelanggan (tidak termasuk Kecamatan Batu Mandi). Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan sebagian besar dipenuhi oleh PT. PLN Cabang Tanjung Wilayah Ranting Paringin. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.28. berikut ini.

**Tabel 2.34. Banyaknya Pelanggan Listrik, VA Terpasang dan KWH Terjual Menurut Jenis Tarif
Tahun 2014**

NO	Jenis Tarif	Pelanggan	VA Terpasang	KWH Terjual
1	S (1,2,3)	795	818.750	1.133.984
2	R (1,2,3,4)	22174	13.971.850	23.885.822
3	B (1,2)	277	768.650	895.656
4	I (1,2,3,4)	9	373.500	1.197.413
5	P (1,2,3)	198	1.525.400	3.227.751
JUMLAH		23.453	17.458.150	30.340.626

Sumber: PT. PLN Ranting Paringin, BDA Tahun 2015

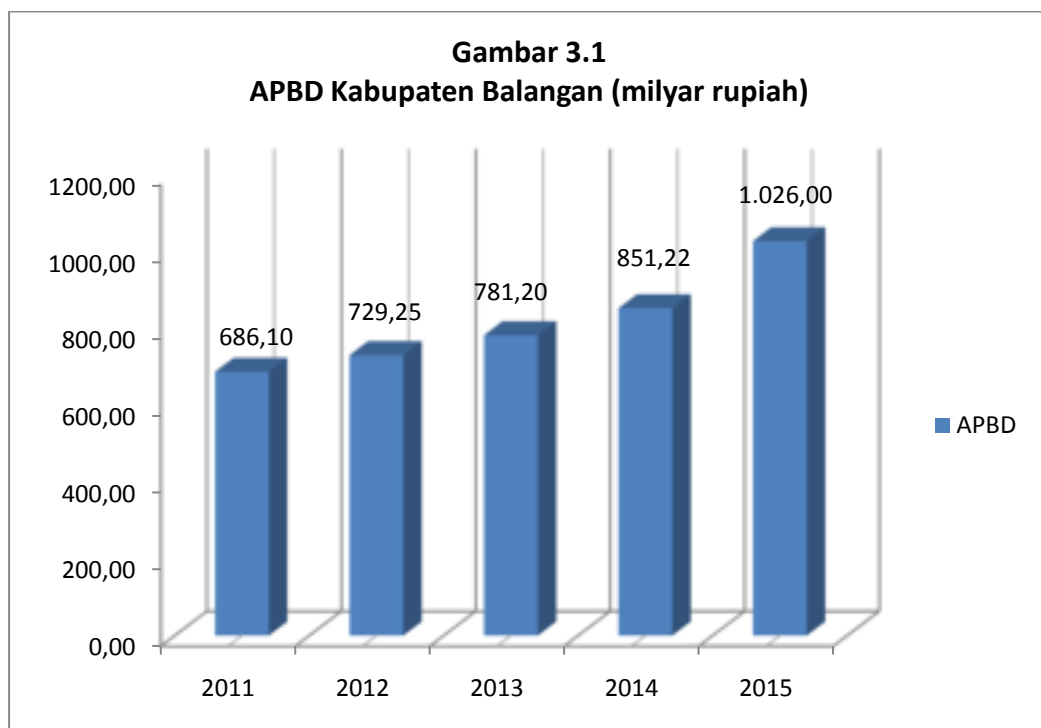
BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

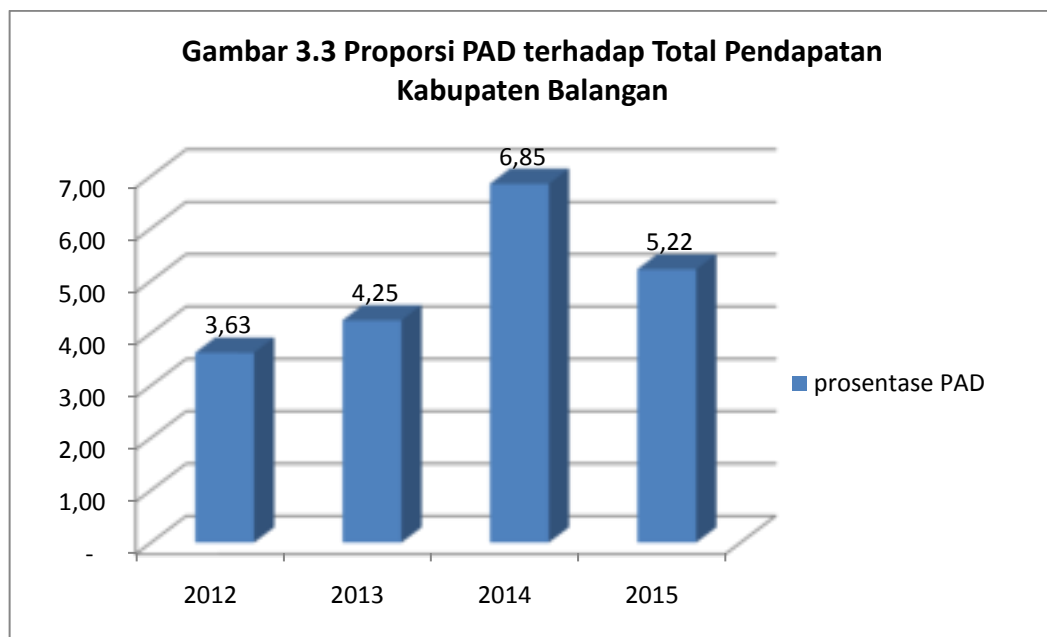
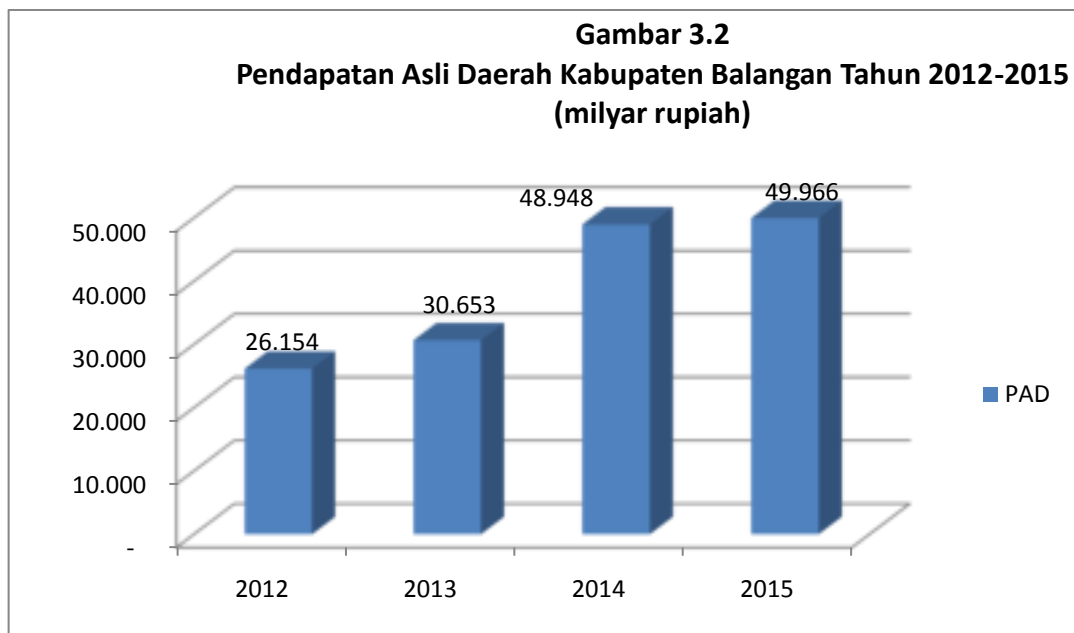
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, APBD Balangan mengalami peningkatan hampir 90 persen. Jelasnya kinerja APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data Primer yang diolah

Dari sisi volume terus meningkat, namun dari sisi pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, maka hal ini menunjukkan indikasi bahwa APBD Kabupaten Balangan belum mencerminkan APBD yang memiliki kemandirian. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah hanya berkisar antara 3,5 sampai 6,0 persen. Jelasnya tentang PAD dapat dilihat pada gambar 3.2 dan 3.3.



3.1.2. Neraca Daerah

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD.

Aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam satu tahun anggaran. Dalam konsep anggaran kinerja, biaya



yang dikeluarkan adalah semua biaya yang menjadi masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan aset ini. Dengan demikian, termasuk di dalamnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, selain dari belanja modal tentunya. Jadi, *cost* untuk aset adalah seluruh pengeluaran untuk mencapai *outcome*. Aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD, dalam hal ini, perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah, baik anggaran belanja modal maupun belanja pegawai dan belanja barang & jasa; misalnya aset yang diterima dari pihak lain, seperti lembaga donor dan masyarakat.

Dalam pengelolaan isu yang terkait dengan aset mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan, harus terus menerus mendapatkan perhatian dan perbaikan sehingga pengelolaan aset di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan dengan baik. Rekapitulasi aset Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2015 disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Aset Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2014-2015

No	Tahun Perolehan	Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung dan Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap lainnya (Rp)	Konstruksi Dalam Pengerjaan (Rp)
1	2014	174.743.449.417,00	174.102.493.436,00	668.031.034.398,87	734.248.247.738,00	4.919.163.063,00	33.057.989.863,00
2	2015	175.781.662.417,00	195.566.309.466,00	734.917.385.035,00	930.973.888.126,00	5.119.280.246,00	20.019.527.963,00

Sumber : DPPKAD Kab Balangan Tahun 2016

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 rata-rata rasio persentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran hanya sekitar 32 persen seperti dirinci pada tabel 3.2. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Balangan relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi total pengeluaran dalam APBD.



Tabel 3.2.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) X 100 %
1	TA 2013	241.925.186.071,00	769.797.309.551,70	31,43
2	TA 2014	271.819.036.433,00	841.281.648.478,50	32,31
3	TA 2015	287.474.130.373,24	891.339.631.015,24	32,25

Sumber: Data Primer diolah.

.2.2. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan APBD Kabupaten Balangan sejak Tahun Anggaran 2013 sampai 2015 ternyata defisit riil anggaran Kabupaten Balangan dapat ditutup dari SILPA Tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diketahui dari rata-rata proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil rata-rata di atas 100 persen, dengan SILPA selalu lebih besar dari total defisit riil. Sedangkan untuk proporsi SILPA daerah tahun sebelumnya terhadap total defisit riil setiap Tahun Anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

No	Uraian	2013	2014	2015
A	SURPLUS/ DEFISIT	27,801,173,566.80	-59,515,880,051.45	14,501,507,765.65
B	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
1	Penggunaan SILPA	266,101,697,448.86	218,196,237,808.30	91,145,375,918.35
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	
4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	
5	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	0	
7	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	
8	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0	0	
10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Koperasi)	150,000,000.00	125,000,000.00	159,375,000.00
11	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	
12	Penerimaan dari Sisa UYHD Tahun Lalu	0	0	
13	Penerimaan Piutang Pihak Ketiga	0	59,819,049.00	

Sumber : Data Primer yang diolah



3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Rata-rata pertumbuhan Belanja Operasi selama tiga Tahun Anggaran terakhir ialah sekitar 20 persen. Dari berbagai komponen Belanja, pertumbuhan rata-rata terbesar disumbangkan oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang serta belanja Hibah di tahun 2015 untuk keperluan Pemilikada. Pertumbuhan rata-rata pertumbuhan negatif dialami oleh Belanja Modal dan Belanja sosial, walaupun tidak secara signifikan.

Untuk belanja bantuan keuangan, sejak tahun 2015 sudah ditiadakan dan dialihkan kepada belanja bantuan keuangan ke desa sesuai dengan regulasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk lebih lengkapnya, data pengeluaran Kabupaten Balangan tiga tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Balangan Tahun 2013-2015

NO.	URAIAN	REALISASI		
		2013	2014	2015
A	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Pegawai	241,925,186,071.00	271,819,036,433.00	287,474,130,373.24
2	Belanja Barang	150,985,234,130.00	168,473,053,098.00	219,611,011,715.00
3	Belanja Hibah	8,066,125,000.00	9,795,903,400.00	33,172,363,536.00
4	Belanja Bantuan Sosial	2,299,735,000.00	3,373,575,000.00	2,173,575,000.00
5	Belanja Bantuan Keuangan	15,498,920,943.00	19,739,755,208.00	0.00
	Jumlah Belanja Operasi	418,775,201,144.00	473,201,323,139.00	542,431,080,624.24
B	BELANJA MODAL			
1	Tanah	5,157,294,500.00	13,570,474,500.00	385,150,000.00
2	Peralatan dan Mesin	25,372,797,480.00	23,776,329,559.00	31,543,058,775.00
3	Gedung dan Bangunan	103,378,321,930.00	97,140,680,163.00	50,868,410,096.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	140,701,239,390.00	165,559,777,426.00	208,955,918,515.00
5	Aset Tetap Lainnya	148,321,900.00	205,026,725.00	292,539,200.00
6	Aset Lainnya	0	0	147,686,750.00
	Jumlah Belanja Modal	274,757,975,200.00	300,252,288,373.00	292,192,763,336.00
C	BELANJA TAK TERDUGA			
1	Belanja Tak Terduga	407,500,000.00	153,088,779.00	233,607,855.00
	JUMLAH BELANJA	693,940,676,344.00	773,606,700,291.00	834,857,451,815.24
	TRANSFER			
D	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA	0	0	107,684,869,882.00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	693,940,676,344.00	773,606,700,291.00	942,542,321,697.24



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk proyeksi lima tahun ke depan, berdasarkan *trend linier* beberapa tahun sebelumnya maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan akan terus meningkat dengan *trend* positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Balangan memiliki potensi riil untuk lebih mandiri. Namun terdapat beberapa asumsi yang harus tetap dijaga agar asumsi APBD Kabupaten Balangan tetap sehat, antara lain : asumsi belanja pegawai, asumsi belanja modal, dan Pos Pendapatannya pada komposisi PAD lebih ditingkatkan proporsinya daripada Dana Perimbangan.

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Jelasnya proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.



Tabel 3.5 Proyeksi Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

NO. URUT	URAIAN	TAHUN					
		2016 (APBD)	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.113.027.449.020,00	1.777.410.291.100,00	2.131.561.450.502,00	2.501.493.003.941,00	2.890.185.849.048,00	3.302.089.866.950,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.187.000.000,00	47.309.900.000,00	55.043.890.000,00	61.890.579.000,00	68.414.136.900,00	76.293.550.590,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.109.000.000,00	5.619.900.000,00	6.181.890.000,00	6.800.079.000,00	7.480.086.900,00	8.228.095.590,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.418.000.000,00	2.140.000.000,00	2.557.000.000,00	3.255.000.000,00	3.350.000.000,00	4.550.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.160.000.000,00	17.000.000.000,00	21.500.000.000,00	24.550.000.000,00	27.570.000.000,00	30.500.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.500.000.000,00	22.550.000.000,00	24.805.000.000,00	27.285.500.000,00	30.014.050.000,00	33.015.455.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	923.155.858.020,00	1.563.247.341.000,00	1.892.979.205.392,00	2.237.710.234.320,00	2.599.690.302.465,00	2.981.506.765.709,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	335.025.000.000,00	896.617.806.050,00	1.126.355.240.200,00	1.356.092.674.350,00	1.585.830.108.500,00	1.815.567.542.650,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	389.434.433.000,00	447.849.597.950,00	515.027.037.642,00	592.281.093.288,00	681.123.257.281,00	783.291.745.873,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	198.696.425.020,00	218.779.937.000,00	251.596.927.550,00	289.336.466.682,00	332.736.936.684,00	382.647.477.186,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.684.591.000,00	166.853.050.100,00	183.538.355.110,00	201.892.190.621,00	222.081.409.683,00	244.289.550.651,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.393.800.000,00	60.933.180.000,00	67.026.498.000,00	73.729.147.800,00	81.102.062.580,00	89.212.268.838,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	92.090.791.000,00	101.299.870.100,00	111.429.857.110,00	122.572.842.821,00	134.830.127.103,00	148.313.139.813,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	4.200.000.000,00	4.620.000.000,00	5.082.000.000,00	5.590.200.000,00	6.149.220.000,00	6.764.142.000,00
2	BELANJA	1.025.187.793.247,00	1.742.410.291.100,00	2.146.561.450.502,00	2.516.493.003.941,00	2.905.185.849.048,00	3.317.089.866.950,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	569.503.342.291,00	626.453.676.520,00	689.099.044.172,00	758.008.948.589,00	833.809.843.448,00	917.190.827.793,00
2.1.1	Belanja Pegawai	379.896.190.335,00	417.885.809.369,00	459.674.390.306,00	505.641.829.337,00	556.206.012.270,00	611.826.613.497,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.875.305.000,00	20.762.835.500,00	22.839.119.050,00	25.123.030.955,00	27.635.334.050,00	30.398.867.455,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.297.800.000,00	3.627.580.000,00	3.990.338.000,00	4.389.371.800,00	4.828.308.980,00	5.311.139.878,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	646.700.000,00	711.370.000,00	782.507.000,00	860.757.700,00	946.833.470,00	1.041.516.817,00



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

NO. URUT	URAIAN	TAHUN					
		2016 (APBD)	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.069.796.956,00	181.576.776.651,00	199.734.454.316,00	219.707.899.747,00	241.678.689.723,00	265.846.558.696,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.717.550.000,00	1.889.305.000,00	2.078.235.500,00	2.286.059.050,00	2.514.664.955,00	2.766.131.450,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	455.684.450.956,00	1.115.956.614.580,00	1.457.462.406.330,00	1.758.484.055.352,00	2.071.376.005.600,00	2.399.899.039.157,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	87.839.655.773,00	35.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62.160.344.227,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.150.344.227,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00
3 . 1 . 7	Penerimaan kembali penyertaan modal	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(87.839.655.773,00)	(35.000.000.000,00)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2011-2015, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

- 1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014 pertumbuhan IPM Balangan adalah 0,64. Angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2013 yakni 0,53 menunjukkan kecepatan pembangunan manusia di Balangan yang cukup baik. Angka pertumbuhan IPM Balangan ini lebih kecil jika dibandingkan provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 0,68. Pada tahun 2014, pertumbuhan IPM Kabupaten Balangan menempati urutan ke-6 tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dimana pada tahun 2013 penduduk miskin di Kabupaten Balangan sebanyak 7.383 jiwa atau sekitar 6,17 % dari total penduduk Balangan Tahun 2013. Pada tahun 2014, jumlah ini meningkat menjadi 7.660 jiwa atau 6,29 persen. Secara umum, terjadinya peningkatan kemiskinan ini dikarenakan adanya penurunan harga karet yang cukup tajam dan ditambah dengan banyaknya pencari kerja yang mirasi dari daerah lain ke Kabupaten Balangan.



- 3) Daya saing produk unggulan Kabupaten Balangan secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut.
- 4) Terbatasnya akses masyarakat ke sumber permodalan, penguasaan iptek dan informasi pasar untuk menunjang kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan pengairan dan jaringan jalan pada sentra-sentra produksi.
- 5) Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, air bersih, transportasi serta pemukiman dan fasilitas umum) baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap investasi dan daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan.
- 6) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja.
- 7) Masih lemahnya penegakan hukum serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

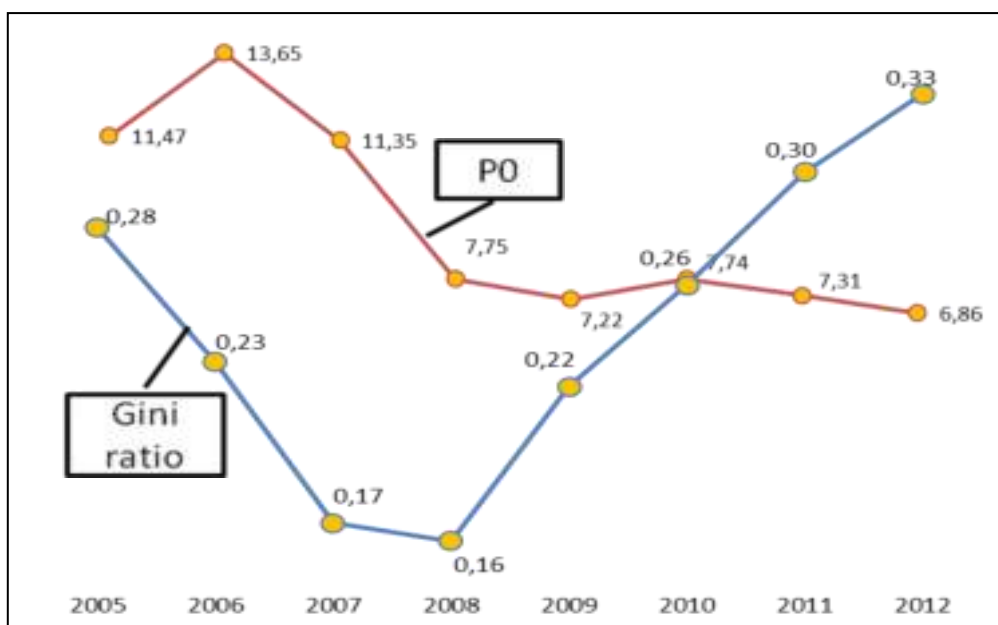
Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang tingkat kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Balangan menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten

Balangan dalam lima tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah dalam lingkup administrasi pemerintahan Kabupaten Balangan.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2011- 2015 yang fluktuatif ternyata tidak signifikan menjawab kebutuhan untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan proporsi distribusi PDRB Kabupaten Balangan hampir 80 persen masih disumbang oleh sektor Pertambangan dan penggalian yang berbanding terbalik dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang hanya berkisar antara 3-5 persen. Di sisi lain, sektor pertanian dengan sumbangan distribusi PDRB yang hanya sekitar 10 persen, tetapi memberikan lapangan kerja terbesar, yaitu mencapai 70 persen. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus menerus dilakukan yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Balangan (*inclusive growth*). Hal ini untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Balangan dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.

Pengurangan jumlah kemiskinan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan kualitas dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Grafik 4.1 Perkembangan Kemiskinan dan Gini Ratio Balangan



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014

Berdasarkan grafik 4.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2010, terlihat kemiskinan semakin menurun, namun gini ratio semakin tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi



ini merupakan salah satu pertanda bahwa pemerataan pembangunan harus lebih ditingkatkan sehingga dengan sendirinya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara umum akan lebih baik.

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur.

Di sisi lain, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, kesadaran masyarakat Kabupaten Balangan untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Penurunan jumlah penduduk miskin melalui perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan diri pada optimalisasi segenap potensi lokal.



- 3) Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah
- 4) Perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan investasi swasta
- 5) Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 6) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* dan mengedepankan *clear governance* di semua aspek serta peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
- 7) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjaga dan memelihara suasana sosial budaya masyarakat yang kondusif.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, yang ditempuh dengan 7 misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.



8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 yaitu: **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”** dengan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
10. Kalsel Sentra Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

5.1. Visi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2016–2021, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA
MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”**



Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

5.2. Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada Tabel 5.1. berikut:



Tabel. 5.1
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	MISI	TUJUAN	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2021	SASARAN	Indikator Kinerja (<i>impact/outcome</i>)	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
									2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,02	68,51	Meningkatkan kualitas pendidikan	1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6,32	7,70	7,79	7,88	7,97	8,06	12,00	12,00
						2 Angka Harapan Lama Sekolah	11,03	11,10	12,54	12,83	13,12	13,41	13,70	13,70	
						Meningkatkan kualitas kesehatan	3 Usia Harapan Hidup (daerah)	66,65	67,66	68,19	68,55	68,92	69,28	69,64	69,64
						4 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	245,00	245,00	214,00	184,00	162,00	140,00	118,00	118,00	
						5 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	14,70	14,00	13,00	12,80	12,50	12,30	12,00	12,00	
						Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja	6 Angka pengangguran terbuka	3,50	3,4	3,2	2,80	2,50	2,20	2,10	2,10
2	MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,27	6,51	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	11,48	12,40	12,50	12,75	13,00	13,39	13,79	13,79
						8 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	4,61	5,20	5,50	5,75	6,00	6,18	6,37	6,37	
						Meningkatnya nilai investasi	9 Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%)	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00
						Meningkatnya Usaha Mikro (UM)	10 Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) (%)	5,00	5,00	7,47	8,50	9,50	10,50	11,50	11,50
						Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	11 Tingkat ketersediaan pangan (PPH)	0	85,05	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,30
3	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN	Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Indeks Kualitas Infrastruktur (%)	34,21	69,02	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	12 Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	18,73	17,00	30,00	32,00	35,00	38,00	40,00	40,00
						Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	13 Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	40,55	43,00	45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	54,00
						Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan	14 Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)	83,29	86,67	88,85	91,63	94,41	97,19	100,00	100,00
						15 Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%)	78,88	82,40	85,92	89,44	92,96	96,48	100,00	100,00	
						16 Jaringan drainase dalam keadaan baik (%)	-	85,03	86,09	87,01	87,82	88,53	89,16	89,16	
						17 Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (%)	18,02	30,08	24,00	18,00	16,00	6,00	-	-	
						Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet	18 Cakupan infrastruktur telekomunikasi yang dapat diakses desa terpencil (%)	-	-	10,00	10,00	25,00	50,00	100,00	100,00



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	MISI	TUJUAN	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2021	SASARAN	Indikator Kinerja (<i>impact/outcome</i>)	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	
									2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Nilai Tukar Petani	97,518	100	Meningkatnya pendapatan petani	19	Nilai Tukar Petani	97,52	97,52	98,00	98,25	98,50	98,65	99,00	99,00
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,4	62,25	Meningkatnya mutu lingkungan hidup	20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,40	56,30	57,10	59,50	60,25	61,25	62,25	62,25
5	MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	5,74	4,01	Menurunkan angka kemiskinan	21	Angka Kemiskinan (%)	5,74	4,68	4,65	4,50	4,25	4,03	4,01	4,01
						Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	22	Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	0	5,00	10,00	17,00	30,00	35,00	40,00	40,00
						Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana	23	Indeks Resiko Bencana (%)	0	20,00	30,00	55,00	80,00	90,00	100,00	100,00
			Budaya Balangan yang terlestarikan	0	100	Meningkatnya pelestarian budaya	24	Budaya Balangan yang terlestarikan (%)	0	0	10,00	30,00	75,00	100,00	100,00	100,00
6	OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,54	94,00	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	-	-	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
						Terwujudnya pemerintahan baik	26	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	CC=53,65	B=64,3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	27	Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC(53,65)	CC(53,65)	CC(55,65)	CC(57,65)	B(60,1)	B(62,2)	B(64,3)	B(64,3)
						Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah	29	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	tinggi	tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Desa Membangun (%)	0	0,7151	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	30	Indeks Desa Membangun (%)	0	0	0,562	0,590	0,649	0,681	0,715	0,715
7	MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF	Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Angka Pelanggaran Trantibmas (%)	250	100	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	31	Angka Pelanggaran Trantibmas	250	230	200	175	150	125	100	100
			Angka konflik sosial bernuansa SARA (%)	0	0		32	Angka konflik sosial bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0	0



Tabel. 5.2
Sinkronisasi Nawacita dan Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dengan
Prioritas Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

No.	Nawa Cita Tahun 2014-219	Prioritas Daerah Prov.KALSEL Tahun 2016-2021	Prioritas Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021	Misi Kepala Daerah Kab. Balangan Tahun 2016-2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (NAWACITA 5)	KALSEL CERDAS; KALSEL SEHAT; KALSEL TERAMPIL	Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan Dan Kesehatan
2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWACITA 7)	KALSEL MENUJU DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA; KALSEL SENTRA PANGAN	Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan
3	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional (NAWACITA 6)	KALSEL DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS	Infrastruktur Yang Berkesinambungan	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkesinambungan
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (NAWACITA 7)	KALSEL MENUJU LINGKUNGAN BERKUALITAS; KALSEL MENUJU SALAH SATU DESTINASI WISATA NASIONAL	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan	Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Potensi Lokal) Berdasarkan Kearifan Lokal
5	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (NAWACITA 9)	KALSEL BERBUDAYA; KALSEL MENUJU TUAN RUMAH PON	Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Mengembangkan Sosial Budaya Masyarakat
6	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya (NAWACITA 2)	KALSEL DENGAN PEMDA BERKINERJA BAIK	Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah
7	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara (NAWACITA 1)	KALSEL AMAN	Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Mewujudkan Kamtibmas Dan Kepastian Hukum Untuk Terciptanya Suasana Yang Kondusif



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis merupakan proses mengagendakan aktivitas pembangunan, selain itu juga merancang segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik.

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan suatu rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkahlangkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi atau Prioritas Pembangunan memberikan gambaran, bagaimana berbagai sasaran pembangunan dapat dicapai melalui program-program pembangunan. Arah kebijakan merupakan jabaran rinci tahap-tahap pembangunan harus dilalui dari tahun ke tahun untuk mewujudkan visi Kabupaten Balangan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dengan efektif dan efisien. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 sebagai berikut:



Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

VISI: “ Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia “

MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan pendidikan	
		Peningkatan angka harapan lama sekolah	
	Meningkatkan kualitas kesehatan	Peningkatan pola hidup dan lingkungan yang sehat	
		Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan kesehatan	
Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tenaga kerja		
MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian	
		Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan	
	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses berinvestasi	
	Meningkatnya Usaha Mikro (UM)	Peningkatan infrastruktur dan pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro (UM)	
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan pemenuhan standar ketersediaan dan konsumsi pangan		
MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan dan jembatan	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan irigasi	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan		Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air minum
			Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air limbah
			Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan drainase
	Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet	Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komunikasi internet	
MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya pendapatan petani	Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan	
	Meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam	Peningkatan dan pemeliharaan mutu lingkungan hidup	



MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat	Menurunkan angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
	Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pelayanan dan SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana	Peningkatan infrastruktur dan SDM tanggap darurat bencana
	Meningkatnya pelestarian budaya	Peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan asli daerah
MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
	Terwujudnya pemerintahan baik	Peningkatan nilai evaluasi keuangan pemerintah daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Peningkatan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Pemda
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah	Peningkatan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
MISI VII : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Peningkatan daneliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kerukunan antar umat beragama

6.2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2016-2021, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

- a. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang tercermin dari terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Penekanan pembangunan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, pengembangan daya saing tenaga kerja Balangan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. **Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.** Untuk mewujudkannya upaya-upaya pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui ekonomi kerakyatan yang diikuti dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai agar mampu mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut diupayakan dengan melakukan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan usaha mikro, kecil dan



menengah, yang didukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan lingkungan usaha yang sehat, termasuk peningkatan investasi dan revitalisasi pertanian dalam arti luas, dan pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri) serta perbaikan iklim ketenagakerjaan.

- c. **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan** yang ditunjukkan dari meningkatnya kuantitas dan kualitas serta kemanfaatan berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana umum.
- d. **Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan** yang didasari prinsip pembangunan berkelanjutan.
- e. **Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan** sebagai objek dan subyek pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui seni budaya, olahraga, keagamaan, penanganan kemiskinan dan masalah sosial serta pencegahan dan tanggap darurat bencana;
- f. **Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah** agar dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) , penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada good governance dan clear government. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai.
- g. **Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi.** Kebijakan ini terkait dengan upaya meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di tengah masyarakat serta perlindungan dan pengakuan terhadap status warga Balangan dalam administrasi dan hukum terkait kependudukan.

Arah Kebijakan Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut



Tabel 6.2

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
1	Meningkatkan pemenuhan dan kualitas tenaga pendidik dan materi ajar di semua jenjang pendidikan
2	Meningkatkan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana belajar mengajar
3	Meningkatkan pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi daerah
4	Meningkatkan jumlah sekolah model satu atap bagi daerah terpencil
5	Meningkatkan pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi dan kebutuhan pendidikan secara merata
6	Meningkatkan angka partisipasi dan lama sekolah
7	Meningkatkan bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dari keluarga miskin
8	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mensukseskan Wajar 9 Tahun
9	Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi/ Perguruan Tinggi
10	Meningkatkan promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
11	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan sehat
12	Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
13	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara terpadu
14	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah
15	Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di semua tingkat pelayanan kesehatan
16	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan gratis
17	Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
18	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi dan balita
19	Meningkatkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
20	Meningkatkan jenis pelatihan dan Tenaga Pengajar sesuai permintaan pasar tenaga kerja dan potensi daerah
21	Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja



MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN	
22	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan Perikanan
23	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian dan Perikanan
24	Meningkatkan upaya pendampingan penyuluhan pertanian dan perikanan
25	Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
26	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa
27	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan dan jasa
28	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Investasi
29	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah
30	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wirausaha dan Koperasi
31	Meningkatkan Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro Daerah
32	Meningkatkan pemenuhan standar ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat
33	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN	
34	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
35	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Bendungan dan Jaringan Irigasi
36	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air bersih
37	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Air Limbah dan sanitasi lingkungan
38	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman
39	Meningkatkan infrastruktur dan pemeliharaan jaringan drainase
40	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Penanganan Kawasan Kumuh
41	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Media Massa di Daerah Terpencil
MISI IV : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	
42	Meningkatkan nilai jual produk pertanian dan perikanan
43	Meningkatkan kerjasama dan pemasaran hasil produk pertanian dan perikanan



44	Meningkatkan dan mempertahankan luas lahan produktif pertanian dan perikanan
45	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian dan perikanan
46	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan
47	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN	
48	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera
49	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
50	Meningkatkan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
51	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
52	Meningkatkan Bantuan dan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
53	Meningkatkan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
54	Meningkatkan pemenuhan dan kualitas SDM tanggap darurat bencana
55	Meningkatkan kegiatan pelestarian budaya asli daerah
56	Meningkatkan pengembangan dan promosi seni dan budaya asli daerah
MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	
57	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan SDM pelaksana layanan masyarakat
58	Meningkatkan penerapan standar pelayanan minimal dan Standar operasional prosedur sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat
59	Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan kebutuhan masyarakat (publik) berbasis teknologi
60	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut dari hasil laporan pemeriksaan keuangan oleh Aparat Pengawasan
61	Meningkatkan dan mempertahankan nilai hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (opini WTP dari BPK)
62	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Revitalisasi Pelaksanaan Otonomi Pemerintah Daerah
63	Meningkatkan sinkronisasi, efisiensi dan efektifitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
64	Meningkatkan upaya perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
65	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
66	Meningkatkan kualitas SDM pelaksana SPIP Pemerintah Daerah



67	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
68	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa
69	Meningkatkan peran aktif BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa
70	Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa
MISI VII : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF	
71	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta perilaku sadar hukum
72	Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas aparat satpol PP
73	Meningkatkan kegiatan operasi dan monitoring pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
74	Meningkatkan upaya penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
75	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membina dan menjaga kerukunan antar umat beragama
76	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
77	Meningkatkan bantuan dan kerjasama dengan organisasi keagamaan, Organisasi Adat dan Organisasi masyarakat

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Program pembangunan daerah lima tahun ke depan tetap terfokus pada prioritas sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
- b. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
- c. Pembangunan Infrastruktur,
- d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam (potensi lokal) berdasarkan kearifan lokal
- e. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan
- f. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
- g. Mewujudkan kemananan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondisi

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 6.3



Tabel 6.3

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RPJMD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN										
	Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia										
	Sasaran : Meningkatkan kualitas pendidikan										
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,32	7,70	7,79	7,88	7,97	8,06	12,00	12,00	Dinas Pendidikan
		2 Program Pendidikan Menengah (SMP)									
2	Angka Harapan Lama Sekolah	3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	11,03	11,10	12,54	12,83	13,12	13,41	13,70	13,70	Dinas Pendidikan
		4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan									
	Sasaran : Meningkatkan kualitas kesehatan										
3	Usia Harapan Hidup (daerah)	5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	66,65	67,66	68,19	68,55	68,92	69,28	69,64	69,64	Dinas Kesehatan
		6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan									
		7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular									
		8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular									
4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	245,00	245,00	214,00	184,00	162,00	140,00	118,00	118,00	Dinas Kesehatan
		10 Program Kesehatan Keluarga									
5	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	14,70	14,00	13,00	12,80	12,50	12,30	12,00	12,00	Dinas Kesehatan
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja										
6	Angka pengangguran terbuka	12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,50	3,40	3,20	2,80	2,50	2,20	2,10	2,10	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi
		13 Program Peningkatan Kesempatan Kerja									



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN											
	Tujuan : Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat											
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perekonomian daerah											
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	14 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	11,48	12,40	12,50	12,75	13,00	13,39	13,79	13,79	Dinas Pertanian	
		15 Program Peningkatan Produksi Hortikultura										
		16 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
		17 Program Peningkatan Produktifitas Perkebunan										
8	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4,61	5,20	5,50	5,75	6,00	6,18	6,37	6,37	Dinas Perdagangan	
		19 Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan										
	Sasaran : Meningkatnya nilai investasi											
9	Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%)	20 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	30,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
		21 Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi										
	Sasaran : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil (UMK)											
10	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) (%)	22 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	5,00	5,00	7,47	8,50	9,50	10,50	11,50	11,50	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	
	Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat											
11	Tingkat ketersediaan pangan (PPH)	23 Program peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan	-	85,05	85,10	85,15	85,20	85,25	85,30	85,30	Dinas Ketahanan Pangan	
		24 Program Peningkatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan										
3	MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKESINAMBUNGAN											
	Tujuan : Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat											
	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan											
12	Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)	25 Program Pembangunan Jalan	18,73	17,00	30,00	32,00	35,00	38,00	40,00	40,00	Dins PUPR	
		26 Program Peningkatan Jalan										
	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi											
13	Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	27 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	40,55	43,00	45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	54,00	Dins PUPR	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan permukiman											
14	Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%)	28 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	83,29	86,67	88,85	91,63	94,41	97,19	100,00	100,00	Dins PUPR	
15	Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%)	29 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	78,88	82,40	85,92	89,44	92,96	96,48	100,00	100,00	Dins PUPR	
16	Jaringan drainase dalam keadaan baik (%)	30 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	-	85,03	86,09	87,01	87,82	88,53	89,16	89,16	Dins PUPR	
17	Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (%)	31 Program Penanganan kawasan kumuh	18,02	30,08	24,00	18,00	16,00	6,00	-	-	Dins PUPR	



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran : Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan komunikasi internet										
18	Cakupan infrastruktur telekomunikasi yang dapat diakses desa terpencil (%)	32 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	10,00	10,00	25,00	50,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi & Informatika
4	MISI IV :PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (POTENSI LOKAL) BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN										
	Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, perikanan dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan										
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan petani										
19	Nilai Tukar Petani	33 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	-	97,52	98,00	98,25	98,50	98,65	99,00	99,00	Dinas Pertanian
		34 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura									
		35 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan									
		36 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan									
	Sasaran : Meningkatkan mutu lingkungan hidup										
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	55	56,30	57,10	59,50	60,25	61,25	62,25	62,25	Dinas Lingkungan Hidup
		38 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
5	MISI V : MENGEMBANGKAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN										
	Tujuan : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat										
	Sasaran : Menurunkan angka kemiskinan										
21	Angka Kemiskinan (%)	39 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5,74	4,68	4,65	4,50	4,25	4,03	4,01	4,01	Dinas Sosial
		40 Program Keluarga Harapan									
		41 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya									Bappeda
	Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)										
22	Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	42 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	0	5,00	10,00	17,00	30,00	35,00	40,00	40,00	Dinas Sosial
		43 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
		44 Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma									
		45 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narkoba dan penyakit lainnya)									



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran : Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana										
23	Indeks Resiko Bencana (%)	46 Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	20,00	30,00	55,00	80,00	90,00	100,00	100,00	BPBD
		47 Program Pembinaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan									
		48 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran Hutan & Lahan									
	Sasaran : Meningkatnya pelestarian budaya										
24	Budaya Balangan yang terlestarikan (%)	49 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	0	0	10,00	30,00	75,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
		50 Program Pengelolaan Keragaman Budaya									
6	MISI VI : OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH										
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik										
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik										
25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	51 Program Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	72	74	76	78	80	80	Sekretariat Daerah
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan										
26	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	52 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah
27	Tingkat Maturitas SPIP Pemda	53 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0	0	2 (2.00)	2 (2.50)	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat
28	Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	54 Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah	CC=53,65	CC=53,65	CC=55,65	CC=57,65	B=60,1	B=62,2	B=64,3	B=64,3	Sekretariat Daerah
	Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah										
29	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	55 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	tinggi	tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah
	Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa										
30	Indeks Desa Membangun (%)	56 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	0	0	0,5616	0,5897	0,6486	0,6810	0,7151	0,7151	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		57 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa									
		58 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa									



No.	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	SKPD Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	MISI VI : MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK TERCIPTANYA SUASANA YANG KONDUSIF										
	Tujuan : terciptanya suasana masyarakat yang kondusif										
	Sasaran : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat										
31	Angka Kriminalitas	59 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	157	259	271	244	220	198	178	178	Dinas Satpol PP
		60 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal									
32	Angka konflik sosial bernuansa SARA	61 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol
		62 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan									



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Untuk proyeksi lima tahun ke depan, berdasarkan *trend linier* beberapa tahun sebelumnya maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Balangan akan terus meningkat dengan *trend* positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Balangan memiliki potensi riil untuk lebih mandiri. Namun terdapat beberapa asumsi yang harus tetap dijaga agar asumsi APBD Kabupaten Balangan tetap sehat, antara lain : asumsi belanja pegawai, asumsi belanja modal, dan Pos Pendapatannya pada komposisi PAD lebih ditingkatkan proporsinya daripada Dana Perimbangan.

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Balangan ke depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Publik (SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Balangan. Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengelola sumber daya daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Jelasnya proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.



Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

NO. URUT	URAIAN	TAHUN					
		2016 (APBD)	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	1.025.187.793.247,00	1.742.410.291.100,00	2.146.561.450.502,00	2.516.493.003.941,00	2.905.185.849.048,00	3.317.089.866.950,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	569.503.342.291,00	626.453.676.520,00	689.099.044.172,00	758.008.948.589,00	833.809.843.448,00	917.190.827.793,00
2.1.1	Belanja Pegawai	379.896.190.335,00	417.885.809.369,00	459.674.390.306,00	505.641.829.337,00	556.206.012.270,00	611.826.613.497,00
2.1.4	Belanja Hibah	18.875.305.000,00	20.762.835.500,00	22.839.119.050,00	25.123.030.955,00	27.635.334.050,00	30.398.867.455,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.297.800.000,00	3.627.580.000,00	3.990.338.000,00	4.389.371.800,00	4.828.308.980,00	5.311.139.878,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	646.700.000,00	711.370.000,00	782.507.000,00	860.757.700,00	946.833.470,00	1.041.516.817,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.069.796.956,00	181.576.776.651,00	199.734.454.316,00	219.707.899.747,00	241.678.689.723,00	265.846.558.696,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.717.550.000,00	1.889.305.000,00	2.078.235.500,00	2.286.059.050,00	2.514.664.955,00	2.766.131.450,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	455.684.450.956,00	1.115.956.614.580,00	1.457.462.406.330,00	1.758.484.055.352,00	2.071.376.005.600,00	2.399.899.039.157,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	87.839.655.773,00	35.000.000.000,00	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)	(15.000.000.000,00)



7.2. Program Prioritas Perangkat Daerah

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Balangan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Balangan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA), termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas merupakan bentuk instrument kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing Perangkat Daerah sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap Perangkat Daerah ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana program prioritas diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk melengkapi dan atau menjabarkan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah memiliki program prioritas sesuai permasalahan pembangunan masing-masing. Indikasi program prioritas jelas menyebutkan SKPD penanggungjawab dan disertai pagu indikatifnya.

Secara lebih lengkap dan terperinci, program prioritas dapat dilihat pada tabel 7.2. (*terlampir*).



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				449.849.524.074		522.309.773.871		580.476.698.048		590.403.991.905		692.175.577.697		749.592.685.542		749.592.685.542	
Pendidikan				62.731.948.479		74.744.421.963		90.393.884.725		50.037.626.128		102.418.789.300		108.734.339.196		108.734.339.196	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1	1	8.706.781.640	12 bln	7.176.646.640	12 bln	7.762.556.304	12 bln	6.464.111.934	12 bln	9.152.876.628	12 bln	9.919.139.291	12 bln	9.919.139.291	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur			5.387.198.540	100%	4.374.090.400	100%	2.643.372.204	100%	1.747.900.000	100%	2.172.376.004	100%	2.172.376.004	100%	2.172.376.004	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			-	100%	580.032.150	100%	7.655.682	100%	626.800.000	100%	76.556.815	100%	76.556.815	100%	76.556.815	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan			135.806.600	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	100.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	41,77		2.050.804.390	38%	2.387.905.005	38%	7.175.375.150	38%	3.661.933.000	38%	7.340.394.095	38%	10.092.633.612	38%	10.092.633.612	DINAS PENDIDIKAN
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK dan APM SD, Angka Kelulusan SD, Nilai rata-rata nila US SD, Persentase jumlah SD yang memenuhi SPM, persentase siswa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi	115,04, 93,42	105,96	41.385.163.483	100%	35.307.301.840	100%	39.925.971.934	100%	13.470.551.500	100%	47.203.489.892	100%	47.645.203.518	100%	47.645.203.518	DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Menengah	APK dan APM SMP, Angka Kelulusan SD, Nilai rata-rata nila US SD, Persentase jumlah SD yang memenuhi SPM,	63,94		7.074.161.390	66%	14.387.534.000	67%	18.501.672.000	67%	8.779.285.000	67%	19.318.015.000	67%	20.204.186.890	67%	20.204.186.890	DINAS PENDIDIKAN
Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan kualitas, keterampilan KF dan angka melek huruf	80		2.198.569.276	81%	8.018.834.300	81%	7.831.389.740	86%	6.101.107.840	87%	8.379.207.932	90%	8.757.232.022	90%	8.757.232.022	DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan (Guru S1 TK, SD dan SMP), Persentase Guru SD bersertifikat, Persentase Guru SMP bersertifikat, Persentase Pengawas bersertifikat Pengawas Sekolah,	26,35, 65,77, 90,88		2.407.988.800	100%	2.497.974.268	100%	2.474.448.015	100%	2.180.598.788	100%	2.234.749.562	100%	2.297.150.335	100%	2.297.150.335	DINAS PENDIDIKAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Peningkatan Angka melanjutkan, Dokumen Perencanaan dan Laporan Persentase laporan pencatatan aset lingkungan Dinas Pendidikan	0,2715278		2.092.256.000	75%	7.020.750.000	80%	11.664.000.000	85%	13.369.450.000	90%	15.524.000.000	100%	17.319.000.000	100%	17.319.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Kesehatan				22.167.259.095		97.469.356.667		113.821.832.023		105.713.093.177		121.456.380.567		132.785.392.176		132.785.392.176	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran				100%	6.024.427.300	100%	6.114.309.765	100%	4.039.733.100	100%	4.443.706.410	100%	4.888.077.051	100%	4.888.077.051	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya sarana dan prasarana operasional yang menunjang kinerja aparatus dinas				100%	1.955.800.000	100%	2.942.323.500	100%	4.229.489.000	100%	4.771.732.900	100%	5.248.906.190	100%	5.248.906.190	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja dan disiplin aparatur				100%	252.200.000	0%	372.200.000	100%	80.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	96.800.000	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				100%	1.125.421.800	100%	1.519.070.000	100%	1.235.600.000	100%	2.320.000.000	100%	2.555.000.000	100%	2.555.000.000	DINAS KESEHATAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	214.875.000	100%	235.057.600	100%	233.810.000	100%	233.810.000	100%	257.191.000	100%	282.910.100	100%	282.910.100	DINAS KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Obat, BMHP dan Vaksin 80%	88 Persen	89 Persen	2.447.842.400	100%	1.870.910.700	100%	1.953.492.850	100%	1.048.401.675	100%	1.152.279.343	100%	1.268.727.277	100%	1.268.727.277	DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dengan tercukupinya kebutuhan obat dan perbekes				100%	23.756.920.896	100%	25.900.841.904	100%	11.337.315.497	100%	12.571.047.047	100%	13.828.141.752	100%	13.828.141.752	DINAS KESEHATAN
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat, makanan dan NAFZA yang aman di konsumsi	100 %	100 %	41.353.600	100%	60.918.000	100%	132.037.700	100%	121.219.630	100%	129.470.000	100%	142.417.000	100%	142.417.000	DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase RT yang menggunakan obat dengan bahan alami	100 %	100 %	10.014.200	100%	25.370.000	100%	65.000.000	100%	35.000.000	100%	165.500.000	100%	180.350.000	100%	180.350.000	DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS	38 Persen	40	441.437.000	50%	1.214.485.100	55%	727.787.900	60%	892.448.900	65%	808.266.290	70%	889.092.979	70%	889.092.979	DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus	28,48%	27,53	258.371.050	26%	259.547.350	24%	261.060.000	22%	1.389.010.000	20%	1.527.911.000	18%	1.680.697.600	18%	1.680.697.600	DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa yang melaksanakan STBM				86%	322.937.100	91%	393.016.100	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penemuan penderita Tuberculosis, Demam Berdarah Dengue, Malaria yang dilangani sesuai standar				100%	878.912.000	100%	1.974.877.187	100%	1.699.967.000	100%	1.869.963.700	100%	2.056.960.070	100%	2.056.960.070	DINAS KESEHATAN
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	persentase puskesmas yang lulus akreditasi				42%	1.405.911.000	25%	1.550.374.485	100%	52.710.200	100%	53.490.085	100%	58.839.094	100%	58.839.094	DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin				100%	621.793.000	100%	260.068.650	100%	194.302.400	100%	213.732.640	100%	235.105.904	100%	235.105.904	DINAS KESEHATAN



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19
16	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang dikembangkan menjadi Puskesmas Rawat Inap	1	0	6.810.938.400	0%	4.966.324.030	0%	9.069.358.153	100%	4.539.576.698	100%	4.756.645.166	100%	5.218.224.182	100%	5.218.224.182	DINAS KESEHATAN
17	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/umah sakit jiwa/umah sakit paru-paru/umah sakit mata	Persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR = Bed Occupancy Rate)				44%	10.164.082.200	48%	11.217.184.000	52%	880.200.000	56%	3.369.365.000	60%	3.143.905.000	60%	3.143.905.000	DINAS KESEHATAN
18	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/umah sakit jiwa/umah sakit paru-paru/umah sakit mata	Persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR = Bed Occupancy Rate)				44%	2.102.800.000	48%	689.750.000	52%	577.900.000	56%	870.750.000	60%	957.825.000	60%	957.825.000	DINAS KESEHATAN
19	Program Pemeliharaan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Jaminan Kesehatan				100%	17.298.658.870	100%	263.079.015	100%	99.132.015	100%	95.845.217	100%	105.429.738	100%	105.429.738	DINAS KESEHATAN
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase pelayanan kesehatan bayi				28%	331.524.800	28%	180.435.600	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Lansia yang mampu memelihara kesehatannya				37%	256.220.100	39%	199.330.702	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
22	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	jumlah produksi RT yang mempunyai sertifikat keamanan pangan				28 RT	53.125.000	29 RT	53.125.000	30 RT	80.200.000	32 RT	88.220.000	35 RT	97.042.000	35 RT	97.042.000	DINAS KESEHATAN
23	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Kematian Ibu				5%	1.604.999.800	5%	2.422.238.600	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
24	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pemakaian tempat tidur Rumah Sakit (BOR = Bed Occupancy Rate)	32	40%	10.000.000.000	44 -	20.567.200.613	48 -	16.000.000.000	52 -	19.000.000.000	56 -	22.000.000.000	60 -	25.000.000.000	60 -	25.000.000.000	DINAS KESEHATAN
25	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase desa yang mempunyai tenaga kesehatan	68,6	70	394.657.114	100%	-	100%	3.536.308.102	100%	3.463.850.000	100%	3.982.735.000	100%	4.527.108.500	100%	4.527.108.500	DINAS KESEHATAN
26	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penderita dengan Penyakit tidak Menular yang terangani (Hipertensi, DM)				100%	-	100%	443.614.200	100%	1.556.781.000	100%	1.712.459.100	100%	1.883.705.010	100%	1.883.705.010	DINAS KESEHATAN
27	Program Penguatan Jaminan Kesehatan dan Dukungan Finansial Untuk Penjaminan Pelayanan Kesehatan	Cakupan jaminan pembiayaan kesehatan				100%	-	100%	25.000.000.000	100%	27.000.000.000	100%	29.000.000.000	100%	31.000.000.000	100%	31.000.000.000	DINAS KESEHATAN
28	Program Surveilans dan Imunisasi	PERSENTASE UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PD3 DAN KESEHATAN JAMA'AH HAJI	100 Persen	100 Persen	380.750.575	0%	-	0%	-	100%	1.577.291.500	100%	1.874.218.150	100%	2.061.639.966	100%	2.061.639.966	DINAS KESEHATAN
29	Program Kesehatan Keluarga	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)				0%	-	0%	-	100%	2.504.523.300	100%	2.754.975.630	100%	3.030.473.193	100%	3.030.473.193	DINAS KESEHATAN
30	Program Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan STBM	75 Desa	81 Desa	1.167.019.750	0%	-	0%	-	21189 RT	2.002.419.250	22829 RT	2.202.661.175	24.461 RT	2.422.927.293	24.461 RT	2.422.927.293	DINAS KESEHATAN
31	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga di Puskesmas	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga				0%	-	0%	-	60%	453.173.500	70%	498.490.850	80%	548.339.926	80%	548.339.926	DINAS KESEHATAN
32	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Jumlah Kematian Ibu				5 Orang	11.924.400	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
33	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	Cakupan KB Aktif				70%	52.615.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
34	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Jumlah Kematian Ibu				5 Orang	49.270.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS KESEHATAN
35	Program Peningkatan dan Manajemen Kesehatan	Tersedianya data informasi kesehatan Kabupaten Balangan				0%	-	100%	347.138.600	100%	347.138.500	100%	381.852.350	100%	420.037.585	100%	420.037.585	DINAS KESEHATAN
36	Program Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi rumah sakit				0%	-	0%	-	100%	6.224.925.000	100%	7.726.045.000	100%	8.209.899.500	100%	8.209.899.500	DINAS KESEHATAN
37	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Persentase peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit				0%	-	0%	-	100%	8.816.975.000	100%	9.769.827.500	100%	10.746.810.250	100%	10.746.810.250	DINAS KESEHATAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				293.012.559.006		287.475.226.168		322.304.975.010		363.625.982.512		387.895.195.764		414.436.185.341		414.436.185.341	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan SOPD				100%	2.681.893.000	100%	3.520.519.000	100%	3.770.625.000	100%	3.796.225.000	100%	4.079.925.000	100%	4.079.925.000	DINAS PUPR
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SOPD				100%	1.115.500.000	100%	25.481.140.000	100%	2.199.675.000	100%	3.852.125.000	100%	3.030.375.000	100%	3.030.375.000	DINAS PUPR
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin Aparatur				100%	66.250.000	0%	-	100%	126.050.000	100%	123.255.000	100%	135.580.500	100%	135.580.500	DINAS PUPR
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Kemampuan Sumberdaya SOPD				100%	482.500.000	100%	650.000.000	100%	492.955.000	100%	620.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	DINAS PUPR
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SOPD Sesuai SAP				100%	90.000.000	100%	99.600.000	100%	135.600.000	100%	219.600.000	100%	265.716.000	100%	265.716.000	DINAS PUPR
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan dalam kondisi baik	20%	3%	63.560.000.000	30%	101.525.786.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
7	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan Panjang jalan yang dipelihara	0%	0%	1.610.000.000	0%	5.617.250.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Persentase panjang jalan yang dipelihara				0%	-	0%	3.942.550.000	0%	4.336.805.000	0%	4.770.485.500	0%	5.247.534.050	0%	5.247.534.050	DINAS PUPR
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara				0%	-	0%	1.576.200.000	0%	1.973.250.000	0%	2.170.575.000	0%	2.387.632.500	0%	2.387.632.500	DINAS PUPR
10	Program Pembangunan Jalan	Persentase panjang Jalan dalam Kondisi baik dan sedang				0%	-	22%	58.081.850.000	24%	58.890.035.000	26%	59.779.038.500	28%	60.756.942.350	28%	60.756.942.350	DINAS PUPR
11	Program Peningkatan Jalan	Persentase Panjang Jalan yang ditingkatkan				0%	-	32%	49.534.650.000	35%	67.256.450.000	38%	73.982.095.000	40%	81.380.304.500	40%	81.380.304.500	DINAS PUPR
12	Program Pembangunan Jembatan	Persentase Jembatan dalam Kondisi baik dan sedang				0%	-	41%	70.719.650.000	42%	72.791.615.000	42%	75.070.776.500	43%	77.577.854.150	43%	77.577.854.150	DINAS PUPR
13	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Persentase Penanganan Tebing Sungai				25%	21.500.000.000	25%	19.472.100.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
14	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Debit Air Baku	80 ltr/detik	80 ltr/detik	3.120.000.000	80 Ltr/detik	2.761.850.000	80 Ltr/detik	3.000.000.000	80 Ltr/detik	5.061.900.000	80 Ltr/detik	5.568.090.000	80 Ltr/detik	6.124.899.000	80 Ltr/detik	6.124.899.000	DINAS PUPR



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19
15	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang Irigasi yang Baik untuk Mengairi Persawahan	41%	43%	30.430.000.000	45%	18.082.750.000	48%	9.022.750.000	50%	10.513.875.000	52%	11.530.262.500	54%	12.648.288.750	54%	12.648.288.750	DINAS PUPR
16	Program Pemeliharaan Sungai	Persentase Panjang Bibir Sungai Rawan Longsor yang Tertangani	23%	24%	21.500.000.000	0%	-	28%	12.200.100.000	30%	15.452.250.000	33%	16.861.475.000	35%	18.411.622.500	35%	18.411.622.500	DINAS PUPR
17	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	Persentase Penduduk yang mendapatkan air bersih yang layak	83%	86%	48.715.308.000	89%	55.892.759.160	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
18	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase Aksesibilitas Jalan Lingkungan				76%	35.794.224.500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
19	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	Persentase Penduduk yang dapat Mengakses Air Bersih yang Layak	83%	86%	33.874.108.000	89%	-	92%	6.932.550.000	94%	11.141.360.000	97%	12.255.496.000	100%	13.481.045.600	100%	13.481.045.600	DINAS PUPR
20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Persentase infrastruktur sanitasi yang memadai	79%	82%	4.534.000.000	0%	-	89%	4.372.600.000	93%	4.984.005.000	96%	5.482.405.500	100%	6.030.646.050	100%	6.030.646.050	DINAS PUPR
21	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Panjang Jaringan Drainase yang baik	69%	85%	19.000.000.000	86%	15.846.197.500	87%	14.101.000.000	88%	15.511.100.000	0%	17.062.210.000	89%	18.768.431.000	89%	18.768.431.000	DINAS PUPR
22	Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan lingkungan dalam kondisi baik	47.136 m	54.898 m	19.578.000.000	20%	-	27%	15.240.000.000	33%	16.764.000.000	38%	18.440.400.000	43%	20.284.440.000	43%	20.284.440.000	DINAS PUPR
23	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Dokumen Perencanaan Infrastruktur	5 Dok	3 Dok	850.000.000	1 Dok	-	12 Dok	1.062.675.000	8 Dok	1.168.942.500	8 Dok	1.285.836.750	8 Dok	1.414.420.425	8 Dok	1.414.420.425	DINAS PUPR
24	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	100%	100%	792.500.000	100%	814.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
25	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase pengaturan jasa konstruksi		100%	792.500.000	100%	341.300.000	100%	227.345.000	100%	281.695.000	100%	309.864.500	100%	340.850.950	100%	340.850.950	DINAS PUPR
26	Program Peningkatan Jasa Konstruksi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana jasa konstruksi				0%	-	100%	8.808.700.000	100%	8.850.000.000	100%	8.850.000.000	100%	8.850.000.000	100%	8.850.000.000	DINAS PUPR
27	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Penyedia jasa konstruksi yang memiliki tenaga terampil				0%	-	0%	-	50 Orang	400.000.000	50 Orang	400.000.000	50 Orang	400.000.000	50 Orang	400.000.000	DINAS PUPR
28	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Terevaluasinya kinerja penyedia jasa konstruksi				0 Dok	-	0 Dok	-	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	DINAS PUPR
29	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Persentase Bangunan Publik Yang Layak pakai	70%	72%	17.500.000.000	75%	-	76%	53.429.250.000	77%	52.966.335.000	78%	58.262.968.500	80%	64.089.265.350	80%	64.089.265.350	DINAS PUPR
30	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Teknis NSPK Rencana Tata Ruang			340.000.000	7 Dok	1.159.250.000	7 Dok	2.169.600.000	5 Dok	2.734.115.000	5 Dok	2.897.526.500	5 Dok	3.308.279.150	5 Dok	3.308.279.150	DINAS PUPR
31	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang daerah	4 jenis	4 jenis	210.000.000	4 Jenis	46.900.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
32	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah yang ditetapkan	1 Dok	1 Dok	250.000.000	1 Dok	369.100.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS PUPR
33	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Tersedianya Luasan RTH	80%	80%	420.000.000	0%	-	2%	655.600.000	2%	3.109.500.000	2%	3.420.450.000	2%	3.762.495.000	2%	3.762.495.000	DINAS PUPR
34	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen teknis NSPK pengendalian tata ruang	2%	2%	-	0%	-	1 Dok	503.000.000	1 Dok	813.750.000	1 Dok	895.125.000	0%	984.637.500	0%	984.637.500	DINAS PUPR
4	Permukiman dan Perumahan Rakyat						29.309.705.443		9.500.200.000		16.780.299.600		20.940.196.500		25.568.627.150		25.568.627.150	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan sarana penunjang pegawai				12 Bulan	840.739.443	12 Bulan	1.233.080.000	12 Bulan	1.319.520.000	12 Bulan	1.451.472.000	12 Bulan	1.596.619.200	12 Bulan	1.596.619.200	DINAS PERKIM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur				100%	23.518.950.000	100%	284.820.000	100%	400.400.000	100%	983.440.000	100%	1.081.784.000	100%	1.081.784.000	DINAS PERKIM
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan disiplin pegawai				100%	12.450.000	100%	67.800.000	0%	-	100%	145.000.000	100%	159.500.000	100%	159.500.000	DINAS PERKIM
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan kapasitas sumber daya aparatur				16 kali	100.000.000	20 kali	145.000.000	20 kali	150.000.000	20 kali	165.000.000	20 kali	181.500.000	20 kali	181.500.000	DINAS PERKIM
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				7 Dok	10.070.000	7 Dok	19.500.000	7 Dok	19.600.000	7 Dok	21.560.000	7 Dok	23.716.000	7 Dok	23.716.000	DINAS PERKIM
6	Program Penanganan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh yang tertangani				24%	1.224.707.000	18%	1.250.000.000	12%	4.292.608.000	6%	5.819.745.300	0%	6.401.719.830	0%	6.401.719.830	DINAS PERKIM
7	Program Pengembangan Perumahan	persentase rumah layak huni				80%	624.584.000	81%	268.154.000	82%	1.350.680.000	83%	2.135.748.400	84%	2.349.323.284	84%	2.349.323.284	DINAS PERKIM
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	Cakupan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan				14 Lokasi	2.695.205.000	4 Lokasi	800.000.000	10 Lokasi	3.290.099.600	10 Lokasi	3.290.099.600	10 Lokasi	6.181.020.516	10 Lokasi	6.181.020.516	DINAS PERKIM
9	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	Persentase taman kota tertata dengan baik				0%	-	80%	5.431.846.000	80%	5.957.392.000	80%	6.553.131.200	80%	7.208.444.320	80%	7.208.444.320	DINAS PERKIM
10	Program Pemenuhan Kebutuhan Perumahan	persentase pemenuhan kebutuhan perumahan				0%	-	0%	-	0%	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	DINAS PERKIM
11	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat perumahan				100%	208.875.000	0%	-	0%	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS PERKIM
12	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Cakupan kualitas komunitas perumahan				100%	74.125.000	0%	-	0%	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	DINAS PERKIM



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	19	
5	Ketertarikan Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				12.597.336.000		28.615.969.650		39.155.806.300		48.211.527.400		52.464.965.580		60.018.084.193		60.018.084.193	
I	BADAN KESATUAN POLITIK DAN KEBANGSAAN				4.218.414.750		3.777.312.500		4.000.000.000		5.800.000.000		6.669.998.000		7.670.500.003		7.670.500.003	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terbit dan lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			717.407.150	100%	630.374.800	100%	717.177.300	100%	730.031.800	100%	839.536.570	100%	965.467.056	100%	965.467.056	BAKESBANGPOL
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana & prasarana aparatur yang menunjang kegiatan			274.142.100	100%	296.165.200	100%	438.068.100	100%	762.931.400	100%	877.369.110	100%	1.008.976.777	100%	1.008.976.777	BAKESBANGPOL
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase kebutuhan operasional OPD yang mendukung peningkatan disiplin aparatur			41.998.000	100%	-	100%	22.500.000	100%	120.625.000	100%	138.718.750	100%	159.526.563	100%	159.526.563	BAKESBANGPOL
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase meningkatnya kualitas SDM Badan Kesbangpol			129.000.000	100%	105.100.000	100%	127.000.000	100%	198.000.000	100%	227.700.000	100%	261.855.000	100%	261.855.000	BAKESBANGPOL
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan			3.297.500	58%	2.998.000	60%	2.698.000	61%	26.712.500	62%	30.719.375	63%	35.327.281	63%	35.327.281	BAKESBANGPOL
6	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase fasilitasi penanganan konflik sosial			962.000.000	100%	950.170.000	100%	679.280.000	100%	611.082.000	100%	702.744.300	100%	808.155.945	100%	808.155.945	BAKESBANGPOL
7	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan			183.328.500	100%	237.169.000	100%	237.161.000	100%	234.983.000	100%	270.230.450	100%	310.765.018	100%	310.765.018	BAKESBANGPOL
8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti Seminar Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan kebangsaan			170.120.000	100%	88.865.500	100%	79.378.600	100%	45.000.000	100%	51.750.000	100%	59.512.500	100%	59.512.500	BAKESBANGPOL
9	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pemetaan Daerah Rawan Konflik			78.835.000	100%	63.488.000	100%	142.488.000	100%	156.966.300	100%	180.511.245	100%	207.587.932	100%	207.587.932	BAKESBANGPOL
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Prosentase fasilitasi penyuluhan narkoba			-	100%	93.130.000	100%	128.940.000	100%	116.046.000	100%	133.452.900	100%	153.470.835	100%	153.470.835	BAKESBANGPOL
11	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase cakupan masyarakat yang dibina			543.494.000	100%	291.699.500	100%	559.033.000	100%	1.664.828.000	100%	1.914.552.200	100%	2.201.735.030	100%	2.201.735.030	BAKESBANGPOL
12	Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	Prosentase fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah			933.650.000	100%	875.080.000	100%	632.460.000	100%	566.739.000	100%	651.749.850	100%	749.512.328	100%	749.512.328	BAKESBANGPOL
13	Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Masyarakat yang Aktif			136.895.000	100%	81.367.500	100%	144.140.000	100%	465.650.000	100%	535.497.500	100%	615.822.125	100%	615.822.125	BAKESBANGPOL
14	Program Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Prosentase fasilitasi forum keagamaan (FKUB)			44.247.500	100%	31.705.000	100%	89.676.000	100%	100.405.000	100%	115.465.750	100%	132.785.613	100%	132.785.613	BAKESBANGPOL
II	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				5.840.768.750		16.828.383.000		16.374.620.000		19.367.654.400		22.741.185.280		29.131.705.440		29.131.705.440	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terperuhnya Layanan Administrasi Perkantoran			822.247.000	100%	1.848.253.500	100%	2.657.855.550	100%	3.189.426.660	100%	3.327.311.992	100%	4.592.774.390	100%	4.592.774.390	BPBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur			2.561.950.000	100%	864.446.000	100%	321.739.100	100%	386.086.920	100%	463.304.304	100%	555.965.165	100%	555.965.165	BPBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			34.000.000	100%	29.750.000	100%	81.900.000	100%	98.280.000	100%	117.936.000	100%	141.523.200	100%	141.523.200	BPBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			124.304.750	100%	304.560.000	100%	384.570.000	100%	461.484.000	100%	553.780.800	100%	664.536.960	100%	664.536.960	BPBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Dokumentasi			15.330.000	100%	46.110.000	100%	66.245.000	100%	79.494.000	100%	95.392.800	100%	114.471.360	100%	114.471.360	BPBD
6	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran			967.475.000	100%	1.778.418.000	100%	1.657.026.000	100%	1.988.431.200	100%	2.386.117.440	100%	2.863.340.928	100%	2.863.340.928	BPBD
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya Pencegahan Dini & Penanggulangan korban Bencana Alam			1.023.937.000	100%	4.011.240.500	100%	2.080.896.350	100%	2.497.075.620	100%	2.996.490.744	100%	3.595.788.893	100%	3.595.788.893	BPBD
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	Terlaksananya Binaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan			250.800.000	100%	306.360.000	100%	596.060.000	100%	433.382.400	100%	520.058.880	100%	1.866.353.760	100%	1.866.353.760	BPBD
9	Program Pengendalian Banjir	Terlaksananya Pengendalian Banjir			40.725.000	100%	166.020.000	100%	138.780.000	100%	166.536.000	100%	199.843.200	100%	239.811.840	100%	239.811.840	BPBD
10	Program Penanggulangan Longsor dan Banjir				0%	7.473.225.000	0%	8.389.548.000	0%	10.067.457.600	0%	12.080.949.120	0%	14.497.138.944	0%	14.497.138.944	BPBD	
III	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				2.538.152.500		8.010.274.150		18.781.186.300		23.043.873.000		23.053.782.300		23.215.878.750		23.215.878.750	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan publik dan administrasi perkantoran			473.332.000	100%	1.090.837.250	100%	2.974.875.800	100%	3.208.629.800	100%	3.362.281.180	100%	3.655.550.698	100%	3.655.550.698	DINAS SATPOL PP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan dan sarana/prasarana pegawai			167.700.000	100%	1.463.500.000	100%	1.048.110.000	100%	600.800.000	100%	593.500.000	100%	729.700.000	100%	729.700.000	DINAS SATPOL PP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur			75.000.000	100%	130.000.000	100%	252.096.000	100%	2.135.000.000	100%	542.000.000	100%	527.900.000	100%	527.900.000	DINAS SATPOL PP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pegawai			40.310.000	1 Tahun	452.500.000	1 Tahun	523.510.000	1 Tahun	492.000.000	1 Tahun	452.500.000	1 Tahun	432.500.000	1 Tahun	432.500.000	DINAS SATPOL PP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0 Tahun	-	1 Tahun	21.200.000	1 Tahun	21.500.000	1 Tahun	23.650.000	1 Tahun	26.015.000	1 Tahun	26.015.000	DINAS SATPOL PP	
6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya rasa keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat			1.201.974.000	100%	2.165.074.400	100%	7.088.644.000	100%	8.573.929.200	100%	9.415.922.120	100%	10.271.383.332	100%	10.271.383.332	DINAS SATPOL PP
7	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Meningkatnya ketertiban, keamanan, ketertarikan dan kenyamanan lingkungan			344.849.000	100%	783.224.500	100%	3.356.956.500	100%	4.289.460.000	100%	4.659.375.000	100%	3.567.830.000	100%	3.567.830.000	DINAS SATPOL PP
8	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Menciptakan keamanan dan nyaman lingkungan yang terkendali			181.320.000	100%	1.802.804.000	100%	3.395.964.000	100%	2.732.554.000	100%	3.005.554.000	100%	3.104.999.720	100%	3.104.999.720	DINAS SATPOL PP
9	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatkan keikutsertaan dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan			53.667.500	100%	122.334.000	100%	119.830.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	DINAS SATPOL PP
10	Program Pengembangan Sumber Daya Anggota Linmas	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Anggota Satlinmas			0%	-	0%	-	100%	990.000.000	100%	999.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	DINAS SATPOL PP	



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19
6	Sosial				59.340.421.500		4.695.093.988		5.300.000.000		6.035.463.100		7.000.050.000		8.050.057.502		8.050.057.502	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.905.000.000	100%	726.383.750	100%	1.325.818.100	100%	1.325.818.100	100%	1.583.958.250	100%	1.821.551.988	100%	1.821.551.988	Dinas Sosial
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	53.934.000.000	100%	1.821.551.988	100%	715.862.900	100%	846.760.000	100%	973.774.000	100%	1.119.840.100	100%	1.119.840.100	Dinas Sosial
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	600.000.000	100%	8.400.000	100%	22.750.000	100%	56.000.000	100%	64.400.000	100%	74.060.000	100%	74.060.000	Dinas Sosial
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	650.000.000	100%	65.000.000	75%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	115.000.000	85%	132.250.000	85%	132.250.000	Dinas Sosial
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	0 %	100 %	169.870.500	100%	422.827.400	100%	662.832.000	100%	1.203.475.000	100%	1.383.996.250	100%	1.591.595.688	100%	1.591.595.688	Dinas Sosial
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Cakupan PMKS yang mendapatkan Pelayanan Sosial	0 %	0 %	360.765.000	77%	583.857.500	79%	773.590.000	79%	842.855.000	79%	969.283.250	79%	1.114.675.738	79%	1.114.675.738	Dinas Sosial
7	Program pembinaan anak terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Pembinaan	0 %	0 %	187.605.000	7%	124.515.000	7%	291.845.000	7%	305.395.000	7%	351.204.250	7%	403.884.888	7%	403.884.888	Dinas Sosial
8	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat dan Eks. Trauma yang terbina	0 %	4 orang %	52.530.000	20%	96.488.500	21%	316.561.000	21%	211.750.000	21%	243.512.500	21%	280.039.375	21%	280.039.375	Dinas Sosial
9	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	100 %	100 %	18.981.000	100%	122.952.500	100%	178.443.500	100%	114.030.000	100%	131.134.500	100%	150.804.675	100%	150.804.675	Dinas Sosial
10	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narikoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase Pembinaan Eks. Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narikoba dan Penyakit Sosial lainnya)	0 %	4 orang %	-	0%	-	8%	35.325.000	8%	44.900.000	8%	51.635.000	8%	59.380.250	8%	59.380.250	Dinas Sosial
11	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Persentase Warga Masyarakat yang menjadi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha yang berperan dalam Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial	0 %	100 %	1.279.290.000	78%	487.707.350	64%	478.347.500	64%	529.480.000	61%	608.902.000	61%	700.237.300	61%	700.237.300	Dinas Sosial
12	Program Keluarga Harapan	Persentase KSM yang mendapatkan Pelayanan Sosial	0 %	0 %	152.380.000	19%	235.410.000	19%	343.700.000	33%	325.000.000	33%	373.750.000	33%	429.812.500	33%	429.812.500	Dinas Sosial
13	Program Basis Data PMKS PSKS Terpadu	Persentase Basis data PMKS PSKS terpadu	0 %	100 %	30.000.000	100%	-	100%	54.925.000	100%	130.000.000	100%	149.500.000	100%	171.925.000	100%	171.925.000	Dinas Sosial
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				697.643.060.118		1.264.847.501.046		1.814.468.265.253		1.869.035.905.539		2.259.575.832.735		2.240.660.320.384		2.252.903.251.384	
1	Tenaga Kerja				417.634.489.468		766.315.258.906		1.104.063.527.668		1.137.547.754.042		1.360.900.128.959		1.349.219.113.090		1.356.564.871.690	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	2.618.608.950	100%	2.166.718.000	100%	2.197.169.200	100%	2.482.187.620	100%	2.730.406.382	100%	2.730.406.382	DISNAKERTRANS
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan SKPD				100%	4.588.650.000	100%	6.252.050.000	100%	4.283.750.000	100%	4.959.025.000	100%	5.454.927.500	100%	5.454.927.500	DISNAKERTRANS
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase tingkat disiplin aparatur				100%	94.900.000			100%	240.000.000	100%	264.000.000	100%	290.400.000	100%	290.400.000	DISNAKERTRANS
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	300.000.000	100%	500.000.000	100%	520.000.000	100%	572.000.000	100%	629.200.000	100%	629.200.000	DISNAKERTRANS
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja SKPD				58 Nilai	163.125.000	60 Nilai	185.415.000	61 Nilai	141.515.000	62 Nilai	155.666.500	63 Nilai	171.233.150	63 Nilai	171.233.150	DISNAKERTRANS
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan			637.941.686	50%	4.691.744.550	53%	3.324.732.000	55%	4.502.732.000	57%	6.079.515.200	60%	6.687.466.720	60%	6.687.466.720	DISNAKERTRANS
7	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	persentase pencari kerja yang diserap dunia kerja			136.780.000	60%	768.350.000	75%	860.320.000	80%	1.500.000.000	85%	1.850.000.000	90%	1.815.000.000	90%	1.815.000.000	DISNAKERTRANS
8	Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB)				63%	212.680.000	65%	566.265.000	67%	1.297.350.000	70%	1.842.085.000	72%	2.026.293.500	72%	2.026.293.500	DISNAKERTRANS
9	Program Perlindungan, Pengendalian dan Pengembangan Pekerja Migran Indonesia	Menurunnya angka PMI yang bermasalah								10 orang	543.600.000	8 orang	597.960.000	5 orang	657.756.000	5 orang	657.756.000	DISNAKERTRANS
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.414.935.406		2.195.878.458		5.000.000.010		7.498.085.257		7.109.425.184		8.018.497.172		8.018.497.172	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian aparatur DPPP	100%		433.480.500	100%	527.866.650	100%	837.205.150	100%	920.925.665	100%	1.013.018.232	100%	1.114.320.055	100%	1.114.320.055	DPPPA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparatur DPPP	100%		180.913.000	100%	212.893.000	100%	913.345.000	100%	1.006.620.300	100%	535.082.330	100%	633.090.563	100%	633.090.563	DPPPA
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%		15.000.000	100%	43.600.000	100%		100%	120.000.000	100%		100%	76.000.000	100%	76.000.000	DPPPA
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang kompeten sesuai dengan tupoksinya	100%		25.000.000	100%	70.000.000	100%	105.000.000	100%	190.000.000	100%	127.050.000	100%	139.755.000	100%	139.755.000	DPPPA
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kenaikan nilai komponen perencanaan dan pelaporan pada LAKIP DPPP	0%		27.343.000	100%	58.490.000	100%	39.449.850	100%	91.613.280	100%	100.774.608	100%	383.331.538	100%	383.331.538	DPPPA
6	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			72.770.200	100%	166.355.000	100%	373.480.000									DPPPA
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			335.762.500	100%	620.869.000	100%	1.323.620.000									DPPPA
8	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen			28.865.000					30%	926.550.000	30%	993.000.000	30%	1.075.500.000	30%	1.075.500.000	DPPPA



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	
9	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			295.801.200	0%	276.620.000	0%	1.090.707.000									DPPPA	
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak di kabupaten Balangan								50%	1.003.450.000	35%	1.040.500.000	20%	1.081.000.000	20%	1.081.000.000	DPPPA	
11	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan				100%	219.184.800	100%	317.193.000									DPPPA	
12	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO								100%	328.100.000	100%	270.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	DPPPA	
13	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase kecamatan menuju kabupaten Balangan sebagai Kabupaten Layak Anak								25%	1.685.000.000	50%	1.847.000.000	75%	1.922.500.000	75%	1.922.500.000	DPPPA	
14	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlindungi								100%	671.476.000	100%	690.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	DPPPA	
15	Program Pengelolaan sistem Data Kekerasan Perempuan dan Anak, Gender dan Anak	Persentase SKPD yang memanfaatkan data gender dan anak dalam penyusunan program/ kegiatan.								25%	554.350.000	35%	493.000.000	50%	573.000.000	50%	573.000.000	DPPPA	
3	Pangan				3.163.734.270		8.625.000.000		15.000.000.000		11.000.000.000		12.092.655.300		13.348.289.879		13.348.289.879		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran			1.226.679.327	12 bulan	1.268.895.300	12 bulan	1.444.478.500	12 bulan	1.403.817.500	12 bulan	1.544.199.250	12 bulan	1.698.619.175	12 bulan	1.698.619.175	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik			464.650.000	12 bulan	1.438.075.000	12 bulan	1.662.040.000	12 bulan	847.450.000	12 bulan	982.195.000	12 bulan	1.104.145.500	12 bulan	1.104.145.500	DINAS KETAHANAN PANGAN	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			82.600.000	100%	89.900.000	100%	80.050.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	48.400.000	100%	48.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			48.100.000	100%	147.240.000	100%	238.100.000	100%	571.770.000	100%	628.947.000	100%	691.841.700	100%	691.841.700	DINAS KETAHANAN PANGAN	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akurat			20.800.000	100%	72.073.600	100%	126.527.000	100%	153.370.000	100%	164.797.000	100%	175.991.700	100%	175.991.700	DINAS KETAHANAN PANGAN	
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan Skor PPH ketersediaan dan			1.320.904.943	20%	5.608.816.100											DINAS KETAHANAN PANGAN	
7	Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Persentase Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan								60%	4.348.392.500	80%	4.783.231.750	100%	5.261.554.925	100%	5.261.554.925	DINAS KETAHANAN PANGAN	
8	Program Distribusi Pangan	Stabilisasi harga pangan masyarakat (inflasi < 5%)						12 dokumen	727.785.000									DINAS KETAHANAN PANGAN	
9	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	Menurunnya jumlah desa rawan pangan						2 dokumen	1.513.370.000									DINAS KETAHANAN PANGAN	
10	Program Peningkatan Polensi Produksi Pangan Lokal	Meningkatnya jumlah petani yang memproduksi pangan lokal non beras						24 desa	2.423.570.000									DINAS KETAHANAN PANGAN	
11	Program Pengembangan Pola Konsumsi Pangan Lokal	Berkembangnya pangan alternatif						1 dokumen	842.310.000									DINAS KETAHANAN PANGAN	
12	Program Peningkatan Industri Pengolahan dan Produksi Pangan Lokal	Meningkatnya jumlah hasil olahan pangan lokal						12 kali	1.724.043.000									DINAS KETAHANAN PANGAN	
13	Program Peningkatan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi								60%	3.635.200.000	80%	3.945.285.300	100%	4.367.736.879	100%	4.367.736.879	DINAS KETAHANAN PANGAN	
14	Program Peningkatan Ketersediaan Cadangan Pangan	jumlah ketersediaan dan cadangan perlahun						5 bn	4.217.726.500									DINAS KETAHANAN PANGAN	
4	Pertanahan				-		-		44.758.800.000		19.044.700.000		20.949.170.000		23.044.087.000		23.044.087.000		
1	Program Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lokasi tanah yang diinventarisir				0%		-	13%	1.593.980.000	25%	1.402.550.000	30%	1.542.805.000	50%	1.697.085.500	50%	1.697.085.500	DINAS PERKIM
2	Program Penyelesaian Konflik-Komplik Pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan				0%		-	3 Kegiatan	555.970.000	3 Kegiatan	339.750.000	3 Kegiatan	373.725.000	3 Kegiatan	411.097.500	3 Kegiatan	411.097.500	DINAS PERKIM
3	Program Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Persentase ketersediaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum				0%		-	20%	42.608.850.000	20%	17.302.400.000	20%	19.032.640.000	20%	20.935.904.000	20%	20.935.904.000	DINAS PERKIM
5	Lingkungan Hidup				10.573.645.900		22.407.795.900		18.663.295.900		26.290.465.900		25.740.465.900		29.025.465.900		29.025.465.900		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.947.800.000	100%	2.247.000.000	100%	2.335.000.000	100%	2.420.000.000	100%	2.495.000.000	100%	2.565.000.000	100%	2.565.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	1.310.795.900	100%	1.765.795.900	100%	2.505.795.900	100%	2.425.795.900	100%	2.595.795.900	100%	2.715.795.900	100%	2.715.795.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	-	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100 %	100 %	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	CC	210.000.000	210 poin	210.000.000	300 poin	300.000.000	300 poin	300.000.000	300 poin	300.000.000	300 poin	300.000.000	300 poin	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas	Persentase Jumlah Sampah Yang tertangani	21,39%	26,14%	3.000.000.000					30%	4.194.670.000	32%	4.194.670.000	34%	4.194.670.000	34%	4.194.670.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		45884	1.080.000.000	46 indeks	9.655.000.000	47 indeks	4.342.500.000	48 indeks	5.355.000.000	49 indeks	4.620.000.000	50 indeks	5.775.000.000	50 indeks	5.775.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas udara	44 Indeks	44 Indeks	450.000.000	85 indeks	810.000.000	86 indeks	890.000.000	87 indeks	710.000.000	88 indeks	725.000.000	89 indeks	750.000.000	89 indeks	750.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani	100 %	100 %	230.000.000	100%	1.760.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.595.000.000	100%	1.690.000.000	100%	1.775.000.000	100%	1.775.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
10	Program Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	Persentase Kelataan Izin Lingkungan	60 %	60 %	45.050.000	70%	110.000.000	80%	120.000.000									DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
11	Program Peningkatan Kebersihan Kota	Cakupan Penanganan Sampah Perkotaan	85 %	85 %	2.200.000.000	85%	2.400.000.000	90%	2.400.000.000									DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani				27%	3.250.000.000	28%	4.160.000.000	30%	8.990.000.000	32%	8.820.000.000	34%	10.650.000.000	34%	10.650.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	
6	Kependudukan dan Catatan Sipil				1.950.180.000		2.616.866.000		2.248.596.000		3.500.000.000		4.457.563.400		4.150.480.400		4.150.480.400		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	0	100%	662.102.400	100%	678.434.000	100%	652.415.500	100%	522.862.850	100%	573.960.800	100%	608.570.500	100%	608.570.500	DISDUKATPIL	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur		100%	415.195.000	100%	758.301.200	100%	1.074.208.000	100%	1.086.893.200	100%	1.665.487.600	100%	1.155.540.500	100%	1.155.540.500	DISDUKATPIL	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur		100%	-	100%	20.450.000	100%	20.450.000	100%	30.450.000	100%	60.900.000	100%	30.450.000	100%	30.450.000	DISDUKATPIL	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas sumber daya aparatur		100%	30.000.000	100%	45.000.000	100%	40.000.000	100%	67.360.000	100%	183.736.000	100%	202.109.600	100%	202.109.600	DISDUKATPIL	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan		100%	5.773.600	100 -	48.364.800	100 -	71.406.100	100 -	86.219.750	100 -	94.698.000	100 -	103.501.000	100 -	103.501.000	DISDUKATPIL	
6	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dokumen Pribadi Masyarakat (Dokumen Kependudukan)	86,42%	94,38%	837.109.000	95%	1.066.316.000											DISDUKATPIL	
7	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)						97%	160.954.400	83%	452.020.000	88%	497.222.000	93%	546.943.000	93%	546.943.000	DISDUKATPIL	
8	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)						89%	141.932.000	90%	376.098.200	92%	415.654.500	97%	472.949.800	97%	472.949.800	DISDUKATPIL	
9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil						100%	87.230.000	100%	878.096.000	100%	965.904.500	100%	1.030.416.000	100%	1.030.416.000	DISDUKATPIL	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				4.084.876.320		17.653.369.700		19.183.873.450		24.243.653.000		22.066.674.840		22.003.264.780		22.003.264.780		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1	1	906.980.420	100%	3.046.300.000	100%	3.350.930.000	100%	3.540.088.000	100%	3.698.596.800	100%	3.872.456.480	100%	3.872.456.480	DINAS PEMBERMASDES	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur	1	1	242.552.300	100%	925.332.100	100%	1.231.800.000	100%	1.292.480.000	100%	1.364.228.000	100%	1.053.070.800	100%	1.053.070.800	DINAS PEMBERMASDES	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	1	1	13.500.000	100%	14.000.000	100%	48.000.000	100%	52.800.000	100%	58.080.000	100%	63.888.000	100%	63.888.000	DINAS PEMBERMASDES	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas sumber daya aparatur	1	1	80.000.000	100%	220.000.000	100%	242.000.000	100%	250.000.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	DINAS PEMBERMASDES	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	1	107.145.000	100%	186.000.000	100%	204.600.000	100%	101.300.000	100%	110.930.000	100%	116.523.000	100%	116.523.000	DINAS PEMBERMASDES	
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1	1	340.173.600	100%	1.537.340.000	100%	1.274.769.000	100%	1.156.259.000	100%	1.206.459.000	100%	1.266.679.000	100%	1.266.679.000	DINAS PEMBERMASDES	
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatnya persentase kapasitas pengurus ekonomi pedesaan	-	-	-	100%	230.536.000	100%	397.036.000	100%	489.443.200	100%	585.331.840	100%	620.398.300	100%	620.398.300	DINAS PEMBERMASDES	
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa	1	1	1.953.067.000	100%	7.483.644.200	100%	5.905.575.200	100%	10.997.980.300	100%	8.198.549.200	100%	7.781.249.200	100%	7.781.249.200	DINAS PEMBERMASDES	
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya persentase kompetensi aparatur pemerintahan desa	-	-	271.400.000	100%	2.266.252.500	100%	2.924.685.250	100%	3.083.302.500	100%	3.177.000.000	100%	3.088.000.000	100%	3.088.000.000	DINAS PEMBERMASDES	
10	Program Peningkatan dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan dan penguatan pemerintahan desa dan tersedianya data potensi desa		1	170.058.000	100%	1.255.162.600	100%	3.179.478.000	100%	2.980.000.000	100%	3.082.500.000	100%	3.521.000.000	100%	3.521.000.000	DINAS PEMBERMASDES	
11	Program Gerakan Membangun Desa	Terakomodinya aspirasi masyarakat			-	100%	488.802.300	100%	425.000.000	100%	300.000.000	100%	325.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	DINAS PEMBERMASDES	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1.135.425.200		2.096.044.800		2.730.240.000		4.190.000.000		4.949.580.250		5.415.844.438		5.415.844.438		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	831.956.200	100%	510.710.800	100%	962.718.100	100%	1.401.351.000	100%	1.755.545.000	100%	1.941.649.000	100%	1.941.649.000	DISDALDUK & KB	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	100 %	100 %	227.144.000	100%	485.188.000	100%	793.470.000	100%	754.903.000	100%	758.770.000	100%	795.660.000	100%	795.660.000	DISDALDUK & KB	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	-					80 %	38.000.000	90 %	11.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	DISDALDUK & KB	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	-	100%	45.000.000			100%	60.000.000	100%	90.116.000	100%	98.712.000	100%	98.712.000	DISDALDUK & KB	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	76.325.000		82.820.000		88.032.000		90.000.000		108.519.000		118.539.000		118.539.000	DISDALDUK & KB	
6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan remaja yang memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi		100%	59.620.000	100%	59.495.000	100%	59.495.000	100%	123.990.000	100%	170.025.000	100%	186.196.000	100%	186.196.000	DISDALDUK & KB	
7	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/IKR yang mandiri	Cakupan Akseptor KB Mandiri		70%	345.054.000	72%	199.694.500	75%	359.500.000	77%	756.019.000	80%	830.790.000	80%	830.790.000	80%	830.790.000	DISDALDUK & KB	
8	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif		75%	315.606.000	75%	256.205.400	76%	730.389.000	76%	428.321.000	76%	468.658.000	76%	468.658.000	76%	468.658.000	DISDALDUK & KB	
9	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan pelayanan KB baru dan KB aktif		56%	32.450.000	56%	77.300.000	56%	100.699.000	56%	123.089.000	56%	134.982.000	56%	134.982.000	56%	134.982.000	DISDALDUK & KB	
10	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah Kader yang mampu melakukan penyuluhan dalam Kelompok BKB		8 orang	17.295.000	8 orang	17.295.000	8 orang	18.500.000	8 orang	21.275.000	8 orang	24.466.250	8 orang	24.466.250	8 orang	24.466.250	DISDALDUK & KB	
11	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Pembinaan Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah		5 kelompok	49.825.000	5 orang	62.000.000	5 orang	135.403.000	6 orang	140.694.000	6 orang	154.349.000	6 orang	154.349.000	6 orang	154.349.000	DISDALDUK & KB	
12	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan persentase pengguna narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS		4%	21.655.000	4%		4%		4%		5%		5%		5%		DISDALDUK & KB	
13	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Bahan Informasi tentang Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak dikelompok BKB, BKR dan BKL		1 paket	56.190.000				1 paket	101.675.000	1 paket	116.926.250	1 paket	134.465.188	1 paket	134.465.188	1 paket	134.465.188	DISDALDUK & KB
14	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Tri Bina)		1 kegiatan	74.631.000	1 kegiatan		1 kegiatan	231.325.000	1 kegiatan	275.590.000	1 kegiatan	469.281.000	1 kegiatan	515.378.000	1 kegiatan	515.378.000	DISDALDUK & KB	



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Perhubungan				1.827.950.000		7.230.000.000		9.060.000.000		12.977.000.000		17.435.929.000		18.376.483.000		18.376.483.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tertib dan lancarnya pelayanan administrasi perkantoran				100%	5.127.837.700	100%	4.456.190.300	100%	5.621.664.000	100%	6.607.298.000	100%	7.487.916.000	100%	7.487.916.000	DINAS PERHUBUNGAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100%	376.900.000	100%	487.850.000	100%	842.650.000	100%	968.650.000	100%	968.650.000	100%	968.650.000	DINAS PERHUBUNGAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional OPD yang mendukung peningkatan disiplin aparatur						100%	34.000.000	100%	162.000.000	100%	210.200.000	100%	214.720.000	100%	214.720.000	DINAS PERHUBUNGAN
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Perhubungan				100%	155.000.000	100%	223.300.000	100%	250.000.000	100%	400.000.000	100%	435.000.000	100%	435.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dan Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP				58 nilai	74.700.000	60 nilai	89.352.700	61 nilai	147.550.000	62 nilai	185.630.000	63 nilai	201.893.000	63 nilai	201.893.000	DINAS PERHUBUNGAN
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan PAD Sektor Perhubungan Darat	0%	15%	200.250.000	74 juta rupiah	88.800.000	74 juta rupiah	269.245.000									DINAS PERHUBUNGAN
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	100%	100%	155.700.000		591.877.300											DINAS PERHUBUNGAN
8	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase desa yang dilayani angkutan umum	0%	0%	208.600.000	16%	182.685.000	28%	686.652.000	41%	528.937.000	50%	836.117.000	56%	922.228.000	56%	922.228.000	DINAS PERHUBUNGAN
9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Angka pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang	70%	62%	1.153.400.000	23 pelanggaran	330.000.000	22 pelanggaran	499.050.000									DINAS PERHUBUNGAN
10	Program peningkatan kelakuan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	49,00%	55,00%	110.000.000	63%	302.200.000	72%	770.050.000	82%	1.402.090.000	91%	2.808.249.000	100%	1.420.334.000	100%	1.420.334.000	DINAS PERHUBUNGAN
11	Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten						47%	1.544.310.000	73%	2.697.582.000	83%	3.331.708.000	100%	4.400.552.000	100%	4.400.552.000	DINAS PERHUBUNGAN
12	Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas	Angka pelanggaran angkutan umum penumpang dan barang								21 pelanggaran	907.397.000	20 pelanggaran	1.052.227.000	18 pelanggaran	1.242.560.000	18 pelanggaran	1.242.560.000	DINAS PERHUBUNGAN
13	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Peningkatan PAD Sektor Perhubungan Darat (terminal dan parkir)							67 juta rupiah	417.130.000	68 juta rupiah	1.035.850.000	69 juta rupiah	1.082.630.000	69 juta rupiah	1.082.630.000	DINAS PERHUBUNGAN	
10	Komunikasi dan Informatika				129.911.732.612		217.576.138.776		297.692.228.786		308.056.200.490		399.102.332.328		393.879.104.069		393.879.104.069	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.680.500.000	100%	1.160.490.800	100%	1.433.494.700	100%	1.488.023.000	100%	1.729.856.450	100%	1.989.354.920	100%	1.989.354.920	DISKOMINFO
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana kerja aparatur	100 %	100 %	600.250.000	100%	570.120.000	100%	1.664.570.000	100%	350.650.000	100%	1.072.247.500	100%	1.142.534.625	100%	1.142.534.625	DISKOMINFO
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	24.000.000	100%	23.550.000	100%	24.450.000	100%		100%	80.827.500	100%	92.901.625	100%	92.901.625	DISKOMINFO
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	133.000.000	100%	82.500.000	100%	348.500.000	100%	235.000.000	100%	543.775.000	100%	625.341.250	100%	625.341.250	DISKOMINFO
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	37.605.000	100%	16.800.000	100%	17.300.000	100%	22.975.000	100%	79.321.250	100%	91.149.438	100%	91.149.438	DISKOMINFO
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi	1,28%	2,56%	935.000.000	4%	1.948.538.200	6%	2.495.098.400	8%	3.366.311.100	10%	4.678.907.765	10%	5.456.584.055	10%	5.456.584.055	DISKOMINFO
7	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				50 orang	83.720.000	80 orang	268.860.000	90 orang	122.505.000	90 orang	382.880.750	90 orang	440.312.863	90 orang	440.312.863	DISKOMINFO
8	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	100 %	100 %	81.400.000	100%	227.290.910	100%	287.470.000	100%	410.112.550	100%	3.660.629.433	100%	4.209.723.848	100%	4.209.723.848	DISKOMINFO
9	Program Pengelolaan Aspirasi Publik	Terpenuhinya Pengelolaan Aspirasi Publik						1 tahun	38.600.000	1 tahun	29.125.000	1 tahun	33.493.750	100%	38.517.813	100%	38.517.813	DISKOMINFO
10	Program Fasilitasi Bidang Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	100%	100%	711.000.000	100%	656.740.000	100%	482.090.000	100%	3.030.950.000	100%	3.742.592.500	100%	4.303.981.375	100%	4.303.981.375	DISKOMINFO
11	Program Pengembangan Layanan E-Government	Persentase Layanan E-government yang berbasis IT				100%	94.150.000	100%	52.938.200	100%	187.700.000	100%	1.503.855.000	100%	1.729.433.250	100%	1.729.433.250	DISKOMINFO
11	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				113.251.427.506		198.107.813.458		266.790.412.076		279.220.974.828		331.713.740.076		318.354.494.149		318.354.494.149	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100	867.783.100	100%	758.678.000	100%	1.439.145.000	100%	1.181.120.000	100%	1.301.232.000	100%	1.431.355.200	100%	1.431.355.200	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Kerja Aparatur	60%	65	451.576.000	70%	408.822.000	75%	1.208.060.000	80%	604.230.000	85%	1.030.256.000	90%	1.168.513.600	90%	1.168.513.600	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100	17.835.000	100%	30.000.000	100%	72.080.000	100%	31.250.000	100%	68.500.000	100%	77.450.000	100%	77.450.000	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100	96.000.000	100%	129.000.000	100%	156.000.000	100%	199.500.000	100%	239.400.000	100%	287.280.000	100%	287.280.000	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100	25.100.000	100%	34.450.000	100%	69.015.000	100%	89.400.000	100%	341.820.000	100%	376.002.000	100%	376.002.000	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
6	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM yang berdaya saing	3 PUMKM	2	74.624.000	2 UMKM	38.792.000					2 UMKM	220.000.000	2 UMKM	242.000.000	2 UMKM	242.000.000	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha baru per tahun	5 PUMKM	5	201.101.500	7%	201.688.000	9%	328.285.000	10%	491.254.000	11%	612.979.400	12%	674.277.340	12%	674.277.340	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro/kecil yang sudah menerapkan e-commerce	-	0,05	96.443.400		59.520.000		185.455.000		565.555.000		754.110.500		829.521.550		829.521.550	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berkualitas	-	1	364.278.100	1 Buah	300.000.000	1 Buah	331.530.000	1 Buah	474.691.000	1 Buah	894.910.100	1 Buah	990.731.110	1 Buah	990.731.110	DISKOP.UM & PERINDUSTRIAN



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Penanaman Modal				1.290.010.000		3.176.887.700		2.904.359.500		4.000.000.000		4.380.000.000		4.838.000.000		4.838.000.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	545.282.000	100%	1.475.107.700	100%	83.879.500	100%	1.028.500.000	100%	1.129.900.000	100%	1.242.890.000	100%	1.242.890.000	DISNAMDAL & PTSP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Kerja Aparatur	100 %	100 %	195.508.000	100%	461.205.000	100%	796.275.000	100%	367.500.000	100%	406.100.000	100%	446.710.000	100%	446.710.000	DISNAMDAL & PTSP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Perentase Tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	40.500.000	12bulan	94.500.000	12bulan	52.500.000	12bulan	80.000.000	12bulan	66.000.000	12bulan	70.600.000	12bulan	70.600.000	DISNAMDAL & PTSP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	100 %	100 %	178.760.000	100%	314.025.000	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	143.000.000	100%	143.000.000	DISNAMDAL & PTSP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	50.360.000	100%	45.820.000	100%	8.000.000	100%	24.000.000	100%	28.000.000	100%	30.800.000	100%	30.800.000	DISNAMDAL & PTSP
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Sektor Potensi Sumber Daya Investasi	7 Perusahaan	Perusahaan	35.960.000	7 Perusahaan	47.275.000	10 Perusahaan	263.775.000	11 Perusahaan	359.750.000	12 Perusahaan	395.725.000	13 Perusahaan	435.297.500	13 Perusahaan	435.297.500	DISNAMDAL & PTSP
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Sinkronisasi dan Harmonisasi NSPK	5 %	5 %	243.640.000	5%	127.330.000	5%	495.960.000	5%	400.000.000	5%	440.000.000	5%	484.000.000	5%	484.000.000	DISNAMDAL & PTSP
8	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				1 sektor	270.900.000	3 sektor	39.545.000	3 sektor	60.250.000	3 sektor	66.275.000	3 sektor	72.902.500	3 sektor	72.902.500	DISNAMDAL & PTSP
9	Program Penataan NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal				4 NSPK	340.725.000											DISNAMDAL & PTSP
10	Program Pengurangan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat						100%	110.045.000									DISNAMDAL & PTSP
11	Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan								311.080.000		480.000.000		528.000.000		580.800.000		580.800.000	DISNAMDAL & PTSP
12	Program Penataan dan Pengembangan Data Perizinan dan Penanaman Modal							100%	683.300.000									DISNAMDAL & PTSP
13	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsor								100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.331.000.000	DISNAMDAL & PTSP
14	Kepemudaan dan Olahraga				3.492.394.500		3.008.750.000		6.969.849.500		3.483.693.800		16.726.399.990		18.568.379.489		18.568.379.489	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terkelolanya administrasi perkantoran			721.103.500	12bulan	902.611.000	12bulan	1.087.041.600	12bulan	1.250.335.800	12bulan	1.373.449.880	12bulan	1.510.794.868	12bulan	1.510.794.868	DISPORA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terkelolanya peningkatan sarana dan prasarana	100%	100%	253.498.500	100%	176.051.000	100%	1.104.597.100	100%	534.960.000	100%	1.027.760.110	100%	845.715.621	100%	845.715.621	DISPORA
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparat	100%	100%	32.400.000	100%	32.400.000	100%	45.950.000	100%	45.950.000	100%	70.000.000	100%	82.060.000	100%	82.060.000	DISPORA
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat	100%	100%	72.000.000	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	120.000.000	100%	170.000.000	100%	187.000.000	100%	187.000.000	DISPORA
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	400.000	100%	36.400.000	100%	37.900.000	100%	107.900.000	100%	118.690.000	100%	130.559.000	100%	130.559.000	DISPORA
6	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan										100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	DISPORA
7	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda			843.077.500	100%	1.030.000.000	100%	1.517.915.800	100%	599.548.000	100%	1.550.400.000	100%	2.130.400.000	100%	2.130.400.000	DISPORA
8	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Peningkatan jumlah kebijakan dalam pengelolaan pemuda				100%	33.343.000	100%	223.600.000	100%		100%	773.600.000	100%	773.600.000	100%	773.600.000	DISPORA
9	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Peningkatan jumlah kebijakan dalam pengelolaan manajemen olahraga										100%	450.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	DISPORA
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan lemasarakatnya olahraga pertahun			1.300.440.000	100%	727.945.000	100%	2.748.795.000	100%	800.000.000	100%	8.655.000.000	100%	9.518.000.000	100%	9.518.000.000	DISPORA
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	meningkatnya sarana dan prasarana olahraga			301.875.000	100%	10.000.000	100%	200.000.000	100%	25.000.000	100%	2.227.500.000	100%	2.530.250.000	100%	2.530.250.000	DISPORA
15	Statistik				349.000.000		136.100.000		125.228.700		399.793.200		994.056.180		1.133.193.657		1.133.193.657	
1	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Cakupan ketersediaan data/informasi/statistik daerah	100%	100%	349.000.000	13data	136.100.000	13data	125.228.700	15 data	399.793.200	15 data	994.056.180	15data	1.133.193.657	15data	1.133.193.657	DISKOMINFO
16	Persandian				-		-		-		93.950.000		108.042.500		124.248.875		124.248.875	
1	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah								100%	93.950.000	100%	108.042.500	100%	124.248.875	100%	124.248.875	DISKOMINFO
17	Kebudayaan				1.004.320.000		1.082.340.000		1.656.440.000		2.079.015.000		2.594.945.000		3.093.565.000		3.093.565.000	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Nilai Budaya Daerah yang dikembangkan				45%	-	50%	-	60%	94.400.000	70%	100.000.000	80%	150.000.000	80%	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengelolaan Benda Purbakala, Situs cagar Budaya yang dipelihara, Jumlah Peristiwa Sejarah dan Tradisi Daerah yang terdokumentasi dengan lengkap			33.675.000	10 Jumlah	86.500.000	30 Jumlah	300.250.000	100 Jumlah	378.200.000	100 Jumlah	455.000.000	100 Jumlah	495.000.000	100 Jumlah	495.000.000	DINAS PENDIDIKAN
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Siswa Binaan dibidang seni Budaya, Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang digelar dan diikuti			970.645.000	25 Orang	995.840.000	27 Orang	1.356.190.000	28 Orang	1.606.415.000	29 Orang	2.039.945.000	30 Orang	2.448.565.000	30 Orang	2.448.565.000	DINAS PENDIDIKAN



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
18	Perpustakaan				1.391.569.525		6.302.574.200		3.584.135.203		4.499.999.950		4.949.963.945		5.444.999.540		5.444.999.540	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	100%	100%	639.801.125	100%	1.067.552.345	100%	1.515.439.643	100%	1.533.587.300	100%	1.686.946.030	100%	1.855.640.633	100%	1.855.640.633	DINAS PERPUSTAKAAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	667.914.600	100%	5.096.323.365	100%	1.767.973.460	100%	562.153.000	100%	618.368.300	100%	680.205.130	100%	680.205.130	DINAS PERPUSTAKAAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	10.500.000	100%	42.735.000	100%	135.712.500	100%	25.800.000	100%	28.380.000	100%	31.218.000	100%	31.218.000	DINAS PERPUSTAKAAN
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100%	100%	67.000.000	100%	89.250.000	100%	151.200.000	100%	95.500.000	100%	105.050.000	100%	115.555.000	100%	115.555.000	DINAS PERPUSTAKAAN
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100%	100%	6.353.800	100%	6.713.490	100%	13.809.600	100%	17.598.750	100%	19.358.625	100%	21.294.488	100%	21.294.488	DINAS PERPUSTAKAAN
6	Program Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Cakupan Peningkatan Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca							85%	500.263.300	90%	550.289.630	95%	605.318.593	95%	605.318.593	DINAS PERPUSTAKAAN	
7	Program Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka	Meningkatnya koleksi deposit, bahan pustaka yang diminati masyarakat serta pengolahan bahan pustaka							85%	633.847.500	87%	697.196.250	90%	766.955.075	90%	766.955.075	DINAS PERPUSTAKAAN	
8	Program Alih Media dan Pelestarian Bahan Pustaka	Meningkatnya koleksi deposit, bahan pustaka yang diminati masyarakat serta pengolahan bahan pustaka							85%	105.603.600	87%	116.163.960	90%	127.780.356	90%	127.780.356	DINAS PERPUSTAKAAN	
9	Program Pelayanan, TIK, Promosi dan Kerja Sama	Terlaksananya kegiatan monitorin, evaluasi & pelaporan deposit, akuisisi & pengolahan bahan pustaka							75%	1.025.646.500	80%	1.128.211.150	85%	1.241.032.265	85%	1.241.032.265	DINAS PERPUSTAKAAN	
19	Kearsipan				102.631.975		1.284.855.100		2.999.550.000		3.515.000.000		3.732.909.800		4.186.135.850		4.186.135.850	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran		100%		614.825.800	100%	638.847.200	100%	696.489.050	100%	792.758.500	100%	896.388.950	100%	896.388.950	DINAS ARSIP	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%		412.444.900	100%	910.343.300	100%	646.804.000	100%	743.824.600	100%	855.396.500	100%	855.396.500	DINAS ARSIP	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur		100%		26.100.000	100%	29.700.000	100%	37.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	DINAS ARSIP	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		100%		30.000.000	100%	82.000.000	100%	109.300.000	100%	125.695.000	100%	144.549.250	100%	144.549.250	DINAS ARSIP	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan		100%		6.292.400	100%	14.850.000	100%	20.550.000	100%	23.632.500	100%	27.177.500	100%	27.177.500	DINAS ARSIP	
6	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase penciptaan arsip yang mengelola arsip sesuai NSPK dan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK)	100%	100%	20.740.000	4%	28.830.000	17%	288.930.000	41%	774.975.400	70%	597.643.750	100%	601.129.400	100%	601.129.400	DINAS ARSIP
7	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip statis yang dikelola	100%	100%	52.366.975	3%	52.012.000	20%	575.628.500	47%	688.203.800	73%	791.432.450	100%	910.141.250	100%	910.141.250	DINAS ARSIP
8	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase arsip yang terpelihara	100%	100%	29.525.000	100%	19.900.000	100%	195.599.000									DINAS ARSIP
9	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase peningkatan kualitas SDM		20%		94.450.000	25%	263.652.000										DINAS ARSIP
10	Program Pembinaan dan Penyuluhan Kearsipan	Persentase peningkatan kualitas SDM Kearsipan							50%	541.677.750	75%	622.923.000	100%	716.353.000	100%	716.353.000	DINAS ARSIP	
C URUSAN PEMERINTAH PILIHAN					32.046.886.400		55.729.244.150		75.889.341.420		80.653.386.172		87.300.650.931		80.127.111.612		80.127.111.612	
1 Kelautan & Perikanan					4.868.202.900		7.302.460.400		10.484.071.430		12.506.523.073		14.384.574.680		15.722.724.048		15.722.724.048	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi perkantoran				12 bulan	1.002.812.100	12 bulan	1.127.471.100	12 bulan	1.502.024.000	12 bulan	1.605.000.000	12 bulan	1.655.000.000	12 bulan	1.655.000.000	DINAS PERIKANAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana aparatur		100%		100%	721.922.000	100%	1.602.604.000	100%	2.600.849.900	100%	3.004.807.900	100%	2.843.507.900	100%	2.843.507.900	DINAS PERIKANAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	pengadaan pakaian dinas		120 stel		120 stel	-	120 stel	99.500.000	120 stel	99.700.000	120 stel	99.700.000	120 stel	120.000.000	120 stel	120.000.000	DINAS PERIKANAN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan		12 bulan		12 bulan	231.945.000	12 bulan	330.699.900	12 bulan	392.773.100	12 bulan	392.773.100	12 bulan	413.693.100	12 bulan	413.693.100	DINAS PERIKANAN
5	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi :																DINAS PERIKANAN
6		Budidaya (Ton)	590	690	4.061.753.900	710	4.394.116.700	730	5.996.965.370	750	6.646.661.907	780	7.561.328.098	800	8.767.460.907	800	8.767.460.907	DINAS PERIKANAN
7		Tangkap (Ton)	1440	1.198		1.206		1.215		1.223		1.232		1.240		1.240		DINAS PERIKANAN
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Konsumsi Masyarakat terhadap ikan (Kg/Kapita/Th)	40,4	41,2	476.064.000	42	594.670.600	43	709.137.660	44	810.051.426	44	946.056.569	45	1.070.662.225	45	1.070.662.225	DINAS PERIKANAN
9	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Sumberdaya Masyarakat Perikanan	Terbentuknya PokMaswas (klpk)	3	5	330.385.000	5	356.994.000	5	617.693.400	5	454.462.740	5	774.909.014	5	852.399.915	5	852.399.915	DINAS PERIKANAN
10	Program Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	Tersedianya Kawasan Perikanan yang lestari dan berkelanjutan (Ha)	85	100		120		145		200		250		300		300		DINAS PERIKANAN



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19
2	Pariwisata				5.174.479.000		4.472.815.000		8.820.109.000		10.204.487.500		12.265.735.350		15.030.960.801		15.030.960.801	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	1	479.969.000	100%	484.715.000	100%	972.080.000	100%	755.050.000	100%	981.564.600	100%	1.128.799.751	100%	1.128.799.751	DINAS PARIWISATA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	1	53.600.000	100%	245.950.000	100%	1.670.801.000	100%	1.252.100.000	100%	1.626.430.000	100%	1.871.889.500	100%	1.871.889.500	DINAS PARIWISATA
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentasi Meningkatnya Disiplin Aparatur	bh	-	-	100%	2.500.000	100%	59.450.000	100%	14.050.000	100%	23.744.500	100%	27.306.175	100%	27.306.175	DINAS PARIWISATA
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentasi Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	1	72.000.000	100%	32.000.000	100%	158.153.000	100%	256.400.000	100%	391.820.000	100%	450.593.000	100%	450.593.000	DINAS PARIWISATA
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Nilai Lakip		-	-	58 skor	-	61 skor	20.700.000	61 skor	22.400.000	63 skor	29.120.000	64 skor	33.488.000	64 skor	33.488.000	DINAS PARIWISATA
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Berkembangnya Pemasaran Pariwisata			254.950.000		1.775.500.000		2.300.700.000		3.083.650.000		3.645.800.000		4.224.000.000		4.224.000.000	DINAS PARIWISATA
7	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Objek Wisata		1 buah	4.200.000.000	2 buah	1.450.000.000	2 buah	3.000.000.000	2 buah	4.000.000.000	2 buah	4.500.000.000	2 buah	6.000.000.000	2 buah	6.000.000.000	DINAS PARIWISATA
8	Program Pengembangan Kemitraan	Berkembangnya Kemitraan Pariwisata			113.960.000		482.150.000		638.225.000		820.837.500		1.067.256.250		1.294.884.375		1.294.884.375	DINAS PARIWISATA
9	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata				0 kegiatan	-	8 kegiatan	829.092.000	9 kegiatan	479.810.000	10 kegiatan	674.731.800	12 kegiatan	747.649.770	12 kegiatan	747.649.770	DINAS PARIWISATA
3	Pertanian				20.871.270.100		41.371.533.250		52.059.127.390		52.279.132.799		54.248.000.320		42.332.473.925		42.332.473.925	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	1.693.432.390	100%	2.627.320.900	100%	2.620.490.000	100%	2.170.987.770	100%	2.306.065.839	100%	2.536.672.423	100%	2.536.672.423	DINAS PERTANIAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur	100%	100%	1.463.179.090	100%	3.558.411.200	100%	3.034.820.200	100%	2.293.250.450	100%	1.699.426.300	1	1.869.368.930	1	1.869.368.930	DINAS PERTANIAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	203.450.000	100%	332.050.000	100%	340.050.000	100%	280.657.500	100%	245.080.000	100%	269.588.000	100%	269.588.000	DINAS PERTANIAN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	100%	100%	269.738.000	100%	354.524.000	100%	468.924.000	100%	654.340.000	100%	609.776.200	100%	670.753.820	100%	670.753.820	DINAS PERTANIAN
5	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Bertambahnya jumlah produksi padi yang berbebel dan bersertifikat (Ton)	100	125	667.991.700	170	1.608.990.000	250	1.345.000.000	300	1.196.000.000	350	1.310.000.000	400	1.050.000.000	400	1.050.000.000	DINAS PERTANIAN
6	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan	Menekan kehilangan hasil pasca panen(%)		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PERTANIAN
7	Program Peningkatan Luas Area Tanam Pertanian	Target Luas Tanam Padi (Ha)	40.009	40.100	296.877.000	40.200	1.887.107.000	40.300	2.075.817.700	40.400	2.283.399.470	40.500	2.511.739.417	40.600	2.762.913.359	40.600	2.762.913.359	DINAS PERTANIAN
		Target Luas Tanam Jagung (Ha)	1.121	1.000		1.100		1.200		1.300		1.400		1.500		1.500		DINAS PERTANIAN
		Target Luas Tanam Kedelai (Ha)	799	2.000		2.100		2.200		2.300		2.400		2.500		2.500		DINAS PERTANIAN
6	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	(1) Target produksi padi (Ton)	173.423,5	174.435	4.337.459.000	176.880	5.438.626.200	179.335	5.982.488.820	181.800	6.580.737.702	184.275	7.238.811.472	186.760	7.962.692.619	186.760	7.962.692.619	DINAS PERTANIAN
		(2) Target produksi Jagung (ton)	5.044,7	4.500		4.961		5.424		5.889		6.356		6.825		6.825		DINAS PERTANIAN
		(3) Target produksi Kedelai (ton)	959	2.400		2.573		2.750		2.933		3.120		3.313		3.313		DINAS PERTANIAN
		Produktivitas padi per Hektar (Kw/ha)	43,35	43,50		44,00		44,50		45,00		45,50		46,00		46,00		DINAS PERTANIAN
7	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (Ton)			1.372.016.650		1.959.218.000		2.155.139.800		2.370.653.780		2.607.719.158		2.868.491.074		2.868.491.074	DINAS PERTANIAN
		Buah	17.772	18.305		18.854		19.420		2.003		20.603		21.221		21.221		DINAS PERTANIAN
		Sayuran	770	809		849		891		936		983		1.032		1.032		DINAS PERTANIAN
8	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Jumlah peningkatan alat dan mesin serta sarana pengolahan hasil hortikultura (Komoditas)	2 komoditas	2 komoditas	402.545.000	3 komoditas	620.500.000	2 komoditas	483.054.000	2 komoditas	579.664.800	2 komoditas	695.597.760	2 komoditas	765.157.536	2 komoditas	765.157.536	DINAS PERTANIAN
9	Program Peningkatan Produktivitas Kelembagaan Petani	Penerapan PHT hortikultura pada lokasi pengembangan kawasan hortikultura (Kelompok)	3	3	304.285.870	4	334.714.000	5	368.185.900	6	405.004.000	7	445.504.900	8	490.055.000	8	490.055.000	DINAS PERTANIAN
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Temak	Penekanan Angka Kematian Temak (%)	1,02	1,02	1.151.422.300	1,02	1.338.023.000	1,02	1.471.825.300	1,02	1.619.007.830	1,02	1.780.908.613	1,02	1.797.998.000	1,02	1.797.998.000	DINAS PERTANIAN
11	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Target Produksi :			8.708.873.100		19.951.202.200		20.417.406.820		22.391.339.482		24.834.961.800		10.530.133.417		10.530.133.417	DINAS PERTANIAN
		Daging (Kg)	1.206.240	#####		1.235.363		1.250.188		1.265.190		1.280.372		1.295.737		1.295.737		DINAS PERTANIAN
		Telur (Kg)	265.241	279.189		282.819		286.495		290.220		293.993		297.814		297.814		DINAS PERTANIAN
12	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah peningkatnya luas area tanam pertanian (Ha)			100 ha	-	25 ha	-	8.025.137.600	50 ha	7.360.327.750	50 ha	6.258.400.511	75 ha	6.884.240.562	75 ha	6.884.240.562	DINAS PERTANIAN
13	Program Peningkatan Produktivitas Penyuluh Pertanian	jumlah KT utama (kelompok)			16 Kelompok	-	5 kelompok	-	1.364.846.700	4 kelompok	986.651.400	4 kelompok	680.590.350	24 kelompok	748.649.385	24 kelompok	748.649.385	DINAS PERTANIAN
14	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	angka kematian hewan temak			1%		929.676.000	1%	956.840.550	1%	540.436.865	1%	522.918.000	1%	575.209.800	1%	575.209.800	DINAS PERTANIAN
15	Pengembangan Produksi Benih Padi Yang Berbebel dan Bersertifikat	Jumlah Produksi Benih Padi Yang Berbebel dan Bersertifikat			4 ha	-	4 ha	-	544.625.000	4 ha	287.500.000	4 ha	275.000.000	4 ha	302.500.000	4 ha	302.500.000	DINAS PERTANIAN
16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya keterampilan hasil olahan produksi peternakan			0		431.170.750	0	404.475.000	0	279.174.000	1	225.500.000	2	248.050.000	2	248.050.000	DINAS PERTANIAN



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19
4	Perdagangan				1.364.317.900		2.169.132.000		4.000.000.000		6.001.825.000		6.461.493.000		6.590.627.000		7.406.822.400	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				100%	430.769.000	100%	807.557.600	100%	994.911.000	100%	1.100.894.000	100%	1.187.445.000	100%	1.187.445.000	DINAS PERDAGANGAN
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur				100%	211.109.000	100%	360.851.000	100%	515.399.000	100%	344.924.000	100%	434.903.000	100%	434.903.000	DINAS PERDAGANGAN
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur				100%	1.500.000	100%	47.500.000	100%	20.500.000	100%	15.000.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	DINAS PERDAGANGAN
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur				100%	108.000.000	100%	135.000.000	100%	227.500.000	100%	230.000.000	100%	235.000.000	100%	235.000.000	DINAS PERDAGANGAN
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan				0%	-	100%	50.700.000	100%	152.880.000	100%	183.000.000	100%	202.000.000	100%	202.000.000	DINAS PERDAGANGAN
6	Program Pemantauan Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya jumlah data informasi perdagangan dalam negeri	70%	1	520.195.000	1 bh	24.706.000	2 bh	35.810.000									DINAS PERDAGANGAN
7	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan PDRB sektor perdagangan				6%	554.410.000	6%	722.960.000	7%	1.191.365.000	7%	1.325.700.000	8%	1.416.000.000	8%	1.416.000.000	DINAS PERDAGANGAN
8	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	peningkatan produk, sarana dan prasarana yang legal (bh)	200	28	234.308.500	30	255.738.000	33	684.857.000		965.740.000		1.118.320.000		758.372.000		758.372.000	DINAS PERDAGANGAN
9	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan Daya Saing Produk unggulan Daerah	4 produk	6 produk	285.789.400	8 produk	357.500.000	10 produk	677.794.400								677.794.400	DINAS PERDAGANGAN
10	Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	peningkatan kualitas pki dan asongan	60 bh	100 bh	50.450.000	110 bh	69.050.000	120 bh	138.401.000	0%		0%		0%			138.401.000	DINAS PERDAGANGAN
11	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	3 pasar (50%)	3 pasar (30%)	273.575.000	3 pasar (30%)	156.350.000	3 pasar (50%)	338.569.000		1.933.530.000		2.143.655.000		2.314.407.000		2.314.407.000	DINAS PERDAGANGAN
5	Perindustrian				440.827.000		740.000.000		1.377.955.000		1.061.239.000		1.553.428.900		1.708.771.790		1.708.771.790	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase produk industri yang bersertifikat halal	1055 IKM	20 IKM	108.200.000		159.450.000		207.289.000		729.289.000		975.146.800		1.072.661.480		1.072.661.480	DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri	5 Produk	2 Produk	160.586.500	60%	89.800.000	60%	206.700.000	60%	156.950.000	60%	385.782.100	60%	424.360.310	60%	424.360.310	DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN
3	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM yang menerapkan GMP	3 IKM	3 IKM	63.337.500	7%	64.950.000	7%	100.325.000	7%	175.000.000	7%	192.500.000	7%	211.750.000	7%	211.750.000	DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN
4	Program pengembangan kelembagaan industri kecil dan menengah	Jumlah Keaneekaragaman produk industri daerah	8 Produk	10 produk	108.703.000	2 Produk	425.800.000	2 Produk	863.650.000									DISKOP,UM & PERINDUSTRIAN
6	Transmigrasi				171.912.400		511.941.500		987.700.000		1.499.448.800		1.649.393.680		1.814.333.048		1.814.333.048	
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase luas lahan Kirtmans yang diusahakan			171.912.400	15%	409.939.400	18%	899.882.000	18%	778.739.800	20%	778.613.780	25%	857.575.158	25%	857.575.158	DISNAKERTRANS
2	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigran yang berwirausaha/mandiri				20 orang	102.002.100	20 orang	87.818.000	22 orang	790.709.000	30 orang	869.779.900	40 orang	956.757.890	40 orang	956.757.890	DISNAKERTRANS
D	FUNGSI URUSAN PENUNJANG				104.023.031.626		120.996.915.907		147.654.945.569		145.010.518.219		169.062.429.817		186.594.367.637		186.594.367.637	
1	Perencanaan				7.832.838.350		4.921.017.500		10.000.000.000		15.385.081.490		15.388.531.490		15.388.531.490		15.388.531.490	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	1.775.323.350	57 -	1.657.878.500	60 -	1.723.702.600	62 -	1.990.433.490	63 -	1.990.433.490	65 -	1.990.433.490	65 -	1.990.433.490	BAPPEDA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	1.376.177.000	57 -	443.450.000	60 -	902.425.000	62 -	637.925.000	63 -	637.925.000	65 -	637.925.000	65 -	637.925.000	BAPPEDA
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja		156 stell	51.350.000	57 -	24.450.000	60 -	21.450.000	62 -	18.000.000	63 -	21.450.000	65 -	21.450.000	65 -	21.450.000	BAPPEDA
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja	38 kali	48 kali	243.000.000	57 -	158.000.000	60 -	144.000.000	62 -	300.000.000	63 -	300.000.000	65 -	300.000.000	65 -	300.000.000	BAPPEDA
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja		13 dokumen	122.350.000	57 -	104.000.000	62 -	102.842.400	63 -	95.188.000	63 -	95.188.000	65 -	95.188.000	65 -	95.188.000	BAPPEDA
6	Program Pengembangan data/informasi	Persentase tingkat ketersediaan data & informasi pembangunan daerah	100%	100%	389.930.000	35%	275.300.000	45%	701.090.000	55%	2.460.650.000	60%	2.460.650.000	70%	2.460.650.000	70%	2.460.650.000	BAPPEDA
7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	80%	82%	715.314.000	80%	258.369.000	85%	567.835.000	90%	1.896.290.000	95%	1.896.290.000	100%	1.896.290.000	100%	1.896.290.000	BAPPEDA
8	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	80%	82%	3.159.394.000	80%	1.257.760.000	85%	2.302.295.000	90%	2.743.060.000	95%	2.743.060.000	100%	2.743.060.000	100%	2.743.060.000	BAPPEDA
9	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase pencapaian program prioritas target RPJMD bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya				75%	741.410.000	80%	1.841.425.000	85%	2.500.135.000	90%	2.500.135.000	95%	2.500.135.000	95%	2.500.135.000	BAPPEDA
10	Program Perencanaan Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian program prioritas target RPJMD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana				75%	-	80%	1.692.935.000	85%	2.743.400.000	90%	2.743.400.000	95%	2.743.400.000	95%	2.743.400.000	BAPPEDA
2	Keuangan				12.292.082.275		17.648.125.799		19.318.220.719		14.000.000.000		23.001.829.170		25.089.759.087		25.089.759.087	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.400.744.725	100%	2.921.969.900	100%	3.100.784.600	100%	2.530.740.750	100%	3.557.516.380	100%	3.913.268.018	100%	3.913.268.018	BAKEUDA
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur	100 %	100 %	466.193.700	100%	1.949.110.299	100%	1.562.926.000	100%	669.416.000	100%	1.215.373.600	100%	1.164.890.460	100%	1.164.890.460	BAKEUDA
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	18.450.000	100%	352.250.000	100%	99.000.000	100%	33.250.000	100%	108.900.000	100%	79.557.500	100%	79.557.500	BAKEUDA
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	329.883.500	100%	369.264.100	100%	434.264.100	100%	428.800.000	100%	557.916.810	100%	613.708.491	100%	613.708.491	BAKEUDA
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	230.529.000	100%	650.426.400	100%	318.090.000	100%	268.000.000	100%	409.343.000	100%	450.277.300	100%	450.277.300	BAKEUDA
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	100 %	8.846.281.350	100%	7.493.330.200	100%	9.636.418.519	100%	6.577.775.000	100%	11.190.300.000	100%	12.309.330.000	100%	12.309.330.000	BAKEUDA
7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB				100%	2.337.737.400	100%	2.598.700.000	100%	2.027.021.850	100%	3.642.959.320	100%	4.007.255.252	100%	4.007.255.252	BAKEUDA
8	Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat				80%	1.574.037.500	80%	1.568.037.500	80%	1.464.996.400	80%	2.319.520.060	80%	2.551.472.066	80%	2.551.472.066	BAKEUDA



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab				
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				1.602.279.600		8.558.850.800		10.054.065.600		9.677.593.400		9.567.295.600		9.567.295.600		9.567.295.600			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	100 %	1.093.309.600	100 %	963.352.800	100 %	1.148.279.800	100 %	728.226.900	100 %	728.226.900	100 %	728.226.900	100 %	728.226.900	BKPPD		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	PERSENTASI KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI	60 %	65 %	219.970.000	65 %	354.421.400	70 %	434.040.000	75 %	217.093.500	80 %	217.093.500	85 %	217.093.500	85 %	217.093.500	BKPPD		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	TERPENUHINYA SARANA PENDUKUNG DISIPLIN APARATUR	100 %	100 %	-	100 %	54.550.000	100 %	37.900.000	100 %	37.900.000	100 %	-	100 %	-	100 %	-	BKPPD		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR	50 %	60 %	150.000.000	65 %	198.218.000	70 %	457.344.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	BKPPD		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	NILAI LKIP SKPD	-	Nilai 60	139.000.000	0 -	101.125.000	80 -	111.025.000	82 -	127.100.000	83 -	127.100.000	84 -	127.100.000	84 -	127.100.000	BKPPD		
6	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	PROSENTASE PNS YANG MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN				40 %	3.615.865.000	48 %	4.754.299.000	57 %	2.567.295.600	65 %	2.567.295.600	74 %	2.567.295.600	74 %	2.567.295.600	BKPPD		
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi				84 %	839.528.000	85 %	1.019.080.400	89 %	473.330.000	90 %	498.330.000	92 %	498.330.000	92 %	498.330.000	BKPPD		
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi				84 %	531.790.600	85 %	648.097.400	89 %	550.054.000	90 %	550.054.000	92 %	550.054.000	92 %	550.054.000	BKPPD		
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	PROSENTASE PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU				100 -	1.900.000.000	100 -	1.444.000.000	100 -	2.047.397.800	100 -	1.950.000.000	100 -	1.950.000.000	100 -	1.950.000.000	BKPPD		
10	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV				-	-	-	-	-	2.929.195.600	-	2.929.195.600	-	2.929.195.600	-	2.929.195.600	BKPPD		
4	Penelitian dan Pengembangan				510.437.000		2.346.051.100		7.000.000.000		9.000.000.000		10.064.999.200		11.071.500.000		11.071.500.000			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien				100 %	688.936.600	100 %	1.483.216.000	100 %	1.159.508.000	100 %	1.275.458.000	100 %	1.403.004.680	100 %	1.403.004.680	BALITBANGDA		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur				100 %	451.850.000	100 %	967.400.000	100 %	488.250.000	100 %	537.075.000	100 %	590.782.500	100 %	590.782.500	BALITBANGDA		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan pegawai				100 %	8.000.000	100 %	80.000.000	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	24.200.000	BALITBANGDA		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				100 %	150.000.000	100 %	250.000.000	100 %	220.000.000	100 %	242.000.000	100 %	266.200.000	100 %	266.200.000	BALITBANGDA		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	99.110.000	100 %	399.050.000	100 %	112.210.000	100 %	123.431.000	100 %	135.774.100	100 %	135.774.100	BALITBANGDA		
6	Program Konservasi Sumber Daya Kebun Raya	Tersedianya konservasi sumber daya kebun raya				0 %	-	0 %	825.359.000	20 %	4.908.108.000	30 %	5.398.918.800	0	5.938.810.680	0	5.938.810.680	BALITBANGDA		
7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kebijakan				54 %	510.437.000	23 %	-	27 %	1.295.837.500	0 %	-	0 %	-	0 %	-	BALITBANGDA		
8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemangku kepentingan					0 %	-	0 %	-	29 %	591.924.000	55 %	651.116.400	1	716.228.040	1	716.228.040	BALITBANGDA	
9	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sosial, Ekonomi dan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang					0 %	-	0 %	-	62 %	1.500.000.000	82 %	1.815.000.000	1	1.996.500.000	1	1.996.500.000	BALITBANGDA	
10	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan				23 %	950.154.500	46 %	1.699.137.500	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	BALITBANGDA		
5	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum				77.158.224.201		81.565.191.908		94.126.448.170		92.704.955.479		106.397.341.857		120.370.605.710		120.370.605.710			
1	SEKRETARIAT DAERAH				45.286.239.521		41.227.821.558		42.004.124.510		49.662.740.012		55.627.819.014		61.495.627.897		61.495.627.897			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Kelatasausahaan dan Kepegawaian di				100	15.637.810.000	100 %	12.520.384.550	100 %	11.515.550.800	100 %	13.206.025.800	100 %	15.979.291.218	100 %	15.979.291.218	SEKRETARIAT DAERAH		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana kerja aparatur				100	25.015.950.115	90 %	14.362.314.000	90 %	12.893.750.000	90 %	11.046.900.000	90 %	14.466.749.000	90 %	14.466.749.000	SEKRETARIAT DAERAH		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat pemahaman aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan (%)				100	330.000.000	100 %	467.395.000	100 %	1.277.969.500	100 %	960.000.000	100 %	1.161.600.000	100 %	1.161.600.000	SEKRETARIAT DAERAH		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP				62,51	703.273.600	100 %	358.000.000	100 %	1.182.207.000	100 %	1.728.614.650	100 %	1.901.476.115	100 %	2.091.623.727	SEKRETARIAT DAERAH		
5	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama (MoU) daerah yang terealisasi				100	327.030.000	5 MoU	139.969.200	5 MoU	147.835.000	0 MoU	-	0 MoU	-	0 MoU	-	SEKRETARIAT DAERAH		
6	Program Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah kerjasama /kesepakatan yang difasilitasi (kerjasama)						5 Kerjasama	35.900.000	5 Kerjasama	147.835.000	0 Kerjasama	-	0 Kerjasama	-	0 Kerjasama	-	SEKRETARIAT DAERAH		
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih				100	1.435.210.000	100 %	1.424.205.000	100 %	1.074.540.000	100 %	1.074.540.000	100 %	1.181.994.000	100 %	1.300.193.400	SEKRETARIAT DAERAH		
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Terlaksananya RANHAM di kabupaten Balangan				100	300.000.000	80 nilai	15.250.000	81 nilai	424.690.000	0 nilai	-	0 nilai	-	0 nilai	-	SEKRETARIAT DAERAH		
9	Program Penataan Kelembagaan dan Ketabaksanaan	Persentase SKPD/unit kerja yang tepat ukuran dan fungsi (%)				12,82	400.000.000	0 %	918.675.000	100 %	692.450.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	SEKRETARIAT DAERAH		
10	Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan	Meningkatnya kesesuaian pedoman dan pelaksanaan tugas SKPD				89	98.840.800	89 %	119.600.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	0 %	-	SEKRETARIAT DAERAH		
11	Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	pemantauan dan pelaksanaan pembangunan (%)						100 %	369.375.000	100 %	158.875.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-	SEKRETARIAT DAERAH		
12	Program Evasasi/Kalifikasi Produk Hukum dan Fasilitasi HAM	Terlaksananya RANHAM di kabupaten Balangan				100	23.125.000	100 %	15.250.000	100 %	39.950.000	100 %	39.950.000	100 %	48.339.500	100 %	48.339.500	SEKRETARIAT DAERAH		
13	Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan Laporan Kinerja sesuai aturan (%)						100	82.155.000	100	573.020.000	100	610.189.500	100	738.329.295	100	738.329.295	SEKRETARIAT DAERAH		
14	Program Pemantapan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase SKPD/unit kerja yang tepat ukuran dan fungsi (%)						0 %	-	100 %	115.210.000	100 %	930.549.500	100 %	1.125.964.895	100 %	1.125.964.895	SEKRETARIAT DAERAH		
15	Pembentukan dan Peningkatan Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang memberikan kontribusi terhadap PAD				0	BUMD	-	2 BUMD	2 BUMD	27.407.200	2 BUMD	203.750.000	2 BUMD	224.125.000	2 BUMD	246.537.500	2 BUMD	246.537.500	SEKRETARIAT DAERAH
16	Program Pemantauan Harga Bahan Pokok Pemicu Inflasi	Terkendalinya harga bahan pokok pemicu inflasi				0	laporan	-	100 laporan	100 laporan	85.690.000	100 laporan	365.450.000	100 laporan	401.995.000	100 laporan	442.194.500	100 laporan	442.194.500	SEKRETARIAT DAERAH



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatkan disiplin kehadiran kerja aparatur			100%	152.800.000	100%	210.050.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SEKRETARIAT DAERAH
18	Program Peningkatan promosi daerah	Meningkatnya promosi daerah			0%	-	100%	438.958.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SEKRETARIAT DAERAH
19	Program Peningkatan Usulan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Jumlah tempat ibadah/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan yang layak pakai			0 buah	-	0 buah	35 buah	8.446.765.000	35 buah	9.291.441.500	35 buah	10.220.585.650	35 buah	10.220.585.650	35 buah	10.220.585.650	SEKRETARIAT DAERAH	
20	Program Koordinasi Promosi Daerah	terlaksananya koordinasi promosi daerah			0%	-	0%	100%	451.037.000	100%	496.140.700	100%	545.754.750	100%	545.754.750	100%	545.754.750	SEKRETARIAT DAERAH	
21	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan tepat waktu			0 laporan	-	0 laporan	3 Laporan	1.373.350.000	3 Laporan	1.510.685.000	3 Laporan	1.661.753.500	3 Laporan	1.661.753.500	3 Laporan	1.661.753.500	SEKRETARIAT DAERAH	
22	Program Penataan Administrasi Kewilayahan	Persentase pilar batas wilayah dalam kondisi baik			0%	-	0%	31%	696.490.000	43%	766.139.000	55%	842.752.900	55%	842.752.900	55%	842.752.900	SEKRETARIAT DAERAH	
23	Program Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat kematangan variabel ULP			0%	-	0%	55%	1.984.530.500	60%	2.182.983.550	60%	2.401.281.905	60%	2.401.281.905	60%	2.401.281.905	SEKRETARIAT DAERAH	
24	Program Optimalisasi Monitoring Pembangunan	pemantauan dan pelaksanaan pembangunan			0%	-	0%	100%	185.610.000	100%	204.171.000	100%	224.588.100	100%	224.588.100	100%	224.588.100	SEKRETARIAT DAERAH	
25	Program Peningkatan Sistem Penyelesaian Permasalahan Hukum yang menyangkut bidang tugas pemerintah daerah	Persentase penanganan kasus pengadilan yang diselesaikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan			0%	-	0%	100%	397.345.000	100%	437.079.500	100%	480.787.450	100%	480.787.450	100%	480.787.450	SEKRETARIAT DAERAH	
26	Program Desk Pemilu Legislatif/Pilpres/Pilkada	Laporan Berkala Hasil Pemilu Legislatif/Pilpres/Pilkada			0 laporan	-	0 laporan	1 laporan	93.750.000	1 laporan	101.930.000	1 laporan	417.150.000	1 laporan	417.150.000	1 laporan	417.150.000	SEKRETARIAT DAERAH	
27	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan produk unggulan sebagai sarana promosi			100%	99.390.000	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SEKRETARIAT DAERAH	
28	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi di Kabupaten Balangan			25%	945.188.800	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	SEKRETARIAT DAERAH	
29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang disurvei pelayannya			10 SKPD	71.120.000	18 SKPD	139.915.000	20 SKPD	224.104.800	22 SKPD	246.515.280	24 SKPD	271.166.808	24 SKPD	271.166.808	24 SKPD	271.166.808	SEKRETARIAT DAERAH
30	Optimalisasi Pengelolaan Dana CSR	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan perusahaan swasta sebagai dana kewajiban sosial untuk kesejahteraan masyarakat			0 sarana/pra sarana	-	0 sarana/pra sarana	1 sarana/pra sarana	210.868.250	1 sarana/pra sarana	231.955.075	1 sarana/pra sarana	255.150.583	1 sarana/pra sarana	255.150.583	1 sarana/pra sarana	255.150.583	SEKRETARIAT DAERAH	
31	Program Reformasi Birokrasi	Nilai PMPRB			34 nilai	-	34 nilai	34 nilai	66.410.000	34 nilai	73.051.000	34 nilai	80.356.100	34 nilai	80.356.100	34 nilai	80.356.100	SEKRETARIAT DAERAH	
32	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang diliput dan dipublikasikan (kegiatan)	100	1.015.000.000	300 Kegiatan	810.110.000	300 Kegiatan	2.123.115.000	300 Kegiatan	4.379.760.000	300 Kegiatan	4.817.736.000	300 Kegiatan	5.299.509.600	300 Kegiatan	5.299.509.600	300 Kegiatan	5.299.509.600	SEKRETARIAT DAERAH
33	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pelaksanaan perayaan hari-hari besar			100%	2.072.481.000	100%	2.299.517.000	100%	986.750.000	100%	1.085.425.000	100%	1.193.967.500	100%	1.193.967.500	100%	1.193.967.500	SEKRETARIAT DAERAH
34	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Tempat ibadah/Lembaga/Organisasi kemasyarakatan yang layak pakai			35 buah	5.971.509.000	35 buah	6.435.590.000	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	0 buah	-	SEKRETARIAT DAERAH
II	SEKRETARIAT DPRD				24.984.225.000	24.747.002.200	32.150.000.000	25.000.000.000	30.100.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.347.800.000	100%	6.523.759.340	100%	7.334.140.000	100%	6.151.415.000	100%	7.381.698.000	100%	8.858.037.600	100%	8.858.037.600	SEKRETARIAT DPRD	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4.623.500.000	100%	1.836.562.860	100%	6.876.230.000	100%	3.049.000.000	100%	3.758.800.000	100%	4.390.560.000	100%	4.390.560.000	SEKRETARIAT DPRD	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	455.000.000	100%	205.850.000	100%	496.800.000	100%	660.550.000	100%	792.660.000	100%	951.192.000	100%	951.192.000	SEKRETARIAT DPRD	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	1.471.500.000	100%	720.500.000	100%	711.000.000	100%	836.000.000	100%	1.003.200.000	100%	1.203.840.000	100%	1.203.840.000	SEKRETARIAT DPRD	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	40.050.000	100%	39.000.000	100%	46.800.000	100%	46.800.000	100%	56.160.000	100%	67.392.000	100%	67.392.000	SEKRETARIAT DPRD	
6	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	100%	100%	9.987.875.000	100%	15.129.480.000	100%	16.278.180.000	100%	14.076.235.000	100%	16.891.482.000	100%	20.269.778.400	100%	20.269.778.400	SEKRETARIAT DPRD	
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan peraturan perundang-undangan	100%	100%	58.500.000	60%	291.850.000	65%	406.850.000	70%	180.000.000	75%	216.000.000	80%	259.200.000	80%	259.200.000	SEKRETARIAT DPRD	
III	KECAMATAN AWAYAN				912.116.000	2.119.990.600	2.414.700.000	2.000.000.000	2.246.147.500	2.432.262.250	2.432.262.250	2.432.262.250	2.432.262.250	2.432.262.250	2.432.262.250	2.432.262.250	2.432.262.250		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	363.540.000	100%	642.336.100	100%	550.950.000	100%	599.855.000	100%	659.840.500	100%	725.824.550	100%	725.824.550	KEC. AWAYAN	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100%	100%	328.150.000	100%	556.029.500	100%	273.165.000	100%	216.785.000	100%	273.463.500	100%	262.309.850	100%	262.309.850	KEC. AWAYAN	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Aparatur	100%	100%	7.750.000	100%	26.000.000	100%	401.200.000	100%	94.500.000	100%	103.950.000	100%	114.345.000	100%	114.345.000	KEC. AWAYAN	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Bimtek	100%	100%	58.850.000	100%	100.000.000	100%	82.500.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	133.100.000	KEC. AWAYAN	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD yang tersedia	67%	67%	20.700.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	KEC. AWAYAN	
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang dibina selama satu tahun	100%	100%	31.980.000	100%	31.980.000	100%	94.050.000	100%	116.720.000	100%	128.392.000	100%	141.231.200	100%	141.231.200	KEC. AWAYAN	
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan dilaksanakan satu tahun	100%	100%	1 Kegiatan	9.735.000	1 Kegiatan	8.775.000	1 Kegiatan	10.720.000	2 Kegiatan	23.000.000	2 Kegiatan	25.300.000	2 Kegiatan	25.300.000	2 Kegiatan	25.300.000	KEC. AWAYAN
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Kegiatan dibidang Pemerintahan Umum dan Sosial Kemasyarakatan yang dilaksanakan	100%	100%	133.126.000	5 Kegiatan	196.600.000	5 Kegiatan	259.460.000	5 Kegiatan	309.760.000	5 Kegiatan	340.736.000	5 Kegiatan	374.809.600	5 Kegiatan	374.809.600	KEC. AWAYAN	
9	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Perempuan	100%	100%	2 Kegiatan	111.675.000	2 Kegiatan	131.915.000	1 Kegiatan	41.800.000	1 Kegiatan	45.980.000	1 Kegiatan	50.578.000	1 Kegiatan	50.578.000	1 Kegiatan	50.578.000	KEC. AWAYAN
10	Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 IKM	56.490.000	80 IKM	96.400.000	80 IKM	96.400.000	80 IKM	47.800.000	80 IKM	52.580.000	85 IKM	57.838.000	85 IKM	57.838.000	85 IKM	57.838.000	KEC. AWAYAN
11	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam Kegiatan MTQ	100%	100%	91.025.000	100%	93.425.000	100%	101.625.000	100%	111.787.500	100%	122.966.250	100%	122.966.250	100%	122.966.250	KEC. AWAYAN	
12	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Jumlah data basis pemerintahan Kabupaten Balangan yang disusun	0%	0%	-	100%	73.260.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	KEC. AWAYAN	
13	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan laporan	100%	100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000	100%	280.500.000	100%	308.550.000	100%	308.550.000	KEC. AWAYAN	
14	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Jumlah Usulan yang diakomodir	70%	70%	20.350.000	75%	22.250.000	80%	22.250.000	80%	22.250.000	90%	24.475.000	100%	26.922.500	100%	26.922.500	KEC. AWAYAN	



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IV	KECAMATAN BATUMANDI				888.086.500		1.778.875.000		1.863.676.000		1.886.026.000		2.049.428.600		2.225.321.460		2.225.321.460	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	500.006.200	100%	917.702.000	100%	814.418.500	100%	805.487.000	100%	886.035.700	100%	974.639.270	100%	974.639.270	KEC. BATUMANDI
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100%	100%	123.703.300	100%	190.595.000	100%	247.895.000	100%	296.105.000	100%	325.715.500	100%	358.287.050	100%	358.287.050	KEC. BATUMANDI
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin	100%	100%	24.550.000	100%	15.400.000	100%	12.000.000	100%	35.000.000	100%	38.500.000	100%	38.500.000	100%	38.500.000	KEC. BATUMANDI
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	100%	70%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	110.000.000	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	84.700.000	100%	84.700.000	KEC. BATUMANDI
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	100%	-	100%	6.500.000	100%	10.900.000	100%	15.100.000	100%	16.610.000	100%	18.271.000	100%	18.271.000	KEC. BATUMANDI
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertalinya Daerah Otonomi Baru	100%	100%	125.102.000	100%	172.160.000	100%	218.237.500	100%	241.990.000	100%	266.189.000	100%	292.807.900	100%	292.807.900	KEC. BATUMANDI
7	Program Operasional Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan				100%	59.610.000	100%	98.225.000	100%	62.846.000	100%	69.130.600	100%	76.043.660	100%	76.043.660	KEC. BATUMANDI
8	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Jumlah Pembinaan Keagamaan Masyarakat	100%	100%	54.725.000	100%	65.475.000	100%	80.250.000	100%	85.348.000	100%	93.882.800	100%	103.271.080	100%	103.271.080	KEC. BATUMANDI
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas Kelembagaan				0%	8.558.000	0%		0%		0%		0%		0%		KEC. BATUMANDI
10	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT				100%	252.000.000	100%	252.000.000	100%	252.000.000	100%	252.000.000	100%	252.000.000	100%	252.000.000	KEC. BATUMANDI
11	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Jumlah Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Kegiatan	15.875.000	1 Kegiatan	19.750.000	1 Kegiatan	22.150.000	1 Kegiatan	24.365.000	1 Kegiatan	26.801.500	1 Kegiatan	26.801.500	KEC. BATUMANDI
V	KECAMATAN HALONG				785.890.000		1.861.750.000		2.430.550.000		2.200.000.000		2.441.325.000		2.776.569.000		2.776.569.000	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			419.245.000	100%	593.064.000	100%	625.907.500	100%	702.559.000	100%	806.150.000	100%	926.750.000	100%	926.750.000	KEC. HALONG
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi				100%	252.975.000	100%	191.700.000	100%	362.750.000	100%	415.700.000	100%	457.600.000	100%	457.600.000	KEC. HALONG
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur SKPD yang disiplin			26.950.000	100%	13.500.000	100%	399.300.000	100%	52.500.000	100%	37.500.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	KEC. HALONG
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek			40.000.000	15 Orang	150.000.000	15 Orang	170.707.000	20 Orang	170.000.000	22 Orang	195.000.000	25 Orang	200.000.000	25 Orang	200.000.000	KEC. HALONG
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP SKPD			-	63%	82.466.000	63%	67.821.500	65%	9.283.000	73%	13.200.000	75%	14.519.000	75%	14.519.000	KEC. HALONG
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang ikut dalam lomba desa			5.700.000	100%	7.820.000	100%	39.780.000	100%	42.105.000	100%	48.500.000	100%	55.780.000	100%	55.780.000	KEC. HALONG
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur desa dan kecamatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			13.390.000	100%	29.480.000	0%		100%	32.187.000	100%	35.500.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	KEC. HALONG
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan			151.360.000	3 Kali	209.500.000	3 Kali	279.550.000	4 Kali	293.025.000	4 Kali	293.025.000	4 Kali	356.970.000	4 Kali	356.970.000	KEC. HALONG
9	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat			46.470.000	100%	30.480.000	100%	68.320.000	100%	20.650.000	100%	23.750.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	KEC. HALONG
10	Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)				75%		75%	66.989.000	80%	36.964.000	80%	39.500.000	80%	45.450.000	80%	45.450.000	KEC. HALONG
11	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase Terbinanya Keagamaan Masyarakat			70.925.000	100%	89.725.000	100%	86.975.000	100%	91.100.000	100%	104.750.000	100%	120.500.000	100%	120.500.000	KEC. HALONG
12	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan				100%	39.840.000	100%	73.000.000	100%	24.277.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	KEC. HALONG
13	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan				100%	351.000.000	100%	351.000.000	100%	351.000.000	100%	386.000.000	100%	424.000.000	100%	424.000.000	KEC. HALONG
14	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase jumlah musrenbang tingkat kecamatan			11.850.000	100%	11.900.000	100%	9.500.000	100%	11.600.000	100%	12.750.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	KEC. HALONG
VI	KECAMATAN JUAI				854.375.980		1.727.503.450		2.611.773.610		2.511.674.867		2.640.653.428		2.772.533.771		2.772.533.771	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	305.374.050	100%	541.312.100	100%	792.918.110	100%	899.079.367	100%	973.919.503	100%	1.064.211.453	100%	1.064.211.453	KEC. JUAI
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana yang layak fungsi	100 %	100 %	164.840.930	100%	302.110.350	100%	488.272.500	100%	488.272.500	100%	412.383.925	100%	451.822.318	100%	451.822.318	KEC. JUAI
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	32.350.000	100%	15.300.000	100%	409.300.000	100%	25.000.000	100%	70.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	KEC. JUAI
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek	100 %	100 %	59.000.000	15 Orang	115.000.000	15 Orang	97.000.000	20 Orang	100.000.000	22 Orang	150.000.000	30 Orang	170.000.000	30 Orang	170.000.000	KEC. JUAI
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip SKPD	100 %	100 %	45.706.000	63%	13.290.000	63%	15.880.000	65%	15.880.000	75%	16.090.000	80%	16.500.000	80%	16.500.000	KEC. JUAI
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang ikut dalam lomba desa				100%	86.101.000	100%	75.213.000	100%	76.738.000	100%	105.260.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	KEC. JUAI
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur desa dan kecamatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan				100%		100%		0%	40.000.000	0%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	KEC. JUAI
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan	1 Keg	0 Keg	234.505.000	100%	228.756.000	100%	280.900.000	100%	324.415.000	100%	342.000.000	100%	354.000.000	100%	354.000.000	KEC. JUAI
9	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Persentase pelayanan kepada masyarakat	0 Keg	0 Keg	12.600.000	100%	12.660.000	100%	65.000.000	100%	67.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	KEC. JUAI
10	Program Operasional Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)				0 Bulan		12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	67.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	KEC. JUAI
11	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase terbinanya keagamaan masyarakat				100%	147.974.000	100%	94.000.000	100%	104.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	KEC. JUAI
12	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase jumlah RT yang menyampaikan laporan				12 Bulan	258.000.000	12 Bulan	258.000.000	12 Bulan	276.000.000	12 Bulan	276.000.000	12 Bulan	276.000.000	12 Bulan	276.000.000	KEC. JUAI
13	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase jumlah musrenbang tingkat kecamatan				100%	7.000.000	100%	15.290.000	100%	15.290.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	KEC. JUAI



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penganggung Jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	
VII	KECAMATAN LAMPHONG				944.850.000		1.864.500.000		2.477.200.000		2.000.000.000		2.166.800.000		2.383.180.000		2.383.180.000		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		1 Tahun	370.389.300	12 Bulan	616.273.500	12 Bulan	671.913.200	12 Bulan	774.306.900	12 Bulan	748.093.170	12 Bulan	822.902.487	12 Bulan	822.902.487	KEC. LAMPHONG	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100,0%	238.762.900	100%	226.194.700	100%	314.579.900	100%	174.455.700	100%	200.921.270	100%	221.013.397	100%	221.013.397	KEC. LAMPHONG	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur		100,0%	25.200.000	0 Stell	-	405 Stell	451.200.000	80 Stell	10.000.000	0 Stell	-	0 Stell	-	0 Stell	-	KEC. LAMPHONG	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur		100,0%	42.534.800	1 Tahun	170.950.600	1 Tahun	158.221.400	1 Tahun	218.743.000	1 Tahun	212.319.470	1 Tahun	233.551.417	1 Tahun	233.551.417	KEC. LAMPHONG	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan		2 Kegiatan	4.119.400	2 Kegiatan	11.684.600	2 Kegiatan	9.944.600	2 Kegiatan	17.271.200	2 Kegiatan	25.378.320	2 Kegiatan	27.916.152	2 Kegiatan	27.916.152	KEC. LAMPHONG	
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Meningkatnya pembinaan desa dan kelurahan				2 Kegiatan	66.853.700	2 Kegiatan	40.875.000	2 Kegiatan	33.885.000	2 Kegiatan	48.493.500	2 Kegiatan	53.342.850	2 Kegiatan	53.342.850	KEC. LAMPHONG	
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertaksananya penataan daerah otonomi baru		100%	194.488.750	5 Kegiatan	240.351.700	5 Kegiatan	308.982.800	5 Kegiatan	321.097.800	5 Kegiatan	415.918.580	5 Kegiatan	457.510.438	5 Kegiatan	457.510.438	KEC. LAMPHONG	
8	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat				1 Kegiatan	80.120.000	1 Kegiatan	50.000.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	KEC. LAMPHONG	
9	Program Operasional Kecamatan	Meningkatnya indeks kualitas pelayanan Publik				80 KM	26.241.400	85 KM	41.975.400	90 KM	57.124.200	90 KM	88.815.870	90 KM	97.697.457	90 KM	97.697.457	KEC. LAMPHONG	
10	Program Pengembangan Informasi Wilayah	Meningkatnya Pengembangan informasi wilayah				1 Buah	7.500.000	1 Buah	24.864.000	0 Buah	-	0 Buah	-	0 Buah	-	0 Buah	-	KEC. LAMPHONG	
11	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meninkahnya pembinaan keagamaan masyarakat			47.518.250	3 Keg	114.326.100	3 Keg	82.190.000	3 Keg	80.770.000	3 Keg	88.847.000	3 Keg	97.731.700	3 Keg	97.731.700	KEC. LAMPHONG	
12	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Jumlah pembinaan dan penguatan kelembagaan RT				1 Tahun	-	1 Tahun	297.000.000	1 Tahun	297.040.000	1 Tahun	310.000.000	1 Tahun	341.000.000	1 Tahun	341.000.000	KEC. LAMPHONG	
13	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya pemantauan dan pelaksanaan pembangunan		1 kegiatan	21.836.600	1 Kegiatan	304.003.700	1 Kegiatan	25.453.700	1 Kegiatan	15.306.200	1 Kegiatan	28.012.820	1 Kegiatan	30.514.102	1 Kegiatan	30.514.102	KEC. LAMPHONG	
VIII	KECAMATAN PARINGIN				909.634.000		2.686.865.000		3.383.414.600		3.044.514.600		3.820.041.615		4.177.655.482		4.177.655.482		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya layanan administrasi perkantoran		12 Bln	616.046.000	12 Bulan	1.443.978.000	12 Bulan	1.573.038.000	12 Bulan	1.487.345.500	12 Bulan	1.636.080.050	12 Bulan	1.799.688.055	12 Bulan	1.799.688.055	KEC. PARINGIN	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		1	164.888.000	100%	456.053.500	100%	605.537.500	100%	458.994.500	100%	536.353.950	100%	589.989.345	100%	589.989.345	KEC. PARINGIN	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		12 Bln	33.000.000	100%	60.700.000	100%	293.750.000	100%	41.600.000	100%	425.265.500	100%	467.792.050	100%	467.792.050	KEC. PARINGIN	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur		12 Bln	45.000.000	12 Bulan	87.662.500	12 Bulan	153.415.500	12 Bulan	230.815.500	12 Bulan	253.897.050	12 Bulan	262.782.960	12 Bulan	262.782.960	KEC. PARINGIN	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan		0	0	0%	0%	0%	-	100%	7.202.500	100%	7.202.750	100%	8.715.025	100%	8.715.025	KEC. PARINGIN	
6	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tertalanya daerah otonomi baru				1 Kali	78.865.000	1 Kali	78.865.000	1 Kali	78.865.000	1 Kali	78.865.000	1 Kali	78.865.000	1 Kali	78.865.000	KEC. PARINGIN	
7	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Tertaksananya pembinaan administrasi desa dan kelurahan		3 Desa/Kel	21.000.000	100%	67.518.000	100%	18.599.000	100%	76.135.000	100%	83.748.500	100%	92.123.350	100%	92.123.350	KEC. PARINGIN	
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan daerah otonomi baru				1 Kali	16.765.000	4 Kali	81.750.000	4 Kali	99.375.000	4 Kali	109.312.500	4 Kali	120.243.750	4 Kali	120.243.750	KEC. PARINGIN	
9	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat				2 Keg	66.312.000	2 Keg	62.411.000	1 Keg	6.250.500	2 Keg	74.872.105	2 Keg	82.359.316	2 Keg	82.359.316	KEC. PARINGIN	
10	Program Operasional Kecamatan	Capaian kinerja pelayanan administrasi terpadu kecamatan				0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	106.090.000	12 Bulan	116.699.000	12 Bulan	128.368.900	12 Bulan	128.368.900	KEC. PARINGIN	
11	Program Pengembangan Informasi Wilayah	Teridentifikasinya informasi kewilayahan				100%	96.350.000	100%	17.700.000	100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	10.890.000	100%	10.890.000	KEC. PARINGIN	
12	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Tertaksananya kegiatan keagamaan		1 kali	29.700.000	2 Keg	89.895.000	1 Keg	70.955.000	1 Keg	70.955.000	1 Keg	78.050.500	1 Keg	85.855.550	1 Keg	85.855.550	KEC. PARINGIN	
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Tertaksananya penyusunan data basis pemerintahan				0 Bulan	-	12 Bulan	105.136.000	12 Bulan	115.649.600	12 Bulan	127.214.560	12 Bulan	139.936.016	12 Bulan	139.936.016	KEC. PARINGIN	
14	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Pembinaan lembaga RT				100%	209.700.000	100%	286.667.000	100%	216.693.500	100%	238.362.850	100%	262.199.135	100%	262.199.135	KEC. PARINGIN	
15	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa				1 Keg	13.066.000	1 Keg	35.591.000	1 Keg	39.543.000	1 Keg	43.497.300	1 Keg	47.847.030	1 Keg	47.847.030	KEC. PARINGIN	
X	KECAMATAN PARINGIN SELATAN				847.387.500		2.031.600.000		2.804.450.000		2.200.000.000		2.917.287.500		3.250.972.650		3.250.972.650		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	485.331.000	100%	862.968.500	100%	1.059.218.000	100%	868.966.800	100%	1.115.083.000	100%	1.234.646.300	100%	1.234.646.300	KEC. PARINGIN SELATAN	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi		100 %	230.751.500	100%	440.480.000	100%	491.989.400	100%	290.224.000	100%	433.681.000	100%	467.687.700	100%	467.687.700	KEC. PARINGIN SELATAN	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur SKPD Yang Disiplin		100 %	14.800.000	100%	78.300.000	100%	295.500.000	100%	73.500.000	100%	128.700.000	100%	141.570.000	100%	141.570.000	KEC. PARINGIN SELATAN	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	50.000.000	100%	88.307.200	100%	121.550.800	100%	70.000.000	100%	88.000.000	100%	96.800.000	100%	96.800.000	KEC. PARINGIN SELATAN	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip SKPD		100 %	100 %	-	60%	-	63%	-	65%	6.576.000	73%	7.233.600	75%	7.958.000	75%	7.958.000	KEC. PARINGIN SELATAN
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Terbinanya organisasi desa/kelurahan		100 %	22.000.000	100%	86.329.600	100%	219.811.000	100%	363.816.800	100%	446.686.900	100%	535.599.500	100%	535.599.500	KEC. PARINGIN SELATAN	
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan				0%	-	0%	-	100%	31.540.000	100%	64.900.000	100%	71.390.000	100%	71.390.000	KEC. PARINGIN SELATAN	
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya penataan daerah otonomi baru		100 %	13.850.000	100%	31.600.000	100%	124.500.000	100%	79.260.000	100%	119.702.000	100%	131.672.200	100%	131.672.200	KEC. PARINGIN SELATAN	
9	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat		100 %	23.700.000	100%	36.218.800	100%	128.818.800	100%	14.454.400	100%	15.899.800	100%	17.489.700	100%	17.489.700	KEC. PARINGIN SELATAN	
10	Program Operasional Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Paten				100%	4.250.000	100%	13.613.600	100%	86.880.000	100%	130.493.000	100%	143.542.300	100%	143.542.300	KEC. PARINGIN SELATAN	
11	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya Pembinaan Keagamaan Masyarakat				100%	95.723.000	100%	96.783.000	100%	90.667.000	100%	98.799.700	100%	107.697.600	100%	107.697.600	KEC. PARINGIN SELATAN	
12	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya kualitas kelembagaan				100%	83.207.500	100%	8.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	KEC. PARINGIN SELATAN	
13	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase data Laporan RT				100%	204.420.000	100%	224.970.000	100%	201.000.000	100%	239.580.000	100%	263.538.000	100%	263.538.000	KEC. PARINGIN SELATAN	
14	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan		100 %	6.955.000	100%	19.795.400	100%	19.195.400	100%	23.115.000	100%	28.528.500	100%	31.381.350	100%	31.381.350	KEC. PARINGIN SELATAN	



RPJMD Kabupaten Balangan
Tahun 2016-2021

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja pada akhir		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	19	
IX	KECAMATAN TEBING TINGGI				745.419.700		1.519.284.100		1.986.559.050		2.200.000.000		2.387.839.200		2.856.483.200		2.856.483.200		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	299.362.200	100%	677.060.200	100%	774.576.250	100%	887.384.650	100%	937.237.200	100%	1.030.960.900	100%	1.030.960.900	KEC. TEBING TINGGI	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	100 %	100 %	199.365.000	100%	282.115.000	100%	432.348.000	100%	633.902.550	100%	645.176.850	100%	709.694.550	100%	709.694.550	KEC. TEBING TINGGI	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	42.000.000	100%	15.000.000	100%	261.450.000	100%	58.150.000	100%	73.788.000	100%	311.026.800	100%	311.026.800	KEC. TEBING TINGGI	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur	100 %	100 %	26.000.000	100%	40.000.000	100%	44.000.000	100%	65.037.500	100%	73.301.250	100%	80.631.400	100%	80.631.400	KEC. TEBING TINGGI	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Laporan	100 %	100 %	48.645.500	100%	58.494.100	100%	64.343.500	100%	115.718.600	100%	129.486.650	100%	142.435.300	100%	142.435.300	KEC. TEBING TINGGI	
6	Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	Cakupan pembinaan desa dan kelurahan					1 -kegiatan	37.400.000	1 -kegiatan	41.140.000	1 -kegiatan	43.648.200	1 -kegiatan	66.684.400	1 -kegiatan	73.352.850	1 -kegiatan	73.352.850	KEC. TEBING TINGGI
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan penataan daerah otonomi baru	2 Kegiatan	2 Kegiatan	130.047.000	2 -kegiatan	124.185.000	3 -kegiatan	138.253.500	3 -kegiatan	148.885.000	3 -kegiatan	167.286.750	3 -kegiatan	184.015.450	3 -kegiatan	184.015.450	KEC. TEBING TINGGI	
8	Program Operasional Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi kecamatan (PATEN)					12 -bulan	115.531.800	12 -bulan	44.000.000	12 -bulan	48.400.000	12 -bulan	53.240.000	12 -bulan	58.564.000	12 -bulan	58.564.000	KEC. TEBING TINGGI
9	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	Persentase pembinaan keagamaan masyarakat					1 kegiatan	49.750.000	1 kegiatan	54.725.000	2 kegiatan	74.768.400	2 kegiatan	82.242.500	2 kegiatan	90.466.800	2 kegiatan	90.466.800	KEC. TEBING TINGGI
10	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT					10 -bulan	99.000.000	12 -bulan	108.900.000	12 -bulan	99.000.000	12 -bulan	131.780.000	12 -bulan	144.958.000	12 -bulan	144.958.000	KEC. TEBING TINGGI
11	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kegiatan pemantauan dan pelaksanaan pembangunan						20.748.000		22.822.800		25.105.100		27.615.600		30.377.150		30.377.150	KEC. TEBING TINGGI
5	Pengawasan				4.627.170.200		5.957.678.800		7.156.211.080		4.242.887.850		4.642.432.500		5.106.675.750		5.106.675.750		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sarana penunjang pegawai			1.128.025.400	100%	1.521.956.000	100%	1.603.868.000	100%	967.247.350	100%	1.061.227.950	100%	1.167.350.745	100%	1.167.350.745	INSPEKTORAT	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			978.150.000	100%	737.406.000	100%	585.734.600	100%	373.070.000	100%	410.377.000	100%	451.414.700	100%	451.414.700	INSPEKTORAT	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya pakaian dinas			30.000.000	100%	42.000.000	100%	107.200.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	INSPEKTORAT	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur			545.700.000	100%	800.200.000	100%	731.720.000	100%	280.000.000	100%	308.000.000	100%	338.800.000	100%	338.800.000	INSPEKTORAT	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	penyusunan dokumen perencanaan			184.175.000	100%	293.810.000	100%	362.841.000	100%	112.400.000	100%	101.640.000	100%	111.804.000	100%	111.804.000	INSPEKTORAT	
6	Program Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kabupaten	% SKPD/desa yang menindaklanjuti rekomendasi temuan keuangan					0%	200.820.000	75%	416.892.000	80%	497.895.000	85%	547.684.500	90%	602.452.950	90%	602.452.950	INSPEKTORAT
7	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya SKPD yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan			1.394.619.800	75%	957.686.800	80%	1.442.400.480	85%	807.825.500	90%	888.608.050	95%	977.468.855	95%	977.468.855	INSPEKTORAT	
8	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur			366.500.000	2 pegawai	561.600.000	22 pegawai	741.400.000	24 pegawai	782.450.000	28 pegawai	860.695.000	20 pegawai	946.764.500	20 pegawai	946.764.500	INSPEKTORAT	
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya pakaian dinas					30 stell	42.000.000	30 stell	107.200.000	0 stell	-	0 stell	-	0 stell	-	0 stell	INSPEKTORAT	
10	Program peningkatan kapabilitas APIP	Meningkatnya tingkat kapabilitas APIP					-	2 level	325.235.000	3 level	142.000.000	3 level	156.200.000	3 level	171.820.000	3 level	171.820.000	INSPEKTORAT	
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur					0 Pegawai	800.200.000	0 Pegawai	731.720.000	0 Pegawai	280.000.000	0 Pegawai	308.000.000	0 Pegawai	338.800.000	0 Pegawai	338.800.000	INSPEKTORAT
	TOTAL PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (A)				449.849.524.080	-	522.309.773.879	-	580.476.698.058	-	590.403.991.917	-	692.175.577.711	-	749.592.685.558	-	749.592.685.558		
	TOTAL PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (B)				697.643.060.118	-	1.264.847.501.046	-	1.814.468.265.253	-	1.869.035.905.539	-	2.259.575.832.735	-	2.240.660.320.384	-	2.252.903.251.384		
	TOTAL PENDANAAN URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (C)				32.891.009.300	-	56.567.882.150	-	77.728.962.820	-	83.552.656.172	-	90.562.625.931	-	83.199.890.612	-	84.016.086.012		
	TOTAL PENDANAAN URUSAN PENUNJANG URUSAN WAJIB & PILIHAN (D)				104.023.031.626	-	120.996.915.907	-	147.654.945.569	-	145.010.518.219	-	169.062.429.817	-	186.594.367.637	-	186.594.367.637		
	TOTAL PENDANAAN URUSAN WAJIB (YANDAS); WAJIB NON YANDAS; PILIHAN DAN PENUNJANG (A + B + C + D)				1.284.406.625.124		1.964.722.072.982		2.620.328.871.700		2.688.003.071.847		3.211.376.466.193		3.260.047.264.191		3.273.106.390.591		



BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Balangan dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022 serta untuk memberikan ruang dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2021 mendatang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, maka dalam masa transisi tersebut Pemerintah Daerah dapat menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sesuai dengan jadwal dan agenda yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum seluruhnya rampung sampai akhir tahun 2021 dan melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2021.

Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2021 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan langsung tahun 2020 tetap memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 yang sudah disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan telah dilantik pada tanggal 17 Agustus 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk itu perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- b) SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas



pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;

- c) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD, dan antara Renstra dan Renja SKPD;
- d) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan 2016–2021 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan daerah dan dukungan dari pihak swasta/dunia usaha serta masyarakat.

Dalam kaitannya dengan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan daerah dengan dukungan swasta/dunia usaha dan masyarakat perlu secara sungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan daerah yang direncanakan, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mampu memberikan hasil pembangunan yang optimal dan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Balangan yang maju dan sejahtera.

Paringin, Januari 2018

BUPATI BALANGAN

Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si